

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN  
JALAN LINGKUNGAN DI KAMPUNG  
MUNCANG RT 002 RW 002 DESA  
SINDANGMULYA KECAMATAN CIBARUSAH  
KABUPATEN BEKASI**



**Yulyani  
4115131082**

**Skripsi ini ditulis untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mendapatkan Gelar  
Sarjana Pendidikan**

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN  
KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
2017**

## ABSTRAK

**YULYANI. *Implementasi Program Pembangunan Jalan Lingkungan di Kampung Muncang RT 002 RW 002 Desa Sindangmulya Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi*. Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Jakarta. Juli 2017.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data empiris, fakta dan informasi yang objektif serta dapat dipercaya mengenai implementasi program pembangunan jalan lingkungan dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan jalan lingkungan di Kampung Muncang RT 002 RW 002 desa Sindangmulya Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan, terhitung dari 6 maret sampai 6 Mei 2017.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu data pada saat penelitian, triangulasi dengan *expert*, kemudian dianalisis secara deskriptif, dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa program pembangunan jalan lingkungan di Kampung Muncang RT 002 RW 002 Desa Sindangmulya masih belum sepenuhnya berhasil diimplementasikan, hal tersebut disebabkan karena program pembangunan jalan ini masih belum sesuai dengan harapan masyarakat selaku target sasaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program pembangunan ini masih belum terimplementasi dengan baik.

**Kata Kunci: Pembangunan Jalan Desa, Kampung Muncang, Desa Sindangmulya.**

## ABSTRACT

**YULYANI** *The Implementation of Environmental Road Development Program in Muncang Village RT 002 RW 002 Sindangmulya District Cibusah SubDistrict Bekasi Regency.* Thesis. Jakarta: Pancasila and Citizenship Education Program (PPKN). Faculty of Social Science. State University of Jakarta. July 2017.

This research aims to obtain empirical data, facts and information that are objective and reliable about the implementation of environmental road development programs and what are the factors influencing the development of environmental roads in Muncang Village RT 002 RW 002 Sindangmulya District Cibusah Subdistrict Bekasi Regency. This research was conducted for two months, starting from 6 March to 6 May 2017.

This research uses qualitative methods, the data collection techniques used are observation, interview, and documentation. While the data analysis technique used is descriptive analysis, that is data at the time of research, triangulation with expert, then analyzed descriptively, and then do drawing conclusion.

Based on the results of research that has been done shows that environmental road construction program in Muncang Village RT 002 RW 002 Sindangmulya District is still not fully implemented, it is because the road development program is still not in accordance with the expectations of the community as the target. So it can be concluded that the development program is still not implemented properly.

**Keywords:** Village Road Construction, Muncang Village, Sindangmulya District.



Building  
Future  
Leaders

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telp. (62-21) 29266139, 29266138, 4890046 Ext. 203, 47882930, 4890108, 4753655,  
Fax. (62-21) 47882930, 4753655

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**Penanggung Jawab/ Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Jakarta**



Dr. Muhammad Zid, M.Si.  
NIP. 19630412 199403 1 002

**TIM PENGUJI**

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	<u>Dr. M. Japar, M.Si.</u> Ketua		31 Juli 2017
2.	<u>Dwi Afrimetty Timoera, S.H., M.H.</u> Sekretaris		1 Agustus 2017
3.	<u>Irawaty, Ph.D.</u> Pembimbing I (Anggota)		31 Juli 2017
4.	<u>Mohammad Maiwan, Ph.D.</u> Pembimbing II (Anggota)		4 Agustus 2017
5.	<u>Yasnita Yasin, S.Pd., M.Si.</u> Penguji Ahli		31 Juli 2017

**Tanggal Lulus: 21 Juli 2017**

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah karya Saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah Saya nyatakan dengan benar.

**Nama** : Yulyani

**Nomor Registrasi** : 4115131082

**Tanda Tangan** :



**Tanggal** :

21 Juli 2017

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
SKRIPSI/KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Negeri Jakarta, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulyani  
Nomor Registrasi : 4115131082  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas : Ilmu Sosial  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas Skripsi Saya yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN  
DI KAMPUNG MUNCANG RT 002 RW 002 KECAMATAN CIBARUSAH  
KABUPATEN BEKASI.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Skripsi Saya selama tetap mencantumkan nama Saya Sebagai penulis/penciptas dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan Sebenar-benarnya.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal Juli 2017

Yang menyatakan



Yulyani

4115131082

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“ KARENA SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ADA  
KEMUDAHAN, SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN  
ADA KEMUDAHAN”**

**(QS. AL-INSYIRAH : 5-6)**

**“Doa adalah kunci pembuka hari dan sekrup penutup Malam”**

**(Mahatma Gandhi)**

**“Cobalah untuk tidak menjadi seorang yang sukses, tapi jadilah  
orang yang bernilai”**

**(Albert Einstein)**

Skripsi ini aku persembahkan untuk semua orang yang selalu mendoakan dan mendukungku setiap saat, terkhusus untuk mama dan bapak, adik dan kakak, serta seluruh anggota keluargaku.

Terimakasih tanpa kalian aku tidak akan sampai di titik ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tak lupa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya serta para sahabatnya. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang terlibat :

1. Bapak Dr. Muhammad Zid, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.
2. Bapak Drs. H. Suhadi, M.Si., selaku Koordinator Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.
3. Ibu Irawaty, Ph.D., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Mohammad Maiwan, Ph.D., selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti selama menyusun skripsi.
4. Bapak Raharjo, S.Pd.,M.Si, yang telah bersedia untuk memberikan pendapatnya dalam penelitian ini sebagai *Expert Opinion*.
5. Sekretaris Desa Sindangmulya Bapak Dasuki, dan Bapak Sarno selaku Ketua RT 02 yang telah bersedia untuk menjadi *key informan* pada penelitian ini.



6. Bapak Dao, Bapak Dading, Bapak Rosyid, Bapak Ajum, Bapak H. Munir, dan Bapak Eman yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini sebagai *informan*.
7. Segenap Dosen Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.
8. Orang tua dan keluarga tercinta yang dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang telah mendo'akan serta mendukung baik dalam bentuk moril maupun materil kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan studi.
9. Teman-teman seperjuangan Husnul, Linda, Revi, Deviana, Ratih, Intan yang telah memberi semangat serta dukungan kepada peneliti untuk segera menyelesaikan skripsi.
10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa PPKN A 2013 yang selalu mendukung peneliti dengan semangat kebersamaan.

Akhirnya, sebagai manusia peneliti menyadari mungkin dalam proses pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik atau saran sangat peneliti harapkan agar dapat memperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kepada banyak orang.

Jakarta, Juli 2017

  
Yulyani

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Pembatasan Masalah .....	7
D. Pertanyaan Penelitian .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8

## BAB II LANDASAN TEOROTIS

A. Deskripsi Teoritis .....	10
a. Hakikat Implementasi .....	10
b. Pembangunan Jalan .....	23
c. Hakikat Desa .....	28
d. Partisipasi Masyarakat .....	34
B. Penelitian yang Relevan .....	42

## BAB III METODELAGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian.....	45
B. Metode Penelitian.....	45
C. Penentuan “Setting” .....	46
D. Langkah-Langkah Penelitian.....	47
a. Teknik Pengumpulan Data.....	47
1. Penelitian Kepustakaan .....	47
2. Penelitian Lapangan .....	47
1) Observasi .....	47
2) Wawancara .....	48
3) Studi Dokumentasi .....	48
b. Teknik Kalibrasi Data .....	48
1. <i>Member Check</i> .....	49
2. <i>Audit Trial</i> .....	49
3. <i>Triangulasi</i> .....	49

4. <i>Expert Opinion</i> .....	50
E. Teknik Analisis Data .....	50

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	52
a. Lokasi Penelitian .....	52
b. Profil Desa.....	52
c. Visi dan Misi Desa Sindangmulya .....	54
d. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sindangmulya .....	56
B. Sumber Informasi .....	56
a. Data Informan.....	57
b. Key Informan .....	57
C. Temuan Penelitian.....	57
D. Pembahasan.....	79
E. Keterbatasan Penelitian .....	94

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	96
B. Implikasi .....	97
C. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA .....	99

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN 01 KISI-KISI INSTRUMEN.....	102
LAMPIRAN 02 PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN .....	104
LAMPIRAN 03 PEDOMAN WAWANCARA KEY INFORMAN .....	106
LAMPIRAN 04 PEDOMAN WAWANCARA EXPERT OPINION .....	108
LAMPIRAN 05 HASIL WAWANCARA INFORMAN .....	109
LAMPIRAN 06 HASIL WAWANCARA KEY INFORMAN .....	127
LAMPIRAN 07 HASIL WAWANCARA EXPERT OPINION .....	134
LAMPIRAN 08 CATATAN LAPANGAN.....	138
LAMPIRAN 09 TRIANGULASI DATA.....	143
LAMPIRAN 10 FORMAT OBSERVASI.....	146

## DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 Tabel Matriks .....	92
-------------------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 Hubungan Variabel Implementasi George C. Edwards III.....	16
GAMBAR 2.2 Implementasi sebagai Proses Politik dan Administrasi .....	18
GAMBAR 2.3 Tahapan-tahapan Perencanaan Partisipatif .....	37
GAMBAR 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sindangmulya.....	56
GAMBAR 4.2 Bagan Temuan dan Pembahasan .....	94

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tujuan lahirnya negara Indonesia, seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>1</sup> Memajukan kesejahteraan umum berarti memberikan kesejahteraan bagi setiap masyarakat Indonesia untuk berbagai kalangan masyarakat baik masyarakat kota maupun masyarakat desa.

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki ciri khas dalam pembagian wilayah pemerintahannya, yaitu dengan dipisahkannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau yang biasa disebut dengan otonomi daerah. Dipisahkan bukan berarti pemerintah daerah berhak melakukan apa saja yang diinginkan secara sewenang-wenang, namun pemerintah daerah harus memperhatikan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Sistem otonomi daerah lahir pada era Orde Baru yang saat itu menerapkan sistem sentralistik dimana kebijakan dan keputusan terkait kehidupan bernegara dan berbangsa berada sebesar-besarnya di tangan pemerintah pusat (*top-down planning*).<sup>2</sup> Sistem sentralisasi yang diterapkan pada masa Orde Baru telah menimbulkan kesenjangan pembangunan antara daerah dan pusat. Karena

---

<sup>1</sup>Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Yuyus Kardiman, Martini, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2013), hal. 166



kebijakan tersebut dirasa kurang memberikan manfaat bagi masyarakat luas sehingga pada era pengalihan kepemimpinan Soeharto ke BJ. Habibie, Habibie membuat kebijakan politik baru yang mengubah hubungan kekuasaan pusat dan daerah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang pelaksanaan otonomi daerah atau yang biasa disebut desentralisasi.<sup>3</sup>

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 daerah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pusat, dengan begitu diharapkan daerah dapat mengurus dan mengatur daerahnya masing-masing sesuai kebutuhan daerah tersebut. Adapula landasan hukum lain yang mengatur mengenai otonomi daerah adalah TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian di respon melalui keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah.

Penerapan Undang-Undang tentang otonomi daerah mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Perubahan pertama adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ke Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diterbitkan pada masa pemilu tahun 2004. Namun, Undang-Undang daerah tersebut dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga diganti ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian mengalami

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 167

perubahan kembali ke Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang berlaku hingga saat ini.

Otonomi daerah adalah landasan penting bagi pemerintah daerah untuk wilayah yang dipimpinnya dalam memajukan daerah sesuai potensi yang dimilikinya. Hal itu jelas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang otonomi daerah yang berbunyi “Daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>4</sup>

Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan daerah mencakup kewenangan pada semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Urusan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berbeda namun saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan pemerintah pusat atau pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara.<sup>5</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 pasal (1) ayat (6) Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 pasal (1) ayat (12) Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan.<sup>6</sup> Wilayah pemerintahan daerah dibagi menjadi beberapa wilayah pemerintahan yaitu: wilayah pemerintahan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.

Wilayah desa diatur dan diurus sendiri oleh pemerintah desa sebagai wujud dari tugas perbantuan yang merupakan realisasi dari otonomi daerah hal tersebut ditegaskan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kewenangan desa menurut Undang-undang adalah meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.<sup>7</sup> Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah desa bersama pemerintah daerah berupaya melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, terutama dalam sektor infrastruktur atau sarana dan prasarana dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan pada sektor infrastruktur atau sarana dan prasarana pedesaan meliputi pembangunan pengairan, jaringan jalan dan lingkungan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 pasal (1) ayat (13) Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 pasal 18 Tahun 2014 tentang Desa

permukiman.<sup>8</sup> Salah satu pembangunan sarana dan prasarana yang paling menunjang adalah pembangunan jalan desa. Pada saat ini, jalan menjadi kebutuhan yang sangat vital sebagai pendukung utama dinamika dan aktivitas ekonomi. Jalan yang merupakan prasarana transportasi mempunyai peranan penting dalam usaha membuka, mempermudah dan meningkatkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya dalam suatu negara.

Kualitas jalan yang baik akan memberikan manfaat dalam penggunaannya, yang meliputi aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan, dan kecepatan tempuh rata-rata.<sup>9</sup> Kondisi tersebut pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi terpadu yang berorientasi pada efisiensi transportasi guna mempercepat pembangunan di segala bidang.

Program pembangunan jalan desa akan berjalan dengan baik apabila ada sinergi dan dukungan dari pihak terkait, yaitu pemerintah dan masyarakat setempat dalam usaha untuk mengimplementasikannya. Namun dalam realisasinya, pembangunan infrastruktur (jalan) belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor. Seperti yang terjadi pada pengelolaan jalan diperkampungan desa Sindangmulya tepatnya di Kampung Muncang RT 002 RW 002.

---

<sup>8</sup> Rahardjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 8

<sup>9</sup> Sri Hartini dan Setiajeng Kadarsih, *Jurnal Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Jalan di Kabupaten Banyumas*, (Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Purwokerto, 2011)

Program pembangunan jalan desa di Kampung Muncang di beri nama “Jalan Lingkungan”. Program jalan lingkungan ini sudah mulai diselenggarakan sejak tahun 2004, dari total panjang jalan kampung sekitar  $\pm$  900 M yang baru tersentuh program pembangunan jalan lingkungan yaitu sekitar  $\pm$  600 M.<sup>10</sup> Hal itu menandakan bahwa pembangunan jalan lingkungan di kampung tersebut belum merata. Pembangunan jalan lingkungan yang belum merata menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat ketika musim hujan datang karena jalan menjadi becek dan sulit untuk dilalui oleh kendaraan roda dua maupun oleh pejalan kaki.

Mengingat penting dan strategisnya makna jalan sebagai bagian dari urusan hajat hidup orang banyak, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Implementasi Program Pembangunan Jalan Lingkungan di Kampung Muncang RT 002 RW 002, ketertarikan tersebut dilandasi oleh pemikiran bahwa pemerintah daerah telah mengeluarkan landasan hukum yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, namun dalam realisasinya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itulah, faktor tersebut perlu ditelaah guna memberikan titik terang atas sumber permasalahan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas. Maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Sekretaris Desa Bapak Dasuki, Senin 06 Maret 2017 17.00 WIB

1. Bagaimanakah implementasi program pembangunan “Jalan Lingkungan” di Kampung Muncang RT 002 RT 002 Desa Sindangmulya?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat implementasi program pembangunan “Jalan Lingkungan” di Kampung Muncang RT 002 RW 002?
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa (kepala desa) dalam mengimplementasikan program tersebut?
4. Apa saja dampak positif dan negatif terhadap pembangunan jalan di Kampung Muncang RT 002 RT 002 Desa Sindangmulya??
5. Bagaimanakah peran serta masyarakat Kampung Muncang RT 002 RT 002 Desa Sindangmulya dalam implementasi program pembangunan “Jalan Lingkungan”?

### **C. Pembatasan Masalah**

Mengingat begitu luasnya pembangunan jalan desa, maka berdasarkan identifikasi diatas, penelitian ini dibatasi pada “Implementasi program pembangunan jalan lingkungan di Kampung Muncang RT 002 RW 002?”

### **D. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi area dan pembatasan masalah fokus penelitian maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi program pembangunan “Jalan Lingkungan” di Kampung Muncang RT 002 RW 002?

## **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi program pembangunan “Jalan Lingkungan” di Kampung Muncang RT 002 RW 002?

## **F. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis :**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait implementasi program kerja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur berupa jalan di Kampung Muncang RT/RW 002/002 .

### **b. Manfaat Praktis :**

#### **1) Bagi peneliti**

Dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dan pengalaman baru yang langsung dialami. Dengan demikian, peneliti akan memiliki wawasan baru dalam memecahkan masalah terkait pembangunan jalan desa.

#### **2) Bagi Pemerintah**

Memberikan informasi sebagai evaluasi, bagaimana setiap program kerja pemerintah dapat berjalan dengan baik dan semestinya, sehingga pemerintah mampu memberikan pelayanan dan kinerja yang lebih baik bagi masyarakat.

### 3) Bagi Masyarakat Umum

Memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai implementasi-implementasi program kerja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur berupa jalan di desa.



## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Deskripsi Teoritis

##### a. Hakikat Implementasi

Konsep implementasi menurut kamus Webster dijelaskan secara singkat bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).<sup>1</sup> Sehingga dapat diartikan bahwa implementasi adalah realisasi dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan mengharapkan suatu tercapainya tujuan dari kebijakan. Begitupun menurut Van Meter dan Van Horn ia berpendapat bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta dengan harapan agar tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Riant Nugroho implementasi adalah suatu pelaksanaan kebijakan publik yang di lakukan oleh unit-unit administrasi dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya, terutama finansial dan manusia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2004), hal. 64

<sup>2</sup> Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (CV Pustaka Setia, Bandung, 2014), hal. 232

<sup>3</sup> Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Analisis Kebijakan*, (PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007), hal. 11

Implementasi kebijakan merupakan tahap keempat dari lima rangkaian proses pembuatan kebijakan publik sehingga implementasi kebijakan dianggap sebagai keluaran atau output dari pembuatan kebijakan, hal itu didukung oleh berbagai pendapat para ahli, diantaranya sebagai berikut : Prof. H. Tachjan berpendapat bahwa implementasi adalah suatu proses untuk menjalankan kebijakan menjadi sebuah tindakan kebijakan dari politik ke dalam tindakan administrasi, pengembangan ini dalam rangka penyempurnaan suatu program.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Hanifah Harsono implementasi adalah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan di buat dan di setuju oleh pemilik kepentingan, kegiatan implementasi terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.<sup>5</sup> Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979), menjelaskan yang menjadi fokus perhatian dari implementasi yaitu memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah program-program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, implementasi adalah penerapannya.<sup>6</sup>

Dari teori diatas dapat diketahui bahwa studi implementasi merupakan bagian dari tahapan kebijakan publik. Dimana proses implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan. Implementasi adalah tahapan yang paling penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur proses kebijakan secara keseluruhan dapat diketahui tingkat keberhasilan dan pencapaian tujuan

---

<sup>4</sup> Any.web.id diakses Selasa 07 Maret 2017 pukul 13.06

<sup>5</sup> *Ibid*, pukul 13.04

<sup>6</sup> Solichin Abdul Wahab, *Op.Cit*, hal. 65

kebijakan. Sesuai dengan pendapat Chief. O. Udoji yang menyatakan bahwa, “pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak di implementasikan”.<sup>7</sup> Tahap implementasi dapat membantu tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggungjawab pada setiap kebijakan.<sup>8</sup>

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat di mulai apabila tujuan-tujuan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yang banyak dikemukakan oleh para ahli.

Salah satu ahli yang mengemukakan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi implementasi adalah George C. Edwards III, model implementasi kebijakan yang dianut oleh George C. Edwards III berperspektif *top down* menurut pandangan ada 4 variabel yang

---

<sup>7</sup> Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (CV Alfabeta, Bandung, 2008), hal. 140

<sup>8</sup> Samodra Wibawa, Diah Asitadani, et, all, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Fakultas ISIPOL UGM, Yogyakarta, 2000), hal. 28 terjemahan dari William N. Dunn, *Public Policy Analysis : An Introduction Second Edition*, (University of Pittsburgh, New Jersey, 1994)

mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.<sup>9</sup>

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mengharuskan implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Selain itu juga implementor harus tahu apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan, setelah tahu dan paham tentang tujuan dan sasaran kebijakan pada tahap selanjutnya implementor harus mengkomunikasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi kesalahan pada tahap implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan dari kelompok sasaran yang bersangkutan.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi: (1) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*miskomunikasi*), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. (2) kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (*ambigu/mendua*).

---

<sup>9</sup> Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005), hal. 90-92

Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak di capai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. (3) konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.<sup>10</sup>

b. Sumberdaya

Meski isi dari kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten pada kelompok sasaran kebijakan, tapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial.

Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, diantaranya : Staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas. *Staf*, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan dibutuhkan. *Informasi* yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan terapkan/dilaksanakan. *Kewenangan* artinya kewenangan yang dibutuhkan bagi implementor sangat bergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan. Kewenangan dapat berwujud penyediaan barang dan jasa, kewenangan untuk memperoleh dan menggunakan dana, kewenangan untuk meminta kerja sama dengan

---

<sup>10</sup> Leo Agustino, *Op.Cit*, hal. 150-151

badan pemerintah yang lain, dan lain-lain. *Fasilitas*, fasilitas fisik yang menunjang bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor.

c. Disposisi

Disposisi bisa dikatakan sebagai sifat dari si implementor, disposisi bisa dikatakan juga sebagai watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis dan lain sebagainya. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka implementasi kebijakan akan menjadi tidak efektif.

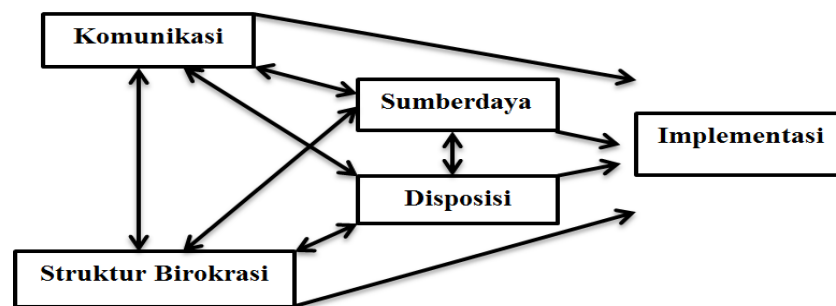
Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel disposisi yaitu kognisi, arahan dan tanggapan pelaksana, serta intensitas respon<sup>11</sup> : (1) kognisi , yaitu seberapa jauh pemahaman implementor terhadap kebijakan. (2) arahan dan tanggapan pelaksanaan. Hal ini meliputi penerimaan, ketidakberpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijakan. (3) intensitas respon atau tanggapan pelaksana.

---

<sup>11</sup> Sahya Anggara, *Op.Cit*, hal. 253

#### d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksana sebuah kebijakan. berupa *Standart Operating Prosdure* (SOP) yang berfungsi sebagai pedoman bagi setiap implementor.



Gambar 2.1

Hubungan Variabel Implemetasi menurut George C. Edwards III

Jika George C. Edwards III mengemukakan ada 4 variabel penting yang mempengaruhi implementasi suatu program atau kebijakan, lain hal nya dengan pendapat Merilee S Grindle, menurutnya keberhasilan implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh 2 variabel besar, yakni Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dan Lingkungan Implementasi (*Content of Implementation*).<sup>12</sup> Berikut adalah penjelasan dari 2 variabel tersebut:

<sup>12</sup> Subarsono, *Op.Cit*, hal. 93

a. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Isi atau program kebijakan akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Isi kebijakan atau program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau yang bertentangan dengan masyarakat kemungkinan besar akan mendapat perlawanan baik dari kelompok sasaran, maupun dari implementornya yang merasa sulit melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa di rugikan.<sup>13</sup>

Variabel yang dapat mempengaruhi isi kebijakan menurut Grindle, yaitu : (1) kepentingan kelompok sasaran, (2) jenis manfaat, (3) derajat perubahan yang diinginkan, (4) letak pengambilan keputusan, (5) pelaksanaan program, (6) sumber daya yang dilibatkan.<sup>14</sup>

b. Lingkungan Implementasi (*Content of Implementation*)

Lingkungan implementasi juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan suatu program karena meskipun program yang direncanakan sudah memenuhi standar kebutuhan masyarakat (kelompok sasaran) dan memberikan dampak yang baik bagi kelompok sasaran sehingga akan menimbulkan dukungan dari

---

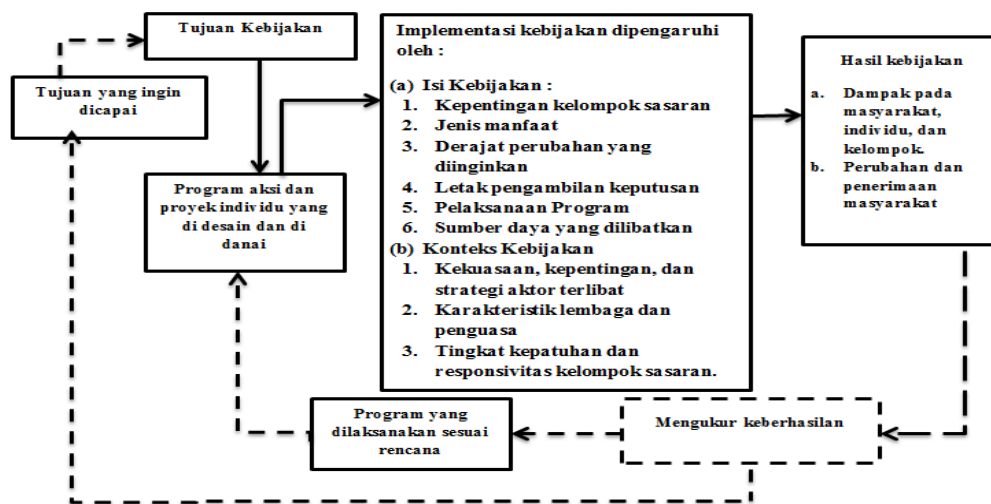
<sup>13</sup> Sahya Anggara, *Op.Cit*, hal. 255

<sup>14</sup> Subarsono, *Loc.Cit*, hal. 93



masyarakat, hasil implementasi tetap bergantung pada implementornya.<sup>15</sup>

Variabel lingkungan implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle, yaitu : (1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor terlibat, (2) karakteristik lembaga dan penguasa, (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.<sup>16</sup>



Gambar 2.2

### Implementasi sebagai Proses Politik dan Administrasi

Selain itu, Mazmanian Daniel A dan Sabatiar Paul A (1983) juga mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi kebijakan. Menurut mereka terdapat tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu *Karakteristik Masalah*

<sup>15</sup> Sahya Anggara, *Op.Cit*, hal. 256

<sup>16</sup> Subarsono, *Loc.Cit*, hal. 93-94

*(tractability of the problem), Karakteristik Kebijakan (ability of statute to structure implementation, dan Lingkungan Kebijakan (nonstatutory variables affecting impementation)).<sup>17</sup>*

a. Karakteristik Masalah:

- (1) tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Ada beberapa tipe masalah sosial yang ada di masyarakat. Namun akan berbeda dalam pemecahannya, ada tipe masalah yang sulit dipecahkan dan ada masalah yang mudah dipecahkan. Oleh sebab itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.
- (2) Tingkat kemajemukan/keragaman dari kelompok sasaran. Ini berarti bahwa suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasaran adalah homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasaran heterogen, implemetasi program akan relatif lebih sulit karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran program berbeda-beda.
- (3) Proposi/jumlah kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar. Dengan demikian jumlah kelompok sasaran

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 95-99

memiliki pengaruh besar terhadap implementasi kebijakan atau implementasi suatu program.

- (4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberi pengetahuan atau sifatnya kognitif akan relatif mudah untuk diimplementasikan daripada program bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

b. Karakteristik Kebijakan

- (1) Kejelasan isi kebijakan. Semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan maka akan semakin mudah kebijakan tersebut untuk diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya salah tafsir (distorsi) dalam implementasi kebijakan.
- (2) Dukungan teoritik. Kebijakan yang memiliki dasar teoritik memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.
- (3) Alokasi sumberdaya finansial. Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staff untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya itu membutuhkan dana.

- (4) Dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horisontal antarinstansi yang terlibat dalam implementasi program.
- (5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
- (6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
- (7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat atau berpartisipasi, akan mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing atau teralienasi apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya.

c. Lingkungan Kebijakan

- (1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembaharuan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup.
- (2) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang memberikan keuntungan berupa insentif biasanya mudah mendapat dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-insentif, seperti kenaikan harga BBM atau kenaikan pajak akan kurang mendapat dukungan publik.

- (3) Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*). Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain : (a) kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan, (b) kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana, dan membuat pertanyaan yang ditujukan kepada badan legislatif.
- (4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dari kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

Sebenarnya banyak pendapat dan banyak faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan untuk implementasi. Dari beberapa teori yang dijelaskan oleh para ahli diatas, ada dua aktor yang paling berpengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan yaitu pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian ketika suatu kebijakan atau program ingin terealisasi/ terimplementasi

dengan baik, maka pemerintah dan masyarakat perlu untuk bersinergi guna mencapai tujuan dari dibuatnya suatu kebijakan.

## **b. Pembangunan Jalan**

Pembangunan dimaknai sebagai perubahan sosial yang dikehendaki (*intended social change*).<sup>18</sup> Menurut Todaro pembangunan merupakan proses multidimensi yang meliputi perubahan organisasi dan orientasi serta melibatkan perubahan seluruh sistem sosial maupun ekonomi.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Kunarjo pembangunan diartikan sebagai perubahan yang meningkat, baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi.<sup>20</sup> Pembangunan juga diartikan sebagai aktifitas terpadu beberapa lembaga yang saling mendukung dan saling pengaruh mempengaruhi.<sup>21</sup>

Kemudian Soerjono Soekanto mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu, pembangunan di Indonesia merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu, dengan sengaja, dan memang

---

<sup>18</sup> Ivanovich Agusta dan Fujiartanto, *Indeks Kemandirian Desa*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014), hal. 4

<sup>19</sup> Kunarjo, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, (Universitas Indonesia, Jakarta, 2002), hal.12

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Bachtiar Hassan Mirza, Wahyu Ario Pratomo, dkk, *Pembangunan Pedesaan: Teori dan Praktek*, (USU Press, Medan, 2010), hal. 8

dikehendaki, baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan, maupun oleh masyarakat.<sup>22</sup>

Dari beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ahli bisa diambil kesimpulan bahwa pembangunan dapat diartikan sebagai proses sosial yang dikehendaki serta meningkat dan akan berpengaruh terhadap aspek sosial lainnya.

Pembangunan jalan sendiri dimaknai sebagai pembuatan jalan dari yang awalnya tidak ada menjadi ada atau dari keadaan yang tidak memadai menjadi memadai sebagai prasarana transportasi. Sedangkan Pembangunan jalan yang ideal harus melibatkan banyak pihak baik itu pemerintah maupun masyarakat sehingga pembangunannya lebih tepat karena sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan sebuah masalah baru.

Pembangunan jalan merupakan hal yang penting dalam melaksanakan suatu pembangunan daerah, dengan di bangunnya jalan maka akan berdampak pada berbagai aspek sosial, ekonomi, sosial, budaya. Jalan memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup banyak orang, adapun peran atau fungsi jalan bagi kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015), hal. 358

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 pasal 5 ayat (1-3) Tahun 2004 tentang Jalan.

1. Jalan yang merupakan bagian dari prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kepentingan rakyat.
2. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
3. Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dengan dibangunnya jalan akan mempermudah aksesibilitas dari dan menuju suatu tempat yang keberadaannya masih tertinggal dan sulit untuk di jangkau. Oleh sebab itu jalan dianggap sebagai salah satu prasarana transportasi yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Transportasi darat yang di dukung oleh jaringan jalan berfungsi sebagai fasilitas fisik infrastruktur bagi kepentingan masyarakatnya.

Menurut sistem jaringannya, jalan terbagi ke dalam dua kelompok yaitu sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.<sup>24</sup> Sedangkan sistem

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 pasal 7 ayat (2) Tahun 2004 tentang Jalan.



jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut kewenangannya, pengelolaan jalan terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>26</sup> Pemerintah pusat memiliki wewenang dalam pengelolaan sistem jaringan jalan primer berupa jalan nasional dan jalan provinsi, sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan mengelola sistem jaringan jalan sekunder berupa jalan kabupaten/kota.<sup>27</sup>

Sedangkan pengelompokan jaringan jalan dan yang berwenang dalam pembuatannya dapat dikelompokkan menjadi enam yaitu<sup>28</sup>:

1. Jalan nasional, jalan yang pembuatannya di tangani oleh Menteri Pekerjaan Umum atau pejabat yang di tunjuk
2. Jalan provinsi, jalan yang pembuatannya di tangani oleh Pemerintah daerah atau instansi yang di tunjuk
3. Jalan kabupaten, jalan yang pembuatannya di tangani oleh Pemerintah daerah kabupaten atau instansi yang di tunjuk
4. Jalan kota, jalan yang pembuatannya di tangani oleh Pemerintah kota atau instansi yang di tunjuk

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 pasal 7 ayat (3) Tahun 2004 tentang Jalan.

<sup>26</sup> Sri Hartini dan Setiajeng Kadarsih, *Op.Cit.*

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*

5. Jalan Desa, jalan yang pembuatannya di tangani oleh Pemerintah desa atau kelurahan
6. Jalan khusus, jalan yang pembuatannya di tangani oleh pejabat atau orang yang di tunjuk.

Pembangunan jalan desa merupakan tugas dan wewenang dari pemerintah desa sebagai wujud dari otonomi daerah. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.<sup>29</sup> Jalan lingkungan adalah salah satu program perbaikan sarana dan prasarana yang ada di suatu desa, adapun definisi dari jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.<sup>30</sup>

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah di biayai oleh : (a) pemerintah pusat sebagai pelaksana asas dekonsentrasi, (b) pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah desa sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.<sup>31</sup> Menurut Undang-Undang tentang desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, desa memiliki sendiri pendapatan yang bersumber dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 pasal 9 ayat (6) Tahun 2004 tentang Jalan.

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 pasal 8 ayat (5) Tahun 2004 tentang Jalan.

<sup>31</sup> Kurnarjo, *Op.Cit*, hal.111-112

kabupaten/kota, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (APBD), hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa.

Kesimpulannya, pembangunan jalan lingkungan diartikan sebagai pengadaan jalan atarpermukiman dari yang belum ada menjadi ada dan dari yang belum memadai menjadi memadai yang bertujuan untuk memenuhi sarana dan prasarana desa untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Pembangunan jalan desa dilakukan oleh pemerintah desa sebagai wujud dari otonomi daerah.

### **c. Hakikat Desa**

Definisi desa menurut buku sosiologi desa adalah entitas yang di dalamnya terkumpul berbagai penanda eksistensi, desa juga bisa disebut sebagai komunitas yang ditandai dengan kehadiran populasi yang berinteraksi sosial dalam suatu wilayah yang didukung oleh semangat kebersamaan.<sup>32</sup> Dalam ilmu Antropologi pedesaan, desa biasa disebut dengan rural, yang diartikan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan

---

<sup>32</sup> Darmawan Salman, *Sosiologi Desa*, (Ininnawa, Makasar, 2012), hal. 18

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.<sup>33</sup>

Banyak sebutan untuk mengartikan desa. Beberapa tokoh mempunyai definisi masing-masing namun pada intinya sama. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo mengartikan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang memiliki wewenang untuk mengadakan pemerintahan sendiri.<sup>34</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang, yang dimaksud desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>35</sup>

Bintaro mengemukakan bahwa faktor-faktor geografis jelas berpengaruh pada desa, sehingga dia mendefinisikan bahwa desa adalah perwujudan geografis atau kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat di tempat itu (suatu daerah), dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Reza Zaki, *Membangun Desa, Membangun Indonesia*, (Pustaka Saga, Surabaya, 2016), hal. 7

<sup>34</sup> Bachtiar Hassan Mirza, dkk, *Op.Cit*, hal. 231

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>36</sup> Bachtiar Hassan Mirza, dkk, *Op.Cit*, hal. 133

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang, terbukti dengan adanya Undang-Undang khusus yang mengatur tentang desa yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa memiliki 3 unsur penting yaitu, Daerah, Penduduk, dan Tata kehidupan. *Daerah* berupa tanah produktif, lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis. *Penduduk* berupa jumlah penduduk, persebaran penduduk dan mata pencaharian penduduk. *Tata Kehidupan* berupa pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa termasuk seluk beluk kehidupan masyarakat desa.<sup>37</sup> Selain itu terdapat beberapa jenis desa, diantaranya desa sawadaya (desa tradisional), desa swakarya (desa transisi), dan desa swasembada (desa maju).<sup>38</sup>

Masyarakat pedesaan memiliki ciri khas/karakteristik sendiri yang membedakannya dengan masyarakat perkotaan, adapun yang menjadi ciri-ciri masyarakat pedesaan antara lain:

1. Di dalam masyarakat pedesaan di antara warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat (kekeluargaan yang kental).
2. Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan (*Gemeinschaft* atau paguyuban).
3. Sebagian besar warga masyarakat pedesaan bertahan hidup dari pertanian. Pekerjaan-pekerjaan yang bukan pertanian merupakan pekerjaan sampingan (*part time*) yang biasanya sebagai pengisi waktu luang.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 231

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 232

4. Masyarakatnya bersifat homogen atau sejenis, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat istiadat dan sebagainya.<sup>39</sup>

Selain memiliki ciri-ciri atau karakteristik tertentu terhadap masyarakatnya. Desa juga memiliki ciri khas dari segi kehidupan masyarakatnya. Sajogyo dan pudjiwati menggolongkan enam ciri kehidupan masyarakat di pedesaan adalah sebagai berikut:

1. Konflik dan Persaingan, di desa orang hidup secara berdekatan (bertetangga) secara terus menerus, peluang untuk terjadinya perselisihan akan sering terjadi. Sumber dari banyak pertengkaran dalam masyarakat pedesaan di Indonesia dipicu akan banyak hal seperti perebutan tanah, perbedaan pendapat antar kaum muda dan kaum tua, dan perbedaan antara wanita pria dan wanita.
2. Kegiatan Bekerja, masyarakat kota selalu beranggapan bahwa desa adalah tempat yang tenang, seperti yang di kemukakan oleh Boeke : “Desa itu bukan tempat untuk bekerja, tetapi tempat untuk ketentraman”. Berbeda dengan kenyataannya sebagian besar masyarakat desa berprofesi sebagai petani, masyarakat biasa bekerja keras pada saat masa-masa panen, tetapi mengalami kelegaan bekerja dalam masa-masa yang lain.
3. Sistem Tolong Menolong, aktivitas tolong menolong terlihat dalam banyak kegiatan pada masyarakat desa di Indonesia, yang terjadi dalam aktivitas kehidupan rumah tangga, misalnya dalam acara pesta pernikahan dan dalam acara kematian.
4. Gotong royong, selain tolong menolong salah satu ciri dari masyarakat pedesaan adalah memiliki karakteristik gotong royong atau bekerjasama, yaitu kegiatan bekerjasama antara sejumlah besar warga desa untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu yang dianggap berguna bagi kepentingan umum. Misalnya bergotong royong membersihkan irigasi yang tersendat oleh sampah.
5. Jiwa Gotong Royong, dasar dari aktivitas tolong menolong dan gotong royong adalah jiwa gotong royong. Gotong royong dan tolong menolong adalah suatu sikap atau tindakan ketika seseorang memiliki jiwa gotong royong. Jiwa gotong royong juga dapat diartikan sebagai suatu prinsip yang dimiliki oleh individu yang lebih mengedepankan kepentingan umum dibanding kepentingan diri sendiri (individualistik).
6. Musyawarah dan Jiwa Musyawarah, musyawarah adalah satu gejala sosial yang ada dalam banyak masyarakat Indonesia.

---

<sup>39</sup> Bachtiar Hassan Mirza, dkk, *Loc. Cit*

artinya ialah, bahwa keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat-rapat tidak berdasarkan suara dari mayoritas melainkan dari seluruh peserta rapat. Sedangkan jiwa musyawarah diartikan sebagai suatu kesediaan individu untuk melepaskan ego dari pendapat yang menurutnya benar agar bisa cocok atau paling sedikit mendekati pendapat umum. Menurut Vollenhoven dalam sebuah masyarakat prinsip musyawarah itu biasanya dilaksanakan dalam hal untuk memecahkan pertengkaran kecil atau besar, dan bertujuan untuk mendamaikan bukan malah untuk memenangkan atau mengalahkan salah satu pihak.<sup>40</sup>

Seperti yang sudah di bahas di atas bahwa desa memiliki kewenangan sendiri dalam melaksanakan pemerintahannya. Kewenangan desa menurut Undang-undang adalah meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.<sup>41</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa, pada tahun 2016 dana desa di prioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.<sup>42</sup>

Pembangunan desa meliputi, pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, jembatan sederhana, talud, fasilitas pos pelayanan terpadu, fasilitas

---

<sup>40</sup> Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan*, (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011), hal.24-32

<sup>41</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 pasal 18 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>42</sup> Reza Zaki, dkk, *Op.Cit*, hal. 8

untuk pendidikan anak usia dini, dan lain-lain.<sup>43</sup> Jika Infrastruktur serta sarana dan prasarana desa sudah baik, dana desa dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, seperti: pengembangan Badan Usaha Milik Desa, pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat desa. Namun, dalam realisasinya, masyarakat berhak menentukan secara mandiri penggunaan dana desa sesuai musyawarah desa (Musdes) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Program pembangunan desa tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dana yang menunjang pembangunan, adapun sumber keuangan desa menurut Undang-Undang berasal dari pendapatan asli desa, APBN, hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, APBD, hibah atau sumbangan, dan lain-lain dari pendapatan desa yang sah.<sup>44</sup> Pendapatan asli desa meliputi, (1) hasil usaha desa, (2) hasil kekayaan desa, (3) hasil swadaya kekayaan desa, (4) lain-lain pendapatan desa yang sah.<sup>45</sup> Pendapatan tersebut digunakan untuk kepentingan dan pembangunan desa.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa desa merupakan suatu wilayah yang didalamnya terdapat masyarakat dengan karakteristik

---

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 pasal 72 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>45</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003), hal.131



tersendiri yang saling berinteraksi dan memiliki kewenangan dalam melakukan pemerintahannya sendiri. kewenangan desa salah satunya adalah kewenangan dalam melaksanakan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

#### **d. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi adalah sebuah konsep sentral dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat, pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan awal dan nyata dari semua pihak termasuk didalamnya masyarakat.<sup>46</sup> Partisipasi memiliki makna, bahwa penyelenggaraan pemerintah desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggungjawab.<sup>47</sup>

Menurut Arnstein partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan upaya untuk memberikan kesempatan pada masyarakat biasa, yang pada umumnya selalu ditinggalkan dalam proses penentuan kebijakan politik dan ekonomi, untuk diikuti serakan dalam pembangunan.<sup>48</sup>

Menurut Rahadjo Adisamita partisipasi masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan dan

---

<sup>46</sup> Agustina Ifana Kandenafa, *Jurnal Ekologi Birokrasi Volume 2 Nomor 1*, (Universitas Cendrawasih: Jayapura Papua, 2016).

<sup>47</sup> HAW Widjaja, *Op.Cit*, hal.36-37

<sup>48</sup> Hasil Seminar Nasional, *Buku 3 Pembelajaran dan Dampak Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*, (Yogyakarta, 2008), hal. 259

kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program-program yang dilaksanakan di daerahnya.<sup>49</sup> Bentuk partisipasi masyarakat tersebut antara lain, mereka bersedia menyerahkan sebagian lahan atau tanahnya yang dilewati oleh pembangunan jaringan irigasi tanpa pembayaran ganti rugi harga lahan atau tanah tersebut, bekerja bersama-sama dalam pembangunan desa secara sukarela, dan lainnya.<sup>50</sup> Partisipasi masyarakat diartikan juga sebagai keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal.<sup>51</sup>

Peran serta masyarakat memiliki makna yang beragam bagi setiap pemahaman masing-masing individu, sehingga kita perlu untuk mengetahui kriteria apa yang termasuk ke dalam istilah peran serta. Dalam buku *Pembangunan Pedesaan* dituliskan beberapa kriteria istilah peran serta (partisipasi) yang meliputi:

1. Partisipasi mengacu kepada subyek yang berinteraksi, yaitu individu yang berada dalam suatu unit masyarakat (kelompok), organisasi, perekonomian, pemerintah dan bangsa, di mana masing-masing mereka mempunyai keleluasaan untuk mengambil keputusannya sendiri-sendiri, tetapi terikat dalam ikatan solidaritas tertentu untuk mewujudkan kepentingan atau rencana bersama.
2. Dalam partisipasi terdapat kesadaran dan kesukarelaan individu untuk mewujudkan peranan yang diberikan oleh organisasi secara

---

<sup>49</sup> Rahadjo Adisasmita, *Pembanguna Pedesaan dan Perkotaan*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006), hal. 46

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 34

- iklas. Anggota masyarakat terlibat dalam proses pembangunan secara sukarela dan atas kemauan sendiri.
3. Partisipasi berkonotasi kepada keterlibatan anggota perorangan dalam proses pengelolaan suatu kegiatan (pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengerahan sumber daya, pengawasan dan penyesuaian).
  4. Kelompok sasaran (*target group*) dari partisipasi adalah rakyat banyak yang merupakan lapisan yang selama ini diabaikan oleh si pembuat kebijakan.<sup>52</sup>

Dari penjabaran diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa partisipasi masyarakat merupakan aktivitas masyarakat sebagai wujud dari kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki hidup mereka. Partisipasi masyarakat merupakan unsur yang penting dalam pembangunan, karena dengan partisipasi masyarakat perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

Perencanaan partisipatif masih merupakan paradigma yang relevan hingga saat ini. Masyarakat sebagai sumberdaya pelaku pembangunan di suatu daerah (pedesaan) harus diberdayakan dalam penyusunan rencana atau program pembangunan, karena merekalah yang mengetahui berbagai persoalan yang mereka hadapi, potensi yang dimiliki, dan kebutuhan kelompok-kelompok dalam masyarakat.

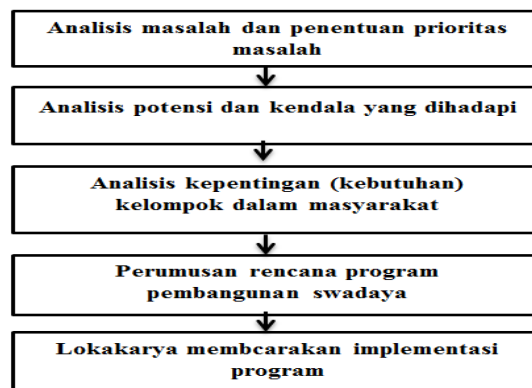
Untuk menyaring program-program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat ditempuh melalui FGD (*Focus Group Discussion*).

Bukan suara terbanyak yang menjadi tolak ukur bahwa program tersebut

---

<sup>52</sup> Bachtiar Hassan Mirza, dkk, *Op.Cit*, hal. 14

paling banyak dibutuhkan. Tahapan-tahapan dalam perencanaan partisipatif adalah dengan menganalisis dan menentukan prioritas masalah terlebih dahulu, kedua menganalisis potensi dan kendala yang dihadapi, analisis kepentingan (kebutuhan) kelompok dalam masyarakat, lalu melakukan perumusan rencana program pembangunan swadaya, dan tahap terakhir melakukan lokakarya untuk membicarakan implementasi program.<sup>53</sup>



Gambar 2.3

#### Tahapan-tahapan perencanaan partisipatif

Selain itu bisa juga digunakan pendekatan pengembangan masyarakat (*community development*) sebagai upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan rasa memiliki tanggungjawab terhadap program pembangunan yang dilaksanakan. Maka pelaksanaan *community development* terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar program

<sup>53</sup> Rahardjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006), hal. 40

yang dilaksanakan dapat berhasil, seperti yang dicantumkan dalam akronim DISCUSS.<sup>54</sup>

D (*Development*) : perumusan program pembangunan didasarkan pada kebutuhan masyarakat lokal yang memiliki tujuan dan sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

I (*Involve*) : perumusan program pembangunan harus melibatkan dan mengikutsertakan seluruh kelompok strategis masyarakat.

S (*Socialize*) : program pembangunan yang telah diidentifikasi dan disusun harus disosialisasikan dan di komunikasikan kepada seluruh anggota masyarakat, sehingga mereka memahami, merasa memiliki dan bertanggungjawab atas program tersebut.

C (*Caster*) : program yang dilaksanakan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

U (*Utilize*) : dalam implementasi program pembangunan diharapkan menggunakan dan memanfaatkan tenaga kerja dan material pembangunan setempat/lokal.

S (*Sensitive*) : program pembangunan harus memperhatikan dan memahami situasi dan aspirasi rakyat baik secara psikologi, sosial maupun budaya lokal.

---

<sup>54</sup>*Ibid*, hal. 13-14

S (*Spatial*) : program pembangunan harus menyadari keragaman potensi dan kondisi daerah.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilandasi oleh beberapa hal:

1. Masyarakat setempat memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi mereka.
2. Masyarakat pada dasarnya memiliki kemampuan menganalisis sebab dan akibat dari berbagai kejadian yang terjadi dalam masyarakat.
3. Masyarakat mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi.
4. Masyarakat mampu memanfaatkan sumberdaya pembangunan (SDA, SDM, dana, teknologi) yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan.
5. Anggota masyarakat dengan upaya meningkatkan kemauan dan kemampuan SDM-nya sehingga dengan berlandaskan pada kepercayaan diri dan keswadayaan yang kuat mampu mengilangkan sebagian besar ketergantungan terhadap pihak luar.<sup>55</sup>

Tujuan akhir dari pembangunan pedesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya secara langsung, dan secara tidak langsung ikut mewujudkan pembangunan daerah dan pemabangunan nasional sebagai tujuan dari pembangunan pedesaan agar desa-desa yang merupakan satuan kecil administrasi pemerintahan dapat mempercepat pertumbuhan tingkat keswadaanya.

Untuk melaksanakan implemetasi program pembangunan pedesaan diperlukan dukungan dan partisipasi masyarakat. Namun, pada realisasinya pemerintah mengalami banyak kendala, tidak hanya dalam

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 36-37

masalah dana tapi juga penolakan dari masyarakat akibat ketidaksesuaian program dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga menimbulkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam program pembangunan di desanya.

Menurut Putnam faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan seseorang atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan pedesaan termasuk dalam membangun infrastruktur pedesaan, adalah berkaitan dengan situasi saling ketergantungan, kepercayaan, dan jaringan organisasi sosial yang memfasilitasi kerjasama untuk manfaat bersama<sup>56</sup>. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur di pengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.<sup>57</sup> Faktor internal berupa peran aparat dan pemimpin desa, kekerabatan, serta jarak lokasi. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi antara lain adalah desain program.

Bentuk dan karakteristik masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat kalangan menengah ke atas dan kalangan menengah ke bawah dalam proses pembangunan infrastruktur akan berbeda-beda. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat setempat. Masyarakat menengah ke atas memiliki kemampuan yang cukup, baik sumber daya, pemahaman,

---

<sup>56</sup> Agustina Ifana Kandenafa, *Op.Cit.*

<sup>57</sup> Hasil Seminar Nasional, *Op.Cit.*, hal. 244-245

serta keuangan yang membuat kelompok masyarakat tersebut dapat lebih mandiri dalam mengatasi masalah khususnya infrastruktur di lingkungannya, sedangkan kalangan masyarakat menengah ke bawah membutuhkan tekanan dari pelaku luar untuk mendorong proses partisipasi dalam komunitas tersebut, hal ini dikarenakan pemahaman dan pengetahuan akan partisipasi masih rendah dan kemampuan yang sangat terbatas.<sup>58</sup>

Kondisi dan karakteristik internal kelompok merupakan salah satu aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam partisipasi masyarakat. Masyarakat dengan karakteristik dan kapasitas internal yang sudah baik serta mandiri tidak perlu mendapat pendampingan ataupun intervensi dari pihak-pihak luar. Sedangkan untuk masyarakat dengan kapasitas internal yang masih terbatas, sangat membutuhkan dorongan dan tekanan dari pihak asing seperti pemerintah, LSM, institusi pendidikan, dan sebagainya.

Oleh sebab itu metode pendampingan harus memperhatikan karakteristik dari masyarakat lingkungan tersebut. Metode pendampingan yang informal dan menarik cenderung dapat diterima masyarakat dengan baik, dibandingkan metode yang lebih formal, metode tersebut membuat

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hal. 184



masyarakat lebih tertarik untuk ikut lebih jauh dalam proses partisipasi, karena tidak membosankan.<sup>59</sup>

Elemen penting yang harus terdapat dalam partisipasi adalah ketertarikan dan hak untuk berpartisipasi.<sup>60</sup> Ketika sudah muncul ketertarikan dan kesadaran masyarakat, maka masyarakat akan menggunakan hak nya dalam proses pembangunan.

Terdapat faktor penghambat yang menjadi ancaman terhadap partisipasi masyarakat, antara lain: (1) sifat malas, apatis, masa bodoh, dan tidak mau melakukan perubahan dan pembaharuan di tingkat anggota masyarakat, (2) aspek-aspek topografis (perbukitan dan jurang), geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya), demografis (jumlah penduduk yang sedikit), dan ekonomi (desa miskin) merupakan penghambat dilaksanakannya partisipasi masyarakat.<sup>61</sup>

## **B. Penelitian Yang Relevan**

Sebelumnya penelitian serupa pernah dilakukan oleh Eddy Djunaidi, Acmad Djumlani, dan Suarta Djaja dalam bentuk jurnal yang diterbitkan pada tahun 2013 dengan judul “Implementasi Pembangunan Jalan Lingkungan Masyarakat dalam Peningkatan Pelayanan Publik pada Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda”

---

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> Rahardjo Adisasmita, *Op.Cit*, hal. 135

Dari hasil penelitian tersebut didapat : (1) implementasi pembangunan jalan lingkungan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya telah dilaksanakan sesuai standar teknis serta tata tertib dalam penyelenggaraan pembangunan yang telah ditentukan oleh pemerintah dan provinsi yaitu dengan mempergunakan dua jenis konstruksi, konstruksi beton dan konstruksi paving block (2) faktor pendukung implementasi pembangunan jalan lingkungan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik dipengaruhi oleh komitmen pemerintah daerah, kewenangan pembangunan jalan lingkungan bagi masyarakat, pembiayaan, sistem kerja yang memadai. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan kriteria konstruksi yang dipergunakan dalam pembangunan jalan lingkungan masyarakat.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama sama meneliti tentang implementasi program pembangunan jalan lingkungan di masyarakat, sedangkan perbedaan dari penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian yang akan diteliti hanya terfokus pada implementasi atau terealisasinya program pembangunan jalan lingkungan dengan baik atau tidak dan apa saja faktor-faktor yang menghambat dan mendukung program tersebut. Sedangkan penelitian sebelumnya lebih terfokus pada aspek operasionalnya atau proses pembangunan jalan lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda sesuai atau tidak dengan desain

pembangunan jalan lingkungan yang mengacu kepada standar teknis serta tata tertib dalam penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah dan provinsi.

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data empiris, fakta dan informasi yang objektif serta dapat dipercaya mengenai implementasi program pembangunan jalan lingkungan di Kampung Muncang RT 002 RW 002 Desa Sindangmulya Kecamatan Cibaruah Kabupaten Bekasi.

#### **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif menurut Strauss dan Corbin adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Prof. Dr. Afrizal metode kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia.<sup>2</sup> Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari

---

<sup>1</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (PT Raja Grafiika Persada, Jakarta, 2016), hal 12

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 13

pada generalisasi.<sup>3</sup> Metode kualitatif digunakan sebagai metode penelitian kali ini karena dianggap cocok dengan tema penelitian yang peneliti pilih.

### **C. Penentuan “Setting”**

#### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Sindangmulya tepatnya di Kampung Muncang RT 002 RW 002 Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

#### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini sudah dilakukan sejak tanggal 6 maret sampai 6 mei tahun 2017.

#### **3. Informan, Key Informan, dan Expert Opinion**

Informan dalam penelitian ini adalah warga Kampung muncang, sedangkan key Informan dari penelitian ini adalah pemerintah desa (kepala desa, sekretaris desa dan pejabat pelaksana program jalan lingkungan), dan Expert Opinion dari penelitian ini adalah salah satu dosen di Universitas Negeri Jakarta.

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Alfabeta: Bandung, 2014),hal.15

## **D. Langkah-Langkah Penelitian**

### **a. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan melalui buku-buku mengenai implementasi program pembangunan jalan desa.

#### 2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan di Kampung Muncang RT 002 RW 002 Desa Sindangmulya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut:

##### 1) Observasi

Observasi adalah metode atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan mengamati individu atau kelompok secara langsung.<sup>4</sup> Observasi dilakukan dengan cara megumpulkan data dengan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku,

---

<sup>4</sup> Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2008), hlm. 93

kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.<sup>5</sup>

Pada saat melakukan pengamatan, peneliti membuat catatan yang dipersingkat, berisi kata-kata inti, frase, dan pokok-pokok pengamatan.

## 2) Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif, menurut Dexter wawancara dalam penelitian kualitatif adalah sebuah percakapan dengan tujuan.<sup>6</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperoleh secara mendalam dan dilakukan terhadap sejumlah informan dan key informan.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh data penunjang penelitian dalam bentuk foto, tulisan, maupun rekaman suara wawancara.

### **b. Teknik Kaliberasi Data**

Penelitian ini menggunakan teknik kaliberasi keabsahan data dengan:

---

<sup>5</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2012), hal. 165

<sup>6</sup> Rulam Ahmadi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2014), hal. 120

### **1. Member Check**

*Member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan dari *member check* adalah untuk mengetahui kesesuaian antara data di lapangan dengan data yang diperoleh dari informan, sehingga data dikatakan valid apabila data yang diperoleh dalam penulisan penelitian sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh informan.

### **2. Audit Trial**

*Audit trial* adalah proses konfirmasi data kepada yang memiliki otoritas lebih tinggi dari sumber pertama di tempat penelitian. Tujuannya adalah agar data yang didapat bisa dipercaya atau tidak.

### **3. Triangulasi**

Triangulasi data adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada. Data yang didapatkan dari hasil observasi dicek kembali dengan data dari hasil wawancara dan juga dari hasil studi dokumenter. Bila hasil yang didapat berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang



bersangkutan atau yang lain, tujuannya adalah untuk memastikan data yang mana yang dianggap benar.

#### **4. *Expert Opinion***

*Expert Opinion* adalah proses konfirmasi kepada ahli yang bertujuan untuk memperkuat data dan temuan yang telah didapatkan dilapangan. Setelah semua data dari observasi, wawancara, dokumentasi telah didapat kemudian telah melewati tahap member check, audit trial, dan triangulasi, maka agar data dari proses penelitian lebih dipercaya atau teruji kredibilitasnya data yang telah kita temukan kita konfirmasi lagi kepada ahlinya.

Peneliti akan melakukan konfirmasi kepada seseorang yang sudah paham dalam hal ini, yaitu satu dosen prodi PPKN Universitas Negeri Jakarta. Tujuannya adalah meminta pendapat mengenai implemetasi program pembangunan jalan agar data yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan lebih kredibel.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Tahap berikutnya dalam penelitian adalah analisis data, yang merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan

cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilah mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **a. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kampung Muncang RT 002 RW 002. Kampung Muncang sendiri merupakan bagian dari desa Sindangmulya kecamatan Cibarusah, kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Kampung Muncang khususnya yang berada di lingkungan RT 002 memiliki jumlah penduduk sebanyak 456 jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga sebanyak 181 KK.

##### **b. Profil Desa**

Perkembangan sejarah desa Sindangmulya dimulai pada tahun 1965 setelah peristiwa G30SPKI, setelah peristiwa tersebut banyak masyarakat dari luar Bekasi yang datang untuk menetap di Desa ini. Pada saat itu letak kantor kepala desa cukup dekat dengan pesantren Al-Baqiyatussholihat yang dipimpin oleh KH. Ma'mun Nawawi, pesantren Al-Baqiyatussholihat adalah salah satu pesantren yang menjadi tonggak kegiatan penyebaran agama Islam di desa tersebut untuk berjuang menegakkan kebenaran. Sesuai dengan kondisi pada waktu itu maka diberikanlah nama Desa Sindangmulya yang berarti secara Etimologi SINDANG adalah Singgah, MULYA adalah Tempat yang Baik.

Desa Sindangmulya memiliki luas wilayah 562,275 Ha dan rata-rata curah hujan 100-120 mm/Hm dengan suhu 30-32 °C. Selain itu letak atau lokasi desa Sindangmulya berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah desa lain, di sebelah utara desa Sindangmulya berbatasan dengan kecamatan Serang Baru, sebelah selatan berbatasan dengan desa Cibarusah Kota/ Desa Sirnajati, sebelah barat berbatasan dengan desa Jaya Mulya, dan sebelah timur berbatasan langsung dengan desa Wibawa Mulya.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Sindangmulya hampir 51% berpendidikan SLTA, 18% SLTP, SD 27% dan setingkat sarjana (S1) sekitar 5%. dengan perkiraan sebagai berikut :

- Penduduk yang berpendidikan SD berjumlah 5.552.375
- Penduduk yang berpendidikan SLTP berjumlah 3.701.583
- Penduduk yang berpendidikan SLTA berjumlah 10.487.819
- Penduduk yang berpendidikan SI berjumlah 1.028.218

Kondisi sosial ekonomi masyarakat desa Sindangmulya mengalami perubahan yang cukup drastis, sosial ekonomi masyarakat Desa Sindangmulya dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat secara otomatis mengubah lahan pertanian menjadi lahan pemukiman secara langsung atau tidak mengubah pula pola hidup serta kerja yang agraris menjadi pola industri. Sehingga berdampak pada dominasi profesi buruh pabrik dan pedagang di banding petani.

Sarana dan prasarana yang berada di desa Sindangmulya cukup memadai mulai dari sekolah sampai tempat ibadah, namun sarana dan prasarana yang masih diupayakan pembangunannya adalah Jalan Lingkungan dan pembangunan Drainase/ saluran air. Desa Sindangmulya memiliki beberapa Kampung sebagai bagian dari wilayah pemerintahannya salah satu adalah Kampung Muncang. Letak Kampung Muncang berbatasan langsung dengan desa Wibawa Mulya mayoritas penduduknya yaitu berprofesi sebagai pedagang dan buruh pabrik.

**c. Visi dan Misi Desa Sindangmulya**

a) Visi

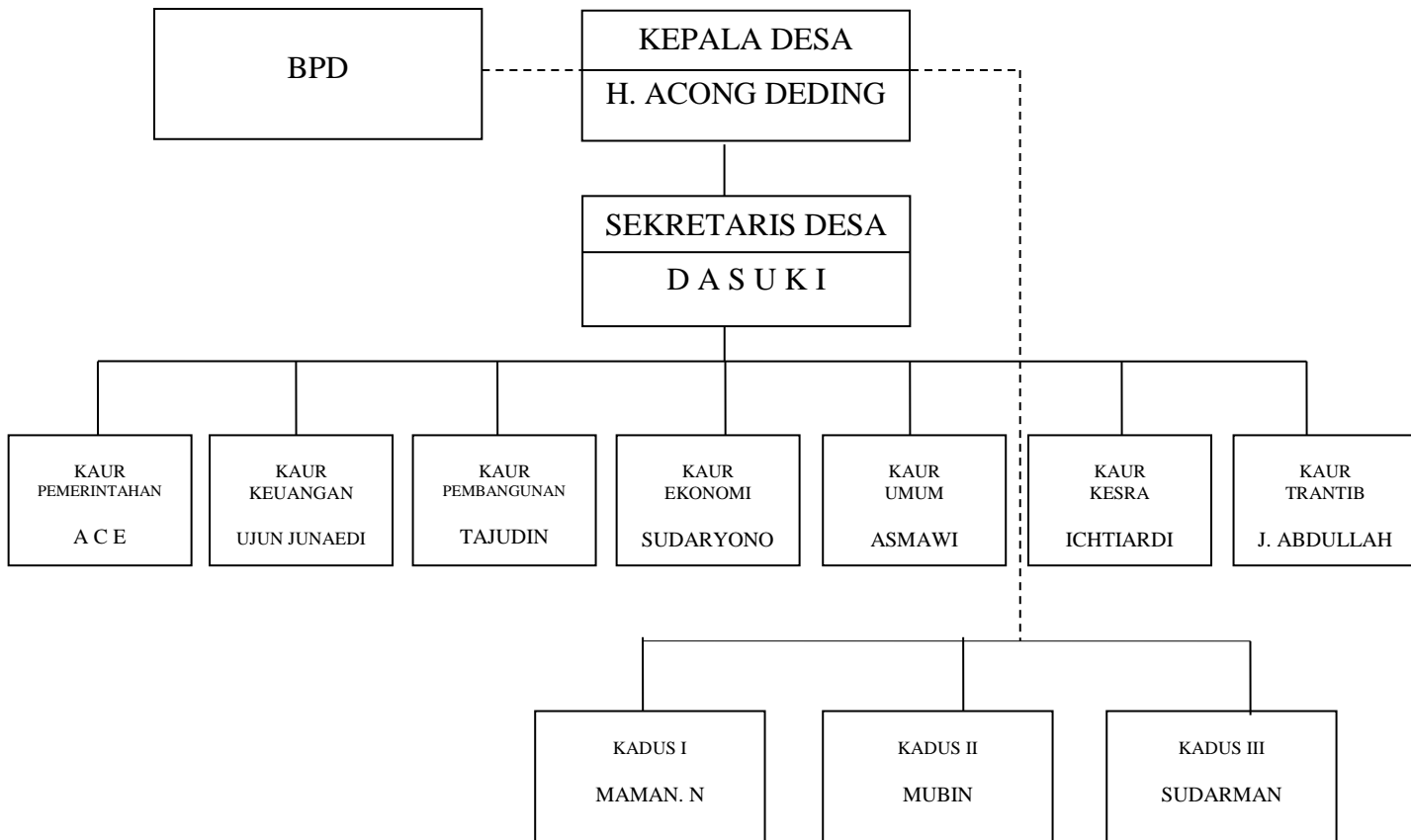
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang di inginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Sindangmulya ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Sindangmulya seperti perangkat dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa Visi Desa Sindangmulya adalah : “Manusia yang berahlak, sehat, berwawasan lingkungan berlandaskan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan”

b) Misi

Setelah penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya Visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi lalu dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Sindangmulya, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Sindangmulya adalah :

1. Manusia yang berakhlak adalah landasan utama manusia untuk membangun
2. Didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.
3. Interaksi manusia tidak hanya dengan manusia lainnya tetapi dengan lingkungan sebagai sumber daya alam yang patut dijaga serta dilestarikan.
4. Dengan segala potensi yang ada, maka haruslah disikapi dengan meningkatkan potensi diri yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada sang pencipta Allah SWT dengan di barengi ilmu pengetahuan demi menyongsong era globalisasi.

#### d. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sindangmulya



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sindangmulya

#### B. Sumber Informasi

Sumber informasi dalam penelitian ini di dapat melalui wawancara dari *Informan* dan *Key Informan*, *informan* dalam penelitian ini adalah masyarakat Kampung Muncang RT 002 RW 002 Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, yang menjadi target sasaran dalam pelaksanaan program pembangunan jalan lingkungan. Sedangkan *Key Informan* dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat (Ketua RT)

dan pemerintah desa (Sekertaris Desa) selaku pelaksana dan penanggungjawab program pembangunan jalan lingkungan.

a. *Data Informan*

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan 6 warga masyarakat Kampung Muncang RT 002 RW 002. Peneliti mengambil 3 orang *informan* dari masyarakat yang jalan lingkungan di daerahnya sudah tersentuh program pembangunan jalan dan 3 orang *informan* dari masyarakat yang jalan lingkungan di daerahnya belum tersentuh sama sekali program pembangunan jalan, sehingga total *informan* sebanyak 6 orang *informan*, hal itu dilakukan agar peneliti dapat melakukan perbandingan hasil data yang diperoleh.

b. *Key Informan*

*Key Informan* yang diwawancarai pada penelitian ini berjumlah 2 orang. Yaitu Sekretaris Desa Sindangmulya dan Ketua RT 002 Kampung Muncang. Wawancara dilakukan untuk melengkapi data yang telah diperoleh serta mengkonfirmasi kebenaran data dari hasil wawancara dengan *informan*.

### C. Temuan Penelitian

a. **Implementasi program pembangunan jalan lingkungan di Kampung Muncang RT 002 RW 002 desa sindangmulya kecamatan cibarusah kabupaten bekasi**

Jalan adalah salah satu sarana paling penting untuk menunjang aktivitas bagi masyarakat, karena dengan dibangunnya



jalan maka akan berdampak pada berbagai aspek sosial seperti ekonomi dan budaya. Pembangunan jalan hingga sampai saat ini masih menjadi program andalan bagi setiap desa dalam upaya memajukan dan mensejahterakan masyarakat di Indonesia tidak terkecuali di desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Komitmen tersebut lalu dituangkan oleh pemerintah selaku si pemegang kekuasaan ke dalam suatu program pembangunan yang diberi nama program pembangunan “Jalan Lingkungan”. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 pasal 8 ayat (5) yang dimaksud jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah. Sedangkan menurut Bapak Dasuki selaku *key informan* dalam penelitian ini menjelaskan bahwa “Jalan lingkungan adalah jalan atau gang yang sifatnya memang ada di Kampung atau di lingkungan dengan luas jalan tidak terlalu besar  $\pm$  3 meter sampai 2 meter lebarnya untuk pejalan kaki, untuk kendaraan roda empat jalan desalah di sebutnya gitu diantaranya”.<sup>1</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa jalan lingkungan merupakan jalan desa yang ada di gang-gang lingkungan masyarakat dengan ukuran  $\pm$  3 sampai 2 meter lebarnya dan dipergunakan untuk jalan umum baik bagi pejalan kaki maupun untuk lalu lalang kendaraan masyarakat dengan kecepatan rata-rata rendah.

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara Key Informan Bapak Dasuki, Jumat 21 April 2017, di kediaman Bapak Dasuki

Pembangunan jalan lingkungan di desa Sindangmulya merupakan hal yang sedang diupayakan pembangunannya oleh pemerintah desa sesuai dengan yang tertuang dalam profil desa sindangmulya.<sup>2</sup> Pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan di desa Sindangmulya sudah berlangsung sejak tahun ± 2004 hingga saat ini.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaannya program pembangunan jalan lingkungan ini memiliki tahapannya tersendiri sampai bisa terimplementasi dengan baik di lingkungan masyarakat, tahapan tersebut dijelaskan secara rinci oleh salah satu *key informan* dari penelitian ini, yaitu Bapak Dasuki selaku sekretaris desa Sindangmulya:

“Pertama masyarakat mengajukan proposal jadi sifatnya gini, kalau soal pembangunan kan ada musrembang (musyawarah pembangunan desa) melalui musrembang desa itu proposal diajukan oleh warga melalui RT/RW ke desa dari desa ke kecamatan dari kecamatan ke kabupaten gitu bertahap, setelah di acc baru di implementasikan. Kadang-kadang di acc kalau emang pembangunannya istilahnya kalau keuangannya kurang mungkin hanya beberapa lokasi saja gak semua, gak semua pembangunan di langsung waktu itu deal enggak seperti itu bertahap sifatnya”<sup>4</sup>.

Sejalan dengan pendapat sekretaris desa, ketua RT 002 juga menjelaskan tahapan-tahapan dari proses pengimplementasian program tersebut sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Profil Desa Sindangmulya

<sup>3</sup> Hasil Wawancara Key Informan Bapak Dasuki, Jumat 21 April 2017, di kediaman Bapak Dasuki

<sup>4</sup> Hasil Wawancara Key Informan Bapak Dasuki, Jumat 21 April 2017, di kediaman Bapak Dasuki

“Kalau pengajuan, biasanya kita ada musrembang dulu baru kita ditanya mana nih tempat-tempat yang mau di cor atau mau diperbaiki seperti gorong-gorong atau apa, mungkin pengajuannya seperti itu awal-awalnya. Yang diikuti sertakan dalam musrembang sendiri tergantung tahapnya kalau tahapan di desa paling RT, RW, tokoh masyarakat, dan ulama. Tapi untuk tahap kecamatan saya kurang tau ya, soalnya untuk tingkat kecamatan saya tidak pernah ikut, karena belum pernah di undang paling yang di undang tuh RW, Sekdes, lurah sama pihak terkaitlah biasanya begitu”<sup>5</sup>.

Jadi, sebenarnya tahapan dari penyelenggaraan program pembangunan jalan lingkungan ini dimulai dari pengajuan proposal oleh masyarakat kepada ketua RT, lalu di sampaikan oleh ketua RT yang bersangkutan untuk di ajukan dan dibahas dalam musyawarah pembangunan desa (Musrembang) lalu akan diajukan lagi pada tingkat yang lebih tinggi (kecamatan dan kabupaten) untuk mengetahui apakah pengajuan proposal tersebut akan di setuju dan diterima oleh pihak pemerintah pusat.

Musyawah pembangunan desa (musrembang) dilakukan untuk mendiskusikan atau memilah-milah program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa mana yang paling penting dan menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat, baik itu dari sektor pendidikan maupun infrastruktur desa untuk diimplementasikan termasuk didalamnya program pembangunan jalan lingkungan. Meskipun masyarakat umum tidak ikut hadir dalam proses musyawarah pembangunan desa (musrembang), namun masyarakat diwakili oleh

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Key Informan Bapak Sarno, Ketua RT 002, Kamis 20 April 2017, di kediaman Bapak Sarno.

tokoh masyarakat yang ada di Kampung tersebut seperti tokoh agama dan Ketua RT setempat. Seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak H. Munir tentang pelibatan masyarakat dalam keputusan untuk pembangunan jalan :

“Pemerintah sudah barang tentu, dan mungkin tokoh masyarakat juga dilibatkan. Masyarakat itu hanya dilibatkan dalam proses penyediaan tanah saja seperti ikut serta dalam proses pengukuran tanah untuk jalan. Caranya pelibatannya juga harus diberi tahu/beri pengetahuan terhadap pembangunan jalan tersebut jangan secara terpaksa. Dengan menyampaikan perkataan dengan lemah lembut maka masyarakat harus dilibatkan dengan kemampuan masing-masing.”<sup>6</sup>

Pelibatan masyarakat Kampung Muncang dalam pembangunan jalan lingkungan hanya sebatas sebagai penyedia tanah dan ikut serta dalam pengawasan program tersebut. Menurutnya untuk dapat mengambil hati masyarakat agar bersedia menyediakan tanahnya supaya dapat dipergunakan dalam program pembangunan jalan lingkungan ini, pemerintah harus mampu memberikan pengetahuan terhadap program tersebut secara baik-baik serta tanpa paksaan kepada masyarakat, hal demikian dilakukan untuk meminimalisir penolakan dari pihak masyarakat terhadap program tersebut. Dalam hal pelibatan masyarakat, pendapat demikian disampaikan pula oleh Bapak Eman: “Masyarakat hanya dilibatkan

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Informan Bapak H. Munir, warga Kampung Muncang RT 002, Jumat 14 April 2017, di kediaman bapak H. Munir

dalam penyediaan tanah dan mengusulkan pengajuan pembangunan jalan”.<sup>7</sup>

Walaupun tidak dlibatkan secara langsung dalam musyawarah pembangunan desa (musrembang) khususnya dalam pembahasan program pembangunan jalan lingkungan, tapi masyarakat memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan akhir boleh atau tidaknya program tersebut dibangun di atas tanah miliknya, pentingnya peran masyarakat disampaikan oleh Bapak Dasuki “Sangat penting, kalau tidak ada persetujuan masyarakat susah. Masyarakat juga bertindak sebagai pengawas pelaksanaan program ini, kalau pembangunan tidak sesuai ketentuan bisa dilaporkan ke pemerintah desa”.<sup>8</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam proses implementasi program pembangunan jalan lingkungan ini.

Program pembangunan akan berjalan lancar apabila didukung oleh banyak faktor, salah satunya adalah ketersediaan sumberdaya (dana, tenaga kerja, dll) dalam proses pembangunan. Sumberdaya adalah salah satu hal paling krusial dalam proses pembangunan infrastruktur desa terkhusus program pembangunan jalan lingkungan, banyak pembangunan yang terkendala implementasinya karena kurangnya sumberdaya baik berupa tenaga

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Informan Bapak Eman, warga Kampung Muncang RT 002, Senin 17 April 2017, di Pos Ronda RT 002

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Key Informan Bapak Dasuki, Jumat 21 April 2017, di kediaman Bapak Dasuki

kerja maupun dana yang digelontorkan oleh pemerintah sebagai pihak penyedia. Sumberdaya yang disediakan dalam proses pembangunan jalan lingkungan di Kampung Muncang tidak memiliki hambatan berarti, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sarno selaku *key informan* pada penelitian kali ini : “Dari masyarakat dan pemerintah sudah maksimal”.<sup>9</sup> Berbeda dengan pendapat Bapak Sarno, ada beberapa kalangan masyarakat yang menduga tertundanya atau yang menjadi faktor penghambat terlaksananya program pembangunan jalan lingkungan di Kampung Muncang RT 002 RW 002 adalah karena terbatasnya sumberdaya dana yang disediakan oleh pemerintah, hal demikian di sampaikan oleh Bapak Rosyid selaku *informan* yang jalan lingkungan di daerahnya belum seluruhnya tercor oleh aspal “Faktor penghambatnya, kalo dari masyarakat gak ada, tapi masalah dari pemerintah karena dananya terbatas sehingga belum terlaksana keseluruhannya”.<sup>10</sup> Pendapat serupa di sampaikan pula oleh Bapak Eman “Biasanya penghambatan dari musrembang juga, entah dari dananya atau apalah padahal kita sudah mengajukan jadi hambatannya dari pemerintah-pemerintah juga sih sebenarnya”.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Key Informan Bapak Sarno, Ketua RT 002, Kamis 20 April 2017, di kediaman Bapak Sarno.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Informan Bapak Rosyid, warga Kampung Muncang RT 002, Rabu 12 April 2017, di kediaman bapak dao.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Informan Bapak Eman, warga Kampung Muncang RT 002, Senin 17 April 2017, di Pos Ronda RT 002

Sumberdaya dana yang digunakan untuk pembangunan jalan lingkungan di desa Sindangmulya sendiri di gelontorkan dari dana Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten, serta dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) seperti yang dijelaskan oleh *key informan* pada kesempatan wawancara pada tanggal 21 April 2017 “Sumber dana pembangunan ini berasal APBD kabupaten, APBD provinsi, baik dari APBN dari pusat. Jadi sumber dananya ada dari tiga itu”.<sup>12</sup>

Selain dengan dukungan sumberdaya yang memadai, sosialisasi yang baik dan benar harus dilakukan oleh pemerintah setempat. Dalam rangka untuk mewujudkan dan mensukseskan program jalan lingkungan (JALING) ini pemerintah melakukan sosialisasi lewat RT setempat. Sosialisasi tersebut dilakukan untuk mengkomunikasikan program pembangunan jalan lingkungan kepada masyarakat selaku target sasaran dari program ini. Seperti pernyataan dari *key informan* Bapak Dasuki:

“Ya ada, namanya kan kita jalan kadang-kadang kan ada jalan yang sifatnya masih milik orang lain tentunya orang tersebut harus dipanggil harus ada kesepakatan antar warga, kalau boleh berarti kan ada sosialisasi dulu bahwa jalan ini akan di cor. Sosialisasinya biasanya dilakukan oleh RT setempat melalui RT setelah itu RT laporan ke desa.”<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Key Informan Bapak Dasuki, Jumat 21 April 2017, di kediaman Bapak Dasuki

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Key Informan Bapak Dasuki, Jumat 21 April 2017, di kediaman Bapak Dasuki

Artinya pemerintah desa melimpahkan sepenuhnya tahap sosialisasi program pembangunan jalan lingkungan ini kepada ketua RT selaku tokoh masyarakat di Kampung tersebut. Banyak cara yang dilakukan oleh ketua RT 002 dalam mensosialisasikan program pembangunan jalan ini “Biasanya kalau saya untuk mensosialisasikan program itu biasa lewat speaker, kedua secara langsung lewat lisan datang ke masyarakat. Tapi belum ada dari pihak pemerintah desa sosialisasi langsung ke masyarakat”.<sup>14</sup>

Kerja keras yang dilakukan ketua RT dalam mensosialisasikan program pembangunan jalan ini membuahkan hasil yang cukup baik terhadap pengetahuan masyarakat setempat tentang program tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Rosyid “Tahu dikit sih, yaitu pengecoran jalan di lingkungan masyarakat”<sup>15</sup>. Hal serupa juga dikemukakan oleh bapak Ajum “Dikit-dikit tahu secara garis besarnya saja, bahwa di desa itu ada dana desa untuk pengecoran jalan gang”<sup>16</sup>.

Sayangnya meskipun warga setempat sudah mengetahui dengan jelas adanya program pembangunan jalan ini, tapi bukan berarti semua paham dan mengerti terhadap prosedur

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara Key Informan Bapak Sarno, Ketua RT 002, Kamis 20 April 2017, di kediaman Bapak Sarno.

<sup>15</sup> Hasil Wawancara Informan Bapak Rosyid, warga Kampung Muncang RT 002, Rabu 12 April 2017, di kediaman bapak dao.

<sup>16</sup> Hasil Wawancara Informan Bapak Ajum, warga Kampung Muncang RT 002, Rabu 12 April 2017, di kediaman bapak dao.



pembangunannya dengan baik, sehingga program ini pun sulit di terapkan di beberapa tempat, hal tersebut didukung data hasil observasi dan wawancara lapangan bahwa belum seluruhnya jalan yang berada di Kampung Muncang RT 002 RW 002 tersentuh pembangunan atau pengecoran sehingga mengganggu pengguna jalan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dari jumlah luas jalan sekitar  $\pm$  900 Meter baru 40% sampai 70% yang baru tersentuh pembangunan, padahal pembangunan jalan lingkungan sudah mulai dilakukan sejak tahun 2004 seperti yang telah diungkapkan oleh kedua *key informan* Bapak Sarno dan Bapak Dasuki bahwa total jumlah jalan yang sudah tersentuh program pengecoran adalah: “Kurang lebih 70%”.<sup>17</sup>

“Baru 40% yang terlaksana, soalnya masih banyak tugas dan PR karena perlu banyak yang diperbaiki seperti jalan yang masuk ke gang-gang yang disinikan baru jalan raya padahal pemerataannya perlu, kalau kita lihat sendiri Kampung kita itu tertinggal, entah karena orang terlalu egois atau bagaimana pokoknya Kampung kita tuh tertinggal gitu, saya suka melihat di daerah orang yang seperti di Kampung kita tuh udah gak ada kaya jalan yang becek kuncinya yang penting warga ngasih lahan untuk dibangun jalan tuh pasti sudah di cor semua.”<sup>18</sup>

Meskipun pendapat dari kedua *key Informan* berbeda, namun mereka sama-sama mengutarakan bahwa program pembangunan tersebut belum sepenuhnya terealisasi dengan sempurna. Perbedaan

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara Key Informan Bapak Dasuki, Jumat 21 April 2017, di kediaman Bapak Dasuki

<sup>18</sup> Hasil Wawancara Key Informan Bapak Sarno, Ketua RT 002, Kamis 20 April 2017, di kediaman Bapak Sarno.

tersebut disebabkan karena Bapak Sarno sendiri adalah ketua RT yang baru bertugas selama 1 Tahun belakangan ini, beliau dipilih oleh masyarakat sebagai ketua RT di Kampung Muncang sejak tahun 2016. Walau baru menjabat selama 1 tahun terakhir ini namun pembangunan infrastruktur di Kampung Muncang banyak mengalami kemajuan, dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, beberapa infratraktur di Kampung Muncang sudah mulai memadai dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, beberapa kemajuan tersebut diantaranya : pembangunan tempat khusus untuk memfasilitasi kegiatan posyandu, penyediaan lampu untuk penerangan jalan, serta tidak lupa perbaikan jalan di lingkungan Kampung Muncang yang mulai digencarkan kembali. Sejak menjabat sebagai ketua RT bapak Sarno telah menyelesaikan pembangunan/pegecoran jalan lingkungan sebanyak 300M.<sup>19</sup>

Meskipun sedang digencarkan, realita yang terjadi di lapangan menimbulkan pertanyaan besar bagaimana mungkin program yang sudah di laksanakan sejak tahun 2004 namun hingga sampai saat ini belum selesai dilaksanakan dengan baik padahal jika dilihat dari skala prioritas kebutuhan desa, jalan merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setempat dan apabila dilihat dari letak geografis dan topologi, Kampung Muncang cenderung mudah dijangkau oleh kendaraan jika program tersebut di implementasikan sehingga tidak

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara ketua RT 002 Bapak Sarno, Kamis 13 Juli 2017

menimbulkan kesulitan yang berarti “Ya strategis jauh enggak dekat enggak, gak terlalu pedalaman banget”.<sup>20</sup> Terlebih letak geografis dan topologis merupakan salah satu faktor yang memang mendukung terlaksananya program ini seperti yang dijelaskan oleh ketua RT 002 Bapak Sarno “Lokasi Kampung Muncang sendiri yang strategis untuk dibangun jalan”.<sup>21</sup> Hal serupa disampaikan oleh Bapak H. Munir : “Tidak sulit. Namun dimasyarakatnya saja yang sulit, meskipun sulit pastikan ada upaya dengan jalan mana terobosan yang mana sehingga terlaksana dengan baik”.<sup>22</sup>

Selain itu apabila pembangunan jalan dilaksanakan, manfaat yang dirasa akan begitu banyak, begitu pengakuan dari salah satu *informan* yang jalan lingkungannya sudah tercor oleh pemerintah : “Ya pasti kalo masalah manfaat ya banyak, jalan tidak becek, meningkatkan harga tanah, aktivitas masyarakat yang menyangkut jalan menjadi enak, aspek ekonomi pun terbantu karena mempercepat mobilitas dari rumah ke tempat tujuan. Mungkin kalo untuk aspek

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara Key Informan Bapak Dasuki, Jumat 21 April 2017, di kediaman Bapak Dasuki

<sup>21</sup> Hasil Wawancara Key Informan Bapak Sarno, Ketua RT 002, Kamis 20 April 2017, di kediaman Bapak Sarno.

<sup>22</sup> Hasil Wawancara Informan Bapak H. Munir, warga Kampung Muncang RT 002, Jumat 14 April 2017, di kediaman bapak H. Munir

ekonomi manfaat jalan raya lebih banyak dibanding jalan lingkungan ini”.<sup>23</sup>

Bukan hanya manfaat saja yang akan didapat namun perubahan yang cukup signifikan juga akan terjadi di lingkungan yang memang jalannya sudah tercor oleh program tersebut hal itu disampaikan juga oleh salah satu *informan* yang kondisinya sudah tercor, yaitu Bapak Dading : “Kita kemana-mana jam berapa aja bangun walaupun hujan walaupun angin gak takut, di kita ini hampir 99% orang punya kendaraan khususnya motor, kalau jalan becek dan licin kan bisa jatuh yang bawa motor sehingga hal tersebut sangat memudahkan”.<sup>24</sup> Hal serupa juga diutarakan oleh *key informan* Bapak Sarno “Banyak, yang itu tadi lebih gampang lebih memudahkan untuk pejalan kaki terus jalan motor akses lebih cepet gitu. Kalau dilihat dari segi ekonomi nantinya akan lebih mudah karena kalau misalnya jalan sudah di cor kita sudah enak jadi lebih cepet, harga tanah pun kalau jalan di cor akan ada kenaikan karena gampang di jangkau”.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara Informan Bapak Eman, warga Kampung Muncang RT 002, Senin 17 April 2017, di Pos Ronda RT 002

<sup>24</sup> Hasil Wawancara Informan Bapak Dading, warga Kampung Muncang RT 002, Rabu 12 April 2017, di kediaman Bapak Dading

<sup>25</sup> Hasil Wawancara Key Informan Bapak Sarno, Ketua RT 002, Kamis 20 April 2017, di kediaman Bapak Sarno.

Walaupun banyak manfaat dan perubahan positif yang terjadi setelah pembangunan jalan lingkungan terlaksana tetap saja bukan berarti program tersebut mudah untuk diimplementasikan. Sulitnya implementasi pembangunan jalan lingkungan diakui oleh pemerintah setempat, tokoh masyarakat, serta masyarakat. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Sarno selaku *key informan* dalam penelitian ini terkait hambatan dari program pembangunan jalan lingkungan ini adalah masyarakat itu sendiri :“Masyarakat yang tidak memberikan izin tanahnya untuk dibangun jalan”.<sup>26</sup> Sama halnya dengan pendapat yang diutarakan oleh ketua RT 002 tentang faktor penghambat pembangunan jalan lingkungan, sekretaris desa pun menyampaikan demikian : “Orang yang tidak setuju”.<sup>27</sup> Meskipun jumlah masyarakat yang menolak tidak sedominan masyarakat yang menerima, namun akan berdampak sekali pada pembangunan atau pengecoran jalan lingkungan, jika dipresentasikan jumlah masyarakat yang menolak pembangunan sejumlah 10% dan yang mendukung ada sejumlah 90%.<sup>28</sup> Selain para pendapat *key informan*, *informan* dalam penelitian ini pun juga ikut memberikan pendapatnya terkait hambatan dari program pembangunan jalan ini:

---

<sup>26</sup> Hasil Wawancara Key Informan Bapak Sarno, Ketua RT 002, Kamis 20 April 2017, di kediaman Bapak Sarno.

<sup>27</sup> Hasil Wawancara Key Informan Bapak Dasuki, Jumat 21 April 2017, di kediaman Bapak Dasuki

<sup>28</sup> Menurut Keterangan Bapak Sarno selaku ketua RT 002, Kamis 20 April 2017, di kediaman Bapak Sarno.

“Faktor pengahambatnya yaitu individu masyarakat itu sendiri, karena menyangkut tanah yang akan dilalui oleh jalan, disini pemerintah juga harus bisa menegaskan bahwa itu bahu untuk selamanya jalan, karena rata-rata tanah di Kampung saya sudah di sertifikat, nah apabila adanya pembangunan, apakah nantinya akan mengurangi di sertifikat tersebut apa memang tidak itulah yang perlu di sosialisasikan kepada masyarakat. Terlebih tidak adanya ganti rugi atas penggunaan jalan untuk pengecoran”<sup>29</sup>.

Pendapat sejalan dikemukakan juga oleh Bapak H. Munir:

“Masalah jalan disamping memang banyak yang menguntungkan tapi di Kampungkan banyak kendala karena kurangnya pemahaman tentang jalan. Lihat di Kampung kita padahal pemerintah sudah cukup baik menyediakan bahan dan lain-lain untuk memfasilitasi. Tapi tidak semua masyarakat seperti itu tidak mengizinkan banyak juga yang setuju, mungkin masyarakat yang tidak mengizinkan masyarakat yang pikirannya terbatas/tidak paham. Padahal jika kita gali dan kita kaji masalah jalan sangat bermanfaat sekali. Kenapa sampai Kampung kita tertinggal itu karena manusia seperti itu daya pikirnya sempit tidak jauh ke depan maka terjadilah seperti itu dari keadaan yang memang bisa dibuktikan kemudian kendalanya seperti itu”<sup>30</sup>.

Ketidakhahaman dan keidakmengertian beberapa anggota masyarakat terhadap program ini ternyata berpengaruh pada keberhasilan maupun kegagalan dari program ini. Sulitnya penerapan program pembangunan jalan lingkungan di beberapa titik area Kampung Muncang RT 002 RW 002 membuat para

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara Informan Bapak Dao, warga Kampung Muncang RT 002, Selasa 11 April 2017, di kediaman bapak dao

<sup>30</sup> Hasil Wawancara Informan Bapak H. Munir, warga Kampung Muncang RT 002, Jumat 14 April 2017, di kediaman bapak H. Munir

*stakeholder* terkait merasa bingung dan putus asa untuk mencari jalan keluarnya, hal itu diutarakan langsung Bapak Dasuki :

“Ya jangan dipaksa kalau emang tanah dia kenapa harus di paksa berarti nanti yang rugi dia sendiri, kalau emang tanah umum siapa yang mau nolak kan itu. Saya sudah pernah membujuk juga cuman gak mempan kenapa harus dipaksa bodo amat, kerasa sendirikan susah karena saya tidak bisa memaksa. Ini juga akan berdampak bagi masyarakat sekitarnya yang setuju terhadap program ini, jadi kerugian bagi kita semua. Makanya kekompakan itu sangat diharapkan kalau masih ada yang menolak gak bisa dipaksa karena ini mah kan sifatnya kerelaan”.<sup>31</sup>

Bapak Sarno pun berpendapat demikian :

“Perlu orang yang bisa meluruskan pemahaman warga, biasanya sih tokoh masyarakat yang bisa mencairkan masalah. Tapi kan suka ada yang bandel ya gimana ya saya mah angkat tangan dan saya hanya bisa menyampaikan. Selain itu perlu pendekatan pertamakan kita ke orangnya langsung, kalau gak bisa baru ke atas gitu ke RW atau pak lurah minta solusi dan saran. Kalau misalnya gak terselesaikan sama pak RT minta tolong ke pak RW kalau enggak juga minta tolong ke kepala desa, mungkin aja ya kalau sama kepala desa mah berhasil. Tapi selama ini pak lurah belum turun langsung ya ke masyarakat untuk membantu meredakan konflik ini. Harapan saya sih pihak pemerintah desa harus lebih melihat lebih menilai dan lebih memantau pembangunan, saya sih pengena pemerintah lebih turun ke bawah lah jangan mentang-mentang ada RT ibaratnya seperti itu, tapi sih saya selagi bisa sendiri saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk kepentingan bersama”.<sup>32</sup>

Dari pernyataan di atas menggambarkan bahwa belum adanya kerja sama yang baik antara tokoh masyarakat dan pihak

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara Key Informan Bapak Dasuki, Jumat 21 April 2017, di kediaman Bapak Dasuki

<sup>32</sup> Hasil Wawancara Key Informan Bapak Sarno, Ketua RT 002, Kamis 20 April 2017, di kediaman Bapak Sarno.

pemerintah desa dalam upaya meredakan konflik yang terjadi di masyarakat setempat. Pendekatan dan komunikasi secara personal serta intens dirasa perlu untuk dilakukan sebagai salah satu upaya paling penting yang harus dilakukan oleh pemerintah desa sebagai pihak implementator dalam proses pembangunan jalan desa ini. Salah pengertian atau ketidakpahaman masyarakat harus diluruskan oleh pemerintah dan tokoh masyarakat dengan memberikan pengetahuan lewat sosialisasi atau penyuluhan yang lebih mendalam lagi terkait program pembangunan jalan lingkungan. Belum adanya sosialisasi dan penyuluhan yang mendalam terkait pembangunan jalan lingkungan ini dikeluhkan oleh salah satu *informan* yaitu Bapak Dao :

“Sebenarnya hanya sebatas dia menyediakan akan dibangun, dan ada komunikasi antar RT cuman sosialisasi yang betul-betul pertanggungjawaban dari pemerintah masih belum ada. Contoh tanah ini memang sudah sertifikat apakah memang sertifikatnya akan berubah nantinya setelah dipakai jalan terus siapa yang akan menanggung sertifikat tersebut untuk perubahannya, atau memang jalan itu termasuk milik masyarakat sendiri dan hitungannya tetap. Nah itu dia kebingungan masyarakat sehingga sampai saat ini masih meragukan masalah jalan. Dan belum adanya sosialisasi, harapan saya juga tolong dibantu daripada pemerintah tersebut bisa memberikan penyuluhan terhadap warganya”.<sup>33</sup>

Meskipun demikian bukan berarti belum ada upaya yang dilakukan oleh para *stakeholder*, upaya yang dilakukan memang sudah ada namun masih belum tegas seperti yang disampaikan oleh

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara Informan Bapak Dao, warga Kampung Muncang RT 002, Selasa 11 April 2017, di kediaman bapak dao



Bapak H. Munir “Upaya sudah ada tapi belum tegas”.<sup>34</sup> Kesulitan serta konflik yang muncul karena program ini, seharusnya mampu diselesaikan oleh pemerintah terkait, karena dalam hal ini pemerintah memiliki wewenang penuh dan tanggungjawab terhadap keberhasilan program pembangunan jalan lingkungan seperti yang diutarakan oleh Bapak H.Munir :

“Harusnya pemerintah lebih tegas itukan program sudah ada jangan sampai kalah dengan hambatan-hambatan yang ada khususnya dari pihak masyarakat. Udah mah rakyat nya seperti itu pemerintahannya juga cuek. Itulah salah satu rintangan untuk pemimpin ketika pemimpin tersebut bisa mengatasi masalah seperti itu berarti pemimpin tersebut memiliki tangan besi, karena bisa memberikan jalan keluar bagi rakyatnya. Pemerintah itu harus keras tapi lunak intinya harus melihat manfaat yang ada/manfaat yang ditimbulkan”.<sup>35</sup>

Jadi dalam usaha serta upaya yang harus dilakukan oleh para *stakeholder* terkait dalam melaksanakan proses pembangunan jalan lingkungan, selain melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara jelas dan mendalam pemerintah juga harusnya memiliki sikap yang tegas apabila memang ada warga yang dirasa akan menghambat setiap program pembangunan.

Sulitnya implementasi pembanguna jalan lingkungan dibeberapa titik menimbulkan anggapan bahwa program tersebut dirasa masih belum dapat memenuhi harapan masyarakat, seperti

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara Informan Bapak H. Munir, warga Kampung Muncang RT 002, Jumat 14 April 2017, di kediaman bapak H. Munir

<sup>35</sup> Hasil Wawancara Informan Bapak H. Munir, warga Kampung Muncang RT 002, Jumat 14 April 2017, di kediaman bapak H. Munir

yang di utarakan bapak Eman : “Kalau harapan sih masih belum, karena masih belum terlaksana seluruhnya”.<sup>36</sup>

Begitupun dengan pendapat Bapak Dading dan Bapak Dao :

“Menurut saya kalau jalan rapih itu sudah memenuhi harapan saya. Itupun kalau sudah rapih semua, kalau seperti ini kan belum semua dan baru sebagian yang baru di cor. Itu sih masih kurang soalnya belum semua, kalau udah semua baru sudah memenuhi harapan kalau masyarakat tuh yang diinginkan seperti itu”<sup>37</sup>.

“Belum, harapan saya terhadap pemerintah tetap dilakukan pengecoran jalan terhadap tempat-tempat yang belum terjamah dengan coran, saya berharap adanya pemerataan pembangunan dan mempermudah masyarakat di lingkungan sekitarnya. Harapan saya di lanjut dan sosialisasi informasinya harus sampai ke masyarakat dari pemerintah ke tempat aparat desa maupun pemerintah kabupaten harus juga memberikan penyuluhan terhadap pengguna jalan di lingkungan masyarakat dan sekitarnya”.<sup>38</sup>

Temuan yang di dapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara maupun observasi menyebutkan benar bahwa program pembangunan jalan lingkungan ini masih belum dapat memenuhi harapan masyarakat sebagai kelompok sasaran, hal demikian disebabkan karena belum meratanya proses pembangunan jalan lingkungan di Kampung tersebut. Selain itu pihak penanggungjawab pembangunan jalan lingkungan pun juga

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara Informan Bapak Eman, warga Kampung Muncang RT 002, Senin 17 April 2017, di Pos Ronda RT 002

<sup>37</sup> Hasil Wawancara Informan Bapak Dading, warga Kampung Muncang RT 002, Rabu 12 April 2017, di kediaman Bapak Dading

<sup>38</sup> Hasil Wawancara Informan Bapak Dao, warga Kampung Muncang RT 002, Selasa 11 April 2017, di kediaman bapak dao

membenarkan hal tersebut “Kalau disebut sesuai mah, karna belum semua ya. Kalau yang sudah berjalan mah sesuai ya”.<sup>39</sup>

Koreksi dan evaluasi sepertinya harus segera dilakukan pemerintah desa dalam upaya mengimplementasikan program ini, jika hal tersebut masih berlanjut dan dibiarkan begitu saja, maka hal tersebut akan mempengaruhi proses pembangunan desa dan akan berdampak negatif bagi kemandirian masyarakat khususnya masyarakat Kampung Muncang RT 002 RW 002 selain mempengaruhi pembangunan hal itu juga akan mempengaruhi berbagai aspek sosial terhadap masyarakat Kampung tersebut, tidak hanya harga tanah yang akan turun namun roda perekonomianpun akan terganggu.

Pemerintah setempat diharapkan mampu mengupayakan program tersebut agar bisa terus berjalan walaupun sebagian kecil masyarakat menolak, meskipun ada beberapa masyarakat yang menolak dan tidak mengizinkan namun bukan berarti program ini tidak didukung oleh masyarakat yang lain, banyak juga masyarakat yang mendukung program ini hal itu menjadi faktor pendukung yang diungkapkan oleh Bapak Dasuki : “Orang yang setuju”.<sup>40</sup> Selain itu kekompakan atau menyamakan tujuan yang

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara Key Informan Bapak Sarno, Ketua RT 002, Kamis 20 April 2017, di kediaman Bapak Sarno.

<sup>40</sup> Hasil Wawancara Key Informan Bapak Dasuki, Jumat 21 April 2017, di kediaman Bapak Dasuki

ingin di capai dari masyarakat juga diperlukan agar program ini tidak menjadi sebuah pro dan kontra serta mudah di implementasikan dalam lingkungan masyarakat “Masyarakat disini harus bersatu harus kompak kita ingin punya jalan “. <sup>41</sup>

Keberadaan pihak yang kontra terhadap program pembangunan ini pun dibenarkan oleh ketua RT 002 “Ada yang mendukung ada yang tidak, tapi dominan sih banyak yang mendukung”, <sup>42</sup> Meski ada yang kontra secara terang-terangan tapi tidak sedikit dukungan yang muncul dari kalangan masyarakat terhadap program pembangunan jalan lingkungan ini yang diperkuat dengan pernyataan *key informan* “Sangat mendukung sekali, dia merasa bangga karena Kampungnya diperbaiki jalannya jadi enak otomatis ya pasti mendukung”. <sup>43</sup> Selain itu dukungan pun banyak disampaikan oleh pihak masyarakat seperti dukungan yang datang dari Bapak Eman “Sudah pasti mendukung, tidak ada istilah menolak karena ini program pemerintah dibiayai oleh pemerintah kalo tidak didukung tidak akan maju”. <sup>44</sup> Begitu juga dengan

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara Informan Bapak Ajum, warga Kampung Muncang RT 002, Rabu 12 April 2017, di kediaman bapak dao.

<sup>42</sup> Hasil Wawancara Key Informan Bapak Sarno, Ketua RT 002, Kamis 20 April 2017, di kediaman Bapak Sarno.

<sup>43</sup> Hasil Wawancara Key Informan Bapak Dasuki, Jumat 21 April 2017, di kediaman Bapak Dasuki

<sup>44</sup> Hasil Wawancara Informan Bapak Eman, warga Kampung Muncang RT 002, Senin 17 April 2017, di Pos Ronda RT 002

dukungan yang datang dari Bapak Ajum “Saya sangat mendukung sekali program ini”.<sup>45</sup>

Dukungan yang muncul memiliki banyak bentuk mulai dari memberikan izin tanahnya secara sukarela untuk di pergunakan dalam pembangunan jalan dan berpartisipasi langsung dalam memantau, merawat, dan memelihara jalan yang sudah dibangun seperti yang diutarakan oleh Bapak Rosyid : “ikut serta, Dalam bentuk beres-beres dan mengawasi serta ikut menyediakan tanah bagi pembangunan jalan”<sup>46</sup> begitu pun yang disampaikan juga oleh Bapak Ajum “ikut berpartisipasi, baik tenaga, pikiran atau ikut mengawasi atau dengan cara lain terutama dengan menyiapkan lahannya”<sup>47</sup> hal itu pun dibenarkan oleh pemerintah desa “Setengah-setengah sih, kadang-kadang ada yang mendukung ada yang tidak, ada yang membantu pake tenaga ada yang hanya mendukung tidak bisa disamakan sih. Tapi kebanyakan membantu terutama dalam pembangunan, membantu pembangunan hanya sekedar memantau, membantu mengukur tanah”.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara Informan Bapak Ajum, warga Kampung Muncang RT 002, Rabu 12 April 2017, di kediaman bapak dao.

<sup>46</sup> Hasil Wawancara Informan Bapak Rosyid, warga Kampung Muncang RT 002, Rabu 12 April 2017, di kediaman bapak dao.

<sup>47</sup> Hasil Wawancara Informan Bapak Ajum, warga Kampung Muncang RT 002, Rabu 12 April 2017, di kediaman bapak dao.

<sup>48</sup> Hasil Wawancara Key Informan Bapak Sarno, Ketua RT 002, Kamis 20 April 2017, di kediaman Bapak Sarno.

Masyarakat yang paham dan mengerti fungsi dan manfaat di banggunya jalan akan bersedia atau mengizinkan dengan sukarela pemerintah untuk melakukan program pembangunan jalan diatas tanah miliknya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Dading : “Ya bersedia selama untuk jalan, karena untuk kepentingan umum. Karena saya ini masih butuh nginjek tanah orang, sama-sama butuh”.<sup>49</sup> Bapak Rosyid pun berpendapat demikian “Bersedia untuk pembangunan jalan, biar kita gak becek dan saya tidak merasa dirugikan sama sekali, justru sangat bermanfaat”.<sup>50</sup>

Sinergitas antar implementator kebijakan ternyata merupakan hal yang masih belum terjalin dengan baik sehingga menjadi kendala dalam proses implementasi Program Pembangunan Jalan Lingkungan di Kampung Muncang RT 002 RW 002 Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dilingkungan sekitar.

#### **D. Pembahasan**

Berdasarkan temuan penelitian yang telah didapat dari hasil wawancara dan observasi terhadap warga Kampung Muncang RT 002 RW

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara Informan Bapak Dading, warga Kampung Muncang RT 002, Rabu 12 April 2017, di kediaman Bapak Dading

<sup>50</sup> Hasil Wawancara Informan Bapak Rosyid, warga Kampung Muncang RT 002, Rabu 12 April 2017, di kediaman bapak dao.

002 Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, berikut adalah pembahasan dari temuan yang dilakukan oleh peneliti:

**a. Implementasi program pembangunan “Jalan Lingkungan” di Kampung Muncang RT 002 RW 002.**

Program pembangunan (pengeroran) jalan lingkungan di Kampung Muncang RT 002 RW 002 mulai dilaksanakan sejak tahun 2004 hingga saat ini.<sup>51</sup> Program tersebut lahir sebagai jawaban dari kebutuhan masyarakat akan perbaikan infrastruktur sebagai penunjang bagi kegiatan sehari-hari untuk setiap individu.

Apabila dihitung dan dikalkulasikan proses implementasi program pembangunan (pengeroran) jalan di Kampung Muncang RT 002 RW 002 sudah berlangsung selama 13 tahun terakhir, namun dalam kenyataan di lapangan program tersebut dianggap masih belum sesuai dengan harapan dan belum berjalan dengan baik. Tidak dipungkiri bagian tersulit dalam tahapan kebijakan publik adalah tahapan implementasi, sulitnya tahapan implementasi suatu kebijakan pun diakui oleh *Expert* lewat pendapatnya, sebagai berikut :

“Tahapan implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan yang paling berat, karena seringkali masalah-masalah muncul pada tahapan implementasi di lapangan dan kadang tidak dijumpai dan diperkirakan dalam konsep atau perumusan kebijakan”.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara Key Informan Bapak Dasuki, Jumat 21 April 2017, di kediaman Bapak Dasuki

<sup>52</sup> Pendapat *Expert Opinion* Bapak Raharjo, S.Pd., M.Si.

Pada tahapan ini sering muncul masalah-masalah yang kadang sebelumnya tidak dapat diprediksi yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, menurut teori yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle, terdapat dua variabel besar yang dapat mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan itu sendiri. Apabila dilihat melalui pendekatan Merilee S. Grindle, isi kebijakan merupakan salah satu variabel paling mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi, program pembangunan (pengeroran) jalan sendiri merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada suatu desa, dan program ini merupakan suatu program yang menghendaki perubahan besar.

Pada dasarnya, tujuan dan manfaat dari program pembangunan jalan ini adalah sebagai pendukung utama dinamika dan aktivitas ekonomi. Kualitas jalan yang baik akan memberikan manfaat dalam penggunaannya, yang meliputi aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan, dan kecepatan tempuh rata-rata.<sup>53</sup> Kondisi tersebut pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi terpadu yang berorientasi pada efisiensi transportasi guna mempercepat pembangunan di segala bidang.

---

<sup>53</sup> Sri Hartini dan Setiajeng Kadarsih, *Jurnal Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Jalan di Kabupaten Banyumas*, (Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Purwokerto, 2011)



Selain itu, dalam hal isi kebijakan yang terdapat dalam Program pembangunan (pengecoran) jalan lingkungan ini sudah sangat mengakomodir kepentingan masyarakat, hal tersebut diakui oleh masyarakat yang dijadikan informan dalam penelitian ini, menurutnya jalan adalah suatu kebutuhan bersama yang sifatnya primer, manfaatnya akan dirasakan tidak hanya oleh segelintir orang saja namun semua kalangan akan merasakannya.<sup>54</sup> Walaupun sudah sangat mengakomodir kepentingan masyarakat, namun kembali lagi, apabila secara teori sudah baik, maka perlu dilihat bagaimana pelaksanaannya.

Sejak berjalannya program ini baik masyarakat maupun pemerintah memiliki pengharapan yang sangat besar untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi di sisi lain terdapat pula perlawanan atau penolakan yang muncul dari masyarakat sebagai target sasaran dari program pembangunan (pengecoran) jalan ini. Meskipun jumlah masyarakat yang menolak program pembangunan (pengecoran) jalan ini tidak lebih banyak dari yang mendukung, namun dampak yang ditimbulkan akan begitu besar terhadap kesuksesan dalam terselenggaranya program ini. Keberadaan pihak yang kontra terhadap program pembangunan ini pun dibenarkan oleh ketua RT 002 yaitu Bapak Sarno, beliau tidak membatah bahwa ada

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara Informan Bapak H. Munir, warga Kampung Muncang RT 002, Jumat 14 April 2017, di kediaman bapak H. Munir

beberapa orang yang jelas secara terang-terangan menolak program pembangunan (pengecoran) jalan ini.<sup>55</sup>

Penolakan itu muncul disebabkan karena kurangnya edukasi yang diberikan oleh *stakeholder* kepada masyarakat selaku target sasaran dalam pembangunan ini, sehingga menimbulkan pemahaman yang bermacam-macam dan melahirkan permasalahan yang menyebabkan konflik antar warga yang berbeda pemahaman terhadap program ini.

Penyuluhan/edukasi program pembangunan (pengecoran) jalan lingkungan di Kampung Muncang RT 002 RW 002 sendiri dilakukan oleh ketua RT selaku agen sosialisasi dari program tersebut, penyuluhan yang dilakukan ketua RT selaku agen sosialisasi menggunakan banyak cara, mulai dari pemberitaan lewat speaker mesjid sampai mengkomunikasikan program tersebut secara langsung dengan tatap muka. Dari temuan tersebut diketahui bahwa proses sosialisasi hanya dilakukan oleh satu pihak saja yaitu ketua RT, sedangkan idealnya sosialisasi harus dilakukan oleh banyak pihak terutama dari pihak pemerintah baik itu pemerintah desa, kecamatan, maupun pemerintah pusat seperti apa yang di ungkapkan oleh Bapak Raharjo :

“Kebijakan publik dapat disosialisasikan oleh banyak pihak yang tentunya memiliki pengetahuan atau kompetensi terhadap hal tersebut. Dalam skala yang lebih

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara Key Informan Bapak Sarno, Ketua RT 002, Kamis 20 April 2017, di kediaman Bapak Sarno.

kecil sosialisasi terhadap program pembangunan atau satu kebijakan publik dapat dilakukan oleh agen-agen sosialisasi seperti oleh aparat desa atau RT/RW. Namun demikian alangkah baiknya jika sosialisasi terhadap suatu program atau kebijakan tidak hanya dilakukan oleh aparat desa (RT/RW) saja, sosialisasi dapat dilakukan oleh kepala desa atau aparat kecamatan, kabupaten/kota atau propinsi bahkan oleh pemerintah pusat yang terkait dengan program atau kebijakan publik tersebut. Sosialisasi juga dapat dilakukan melalui sekolah, kampus, media massa, atau LSM misalnya, sepanjang sosialisasi yang dilakukan tidak saling bertentangan maka diharapkan sosialisasi terhadap suatu program atau kebijakan publik akan berjalan lebih efektif dan efisien”.<sup>56</sup>

Selain itu para *stakeholder* terkait harus memiliki pemahaman yang baik terhadap program tersebut, lalu dapat memberikan edukasi lewat sosialisasi secara mendalam dan terperinci terhadap program ini, hal demikian pun di sampaikan oleh *Expert* dalam penelitian ini yaitu Bapak Raharjo :

“Sosialisasi kebijakan publik kepada semua *stakeholder* merupakan satu hal yang sangat penting bagi tercapainya tujuan dari kebijakan publik tersebut, sosialisasi idealnya dilaksanakan mulai dari perumusan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, sampai pada saat evaluasi dari kebijakan publik tersebut. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan diperoleh satu pemahaman yang baik, utuh dan menyeluruh dari semua *stakeholder* baik sebagai pelaksana maupun masyarakat terhadap satu kebijakan publik tersebut, sehingga pada akhirnya kebijakan publik tersebut dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya kendala-kendala yang berarti. Dan juga dengan sosialisasi terhadap implementasi kebijakan tersebut, diharapkan masyarakat juga akan ikut berpartisipasi aktif terhadap adanya kebijakan tersebut, masyarakat juga akan ikut merasakan dampak positif dari adanya kebijakan publik tersebut. Dan sebaliknya sosialisasi yang kurang baik seringkali menimbulkan banyak persoalan-persoalan, dalam tataran implementasi

---

<sup>56</sup> Pendapat *Expert Opinion* Bapak Raharjo, S.Pd., M.Si.

misalnya kurangnya sosialisasi dapat juga menimbulkan minimnya dukungan dan partisipasi dari masyarakat untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan publik tersebut, bahkan bisa jadi justru menimbulkan suatu penolakan atau penentangan terhadap kebijakan publik yang sudah dirumuskan dan diimplementasikan tersebut.”<sup>57</sup>

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa edukasi lewat sosialisasi/penyuluhan dalam suatu kebijakan publik merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh *stakeholder* terkait dalam upaya untuk mengimplementasikan suatu kebijakan publik termasuk di dalamnya suatu program pemerintah, kurangnya sosialisasi yang dilakukan akan menimbulkan persoalan-persoalan sehingga akan berdampak pada minimnya dukungan masyarakat terhadap program ini bahkan bisa menimbulkan suatu penolakan atau penentangan terhadap kebijakan tersebut.

Selain isi kebijakan Grindle juga berpendapat bahwa lingkungan implementasi juga berpengaruh pada tingkat keberhasilannya karena baik mudahnya kebijakan maupun dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada implementatornya.<sup>58</sup> Sikap implementator dalam usahanya untuk mengimplementasikan program ini sangat penting, dari data hasil temuan yang didapatkan oleh peneliti, bahwa sikap implementator dalam upayanya untuk mengimplementasikan program ini sudah cukup baik, tapi sedikit kurang tegas serta adanya sikap pembiaran

---

<sup>57</sup> Pendapat *Expert Opinion* Bapak Raharjo, S.Pd., M.Si.

<sup>58</sup> Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (CV Pustaka Setia, Bandung, 2014), hal. 256

terhadap masalah-masalah yang muncul akibat program ini, masalah yang muncul seperti penolakan yang datang dari target sasaran, hal demikian dibuktikan dengan sikap pasrahnya *stakeholder* dalam menangani penolakan yang muncul dari masyarakat. Seperti apa yang dikemukakan oleh Bapak Dasuki pada kesempatan wawancara tanggal 21 April 2017 beliau berpendapat bahwa pihak pemerintah desa sudah pernah berupaya untuk membujuk namun respon yang diberikan dari pihak masyarakat tetap menolak dan sulit dipaksakan apabila masyarakat tidak mau program ini untuk dilakukan karena program ini sifanya kerelaan.<sup>59</sup> Apabila hal tersebut terus berjalan, maka dapat dipastikan program pembangunan (pengecoran) jalan lingkungan ini tidak akan pernah selesai sampai kapanpun.

Selain karena kurangnya penyuluhan/edukasi yang dilakukan oleh para *stakeholder* terkait, penolakan yang muncul juga disebabkan karena manfaat yang dirasa lebih kecil dibandingkan apa yang mereka korbankan untuk terselenggaranya program pembangunan (pengecoran) jalan lingkungan ini. Sehingga pemerintah perlu mencari jalan keluar untuk memecahkan permasalahan tersebut, Bapak Raharjo selaku *Expert* dalam penelitian ini berpendapat, bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah perlu bersikap tegas atas setiap keputusan yang ia ambil dan mampu memberikan solusi yang dapat diterima oleh setiap

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara Key Informan Bapak Dasuki, Jumat 21 April 2017, di kediaman Bapak Dasuki

kalangan, menurut saran yang beliau ajukan untuk mengatasi atau meminimalisir penolakan yang datang dari masyarakat, pemerintah perlu memberikan ganti rugi atau kompensasi terhadap tanah warga yang terkena program pembangunan (pengecoran) jalan lingkungan ini :

“Perlu dicarikan jalan keluar yang baik sehingga dapat diminimalisir adanya penolakan terhadap kebijakan tersebut, misalnya disamping perlu disosialisasikan terkait dampak/manfaat positif bagi masyarakat secara luas, maka misalnya perlu juga diberikan semacam ganti untung atau kompensasi terhadap tanah warga yang terdampak kebijakan tersebut, sehingga diharapkan masyarakat yang tanahnya terdampak program tersebut dapat menerimanya dengan baik“.<sup>60</sup>

Dengan demikian, apabila implementasi tentang program pembangunan (pengecoran) jalan lingkungan di Kampung Muncang RT 002 RW 002 belum berjalan dengan lancar dan sesuai harapan, maka kita perlu melihat implementatornya (*stakeholder*). Apakah upaya serta sikap *stakeholder* dalam mengimplementasikan program tersebut sudah baik atau belum. Seperti yang telah dijelaskan oleh Grindle, strategi implementator serta karakteristik implementator menjadi hal yang penting dalam usaha untuk mengimplementasikan suatu kebijakan.

Keberhasilan implementasi program pembangunan (pengecoran) jalan lingkungan di Kampung Muncang RT 002 RW 002 tidak bisa dipungkiri akan dipengaruhi oleh banyak faktor, faktor

---

<sup>60</sup> Pendapat *Expert Opinion* Bapak Raharjo, S.Pd., M.Si.

tersebut peneliti bagi menjadi 2 faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Berikut ini adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program pembangunan jalan lingkungan di Kampung Muncang RT 002 RW 002 sebagai berikut:

#### 1. Faktor pendukung

##### 1) Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan bentuk kemauan atau kesediaan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program-program yang dilaksanakan di daerahnya.<sup>61</sup> Partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu indikator apakah program tersebut didukung masyarakat atau tidak. Teori tersebut didukung pula pendapat ahli (*Expert*) yang mengemukakan bahwa salah satu indikator suatu kebijakan itu dikategorikan berhasil dilaksanakan apabila ada dukungan, partisipasi, dan kepercayaan publik terhadap kebijakan tersebut.<sup>62</sup>

Pada temuan penelitian diatas partisipasi masyarakat atau dukungan yang muncul dari masyarakat Kampung Muncang RT 002 RW 002 memiliki banyak bentuk, menurut salah satu *key informan* Bapak Sarno, beliau menjelaskan bahwa partisipasi yang biasa dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung program ini dalam bentuk

---

<sup>61</sup> Rahrdojo Adisasmita,, *Loc. Cit.*

<sup>62</sup> Pendapat *Expert Opinion* Bapak Rahrdojo, S.Pd., M.Si.

partisipasi secara langsung yaitu ikut serta memantau mengukur tanah serta menyediakan lahan bagi pembangunan. Meskipun dukungan yang muncul tidak dari semua pihak masyarakat, namun dukungan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi program pembangunan ini.

## 2) Letak geografis

Kesulitan implementasi akan dirasakan apabila akses menuju lokasi program kebijakan terpencil dan sulit untuk dijangkau. Letak Kampung Muncang sendiri berada di bunderan dekat ke tiga wilayah karawang, bekasi, bogor sehingga apabila program pembangunan (pengecoran) jalan dilakukan tidak akan menimbulkan permasalahan yang berarti.

## 3) Sumber daya

Menurut teori Grindle variabel dari isi kebijakan salah satunya adalah sumber daya yang dilibatkan, sumber daya yang dilibatkan diartikan sebagai ketersediaan sumberdaya yang menunjang untuk keberhasilan implementasi program pembangunan (pengecoran) jalan tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kegagalan dan kesuksesan suatu program pembangunan pasti akan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumberdaya, baik sumberdaya manusia dan dana. Ketersediaan sumberdaya manusia berupa tenaga tidak menjadi pemasalahan dalam program



pembangunan (pengecoran) ini. Menurut keterangan dari key informan sumberdaya yang disediakan untuk pembangunan (pengecoran) jalan lingkungan ini sudah memadai dan sudah maksimal.<sup>63</sup> Sumberdaya dana pembangunan ini berasal dari APBD kabupaten, APBD provinsi, baik dari APBN dari pusat.

## 1. Faktor penghambat

### 1) Sosialisasi

Sosialisasi program pembangunan jalan merupakan tahapan daripada proses implementasi kebijakan, tahapan sosialisasi merupakan tahapan paling penting dalam suatu implementasi kebijakan publik. Tujuan dilakukannya sosialisasi diharapkan agar masyarakat dapat memperoleh satu pemahaman yang baik, utuh, dan menyeluruh terhadap satu kebijakan tersebut.<sup>64</sup>

Dalam implementasinya di lapangan ternyata terdapat hambatan pada aspek sosialisasi, pada temuan penelitian yang di dapatkan oleh peneliti diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh *stakeholder* terkait masih kurang sehingga menimbulkan suatu respon yang kurang baik dari masyarakat, yaitu adanya sikap penolakan terhadap program kebijakan tersebut. Penolakan tersebut menjadi

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara Key Informan Bapak Dasuki, Jumat 21 April 2017, di kediaman Bapak Dasuki

<sup>64</sup> Pendapat *Expert Opinion* Bapak Raharjo, S.Pd., M.Si.

hambatan yang cukup besar pengaruhnya keberhasilan program tersebut.

Dari hasil observasi dilapangan pun ditemukan pula data bahwa sosialisasi program tersebut dilakukan oleh salah satu pihak saja yaitu ketua RT setempat sebagai agen sosialisasi. Hal itu juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pejabat desa Sindangmulya, beliau mengungkapkan bahwa proses sosialisasi program ini dilakukan oleh ketua RT setempat, setelah dari RT baru dilaporkan kepada pemerintah desa.<sup>65</sup>

Menurut pendapat *Expert* alangkah lebih baiknya sosialisasi harus dilakukan oleh semua pihak tanpa terkecuali dalam proses edukasi masyarakat terhadap program tersebut, bahkan seharusnya sosialisasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh aparat desa saja (RT dan RW), namun dilakukan pula oleh pemerintah desa, kecamatan, bahkan pusat yang terkait dengan program tersebut.<sup>66</sup>

## 2) Sikap *Stakeholder*/implementator

Penolakan yang muncul dari masyarakat mau tak mau mengharuskan pemerintah sebagai pihak implementator mampu untuk mengatasi dan mampu memberi solusi yang

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara Key Informan Bapak Dasuki, Jumat 21 April 2017, di kediaman Bapak Dasuki

<sup>66</sup> Pendapat *Expert Opinion* Bapak Raharjo, S.Pd., M.Si.

dapat mengurai permasalahan yang ditimbulkan dari program ini. Respon implementator terhadap permasalahan yang muncul sungguh sangat diperlukan demi tercapainya tujuan dari program ini.

Dalam kenyataan di lapangan implementator dari program pembangunan (pengecoran) jalan ini sudah berupaya semaksimal mungkin dalam mengatasi masalah yang muncul akibat program tersebut, namun menurut beberapa *informan* upaya yang dilakukan oleh pihak implementator masih belum tegas dan berharap agar pihak implementator dapat memberikan solusi yang mampu menjawab permasalahan atau hambatan yang muncul. Dengan demikian sikap pihak implementator akan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan serta kelanjutan program ini.

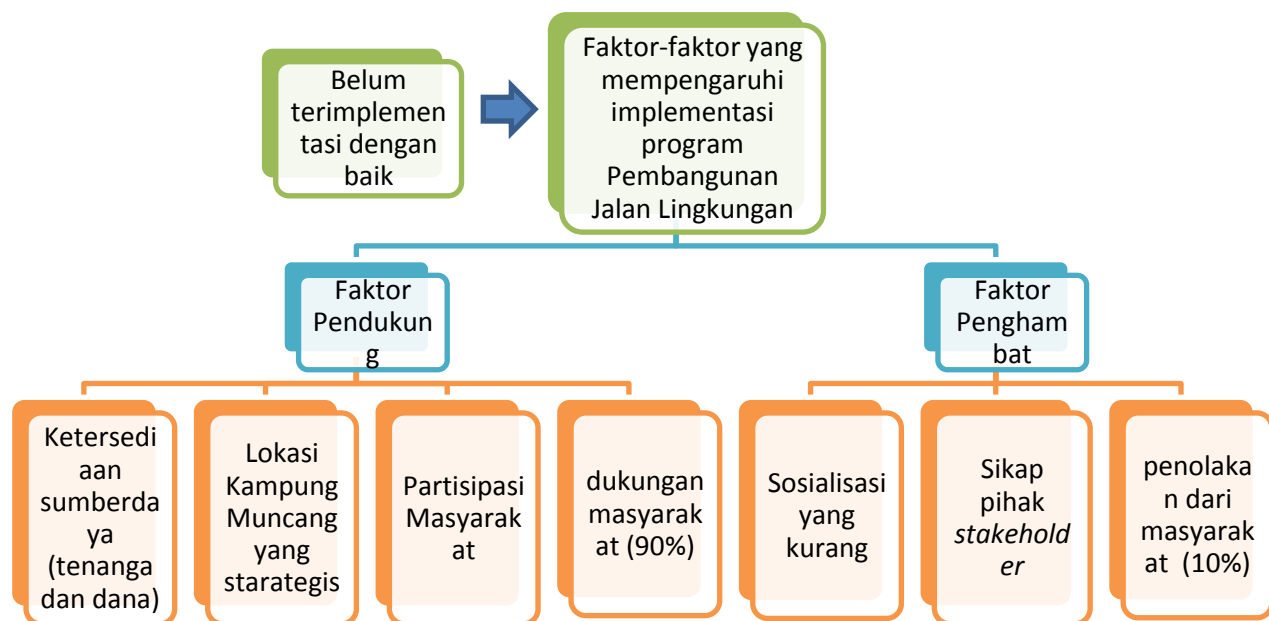
**Tabel 4.1**  
**Tabel Matriks**

<b>No.</b>	<b>Aspek yang diteliti/Pertanyaan Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Bagaimanakah implementasi program pembangunan “Jalan Lingkungan” di	Implementasi program Pembangunan (pengecoran) jalan lingkungan belum terlaksana dengan baik, karena yang terjadi dilapangan masih jauh dari kata

	Kampung Muncang RT 002 RW 002?	berhasil, sehingga program ini dianggap masih belum bisa memenuhi harapan dari target sasaran (masyarakat)
2.	Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi implementasi program pembangunan jalan lingkungan di Kampung Muncang RT 002 RW 002?	<p>Banyak faktor yang mempengaruhi implementasi program pembangunan jalan lingkungan:</p> <p>1. Faktor pendukung</p> <p>Ketersediaan sumberdaya yang menunjang program pembangunan ini, dukungan dari masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam bentuk ikut langsung memantau dalam pengukuran jalan dan ikut menyediakan tanah untuk pembangunan, lokasi Kampung Muncang yang mudah di jangkau,</p> <p>2. Faktor penghambat</p> <p>Kurangnya sosialisasi yang mendalam terhadap program pembangunan jalan lingkungan, kurangnya sinergi antar pihak</p>

		<p><i>stakeholder</i>, sikap pihak implementator yang kurang tegas dalam mengatasi konflik yang muncul akibat program ini berupa penolakan terhadap program ini.</p>
--	--	--

**Gambar 4.2**  
**Bagan Temuan dan Pembahasan**



#### **E. Keterbatasan Penelitian**

Dalam suatu penelitian, pastinya akan ada berbagai hambatan dan keterbatasan dalam prosesnya. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Hambatan bertemu sumber informasi, dalam penelitian ini juga memiliki hambatan dalam hal *informan* karena sulitnya menemukan *informan* yang mau di wawancarai serta sulitnya bertemu *key informan*. Pada awalnya penelitian ini mengambil 3 *key informan* yaitu kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua RT. Namun karenasulitnya bertemu dengan Kepala desa Sindangmulya, pada akhirnya diputuskan untuk mewawancarai dua *key informan* yaitu Bapak Dasuki selaku sekretaris desa dan Bapak Sarno selaku ketua RT 002.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai implementasi program pembangunan Jalan Lingkungan di Kampung Muncang RT 002 RW 002 Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Implementasi Program pembangunan Jalan Lingkungan di Kampung Muncang RT 002 RW 002 Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, yang dilakukan oleh pemerintah belum berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Hal demikian diperkuat dengan temuan hasil wawancara informan dan key informan di lapangan yang menyatakan bahwa program pembangunan jalan lingkungan sejauh ini masih belum memenuhi harapan masyarakat sebagai target sasaran.

Implementasi program pembangunan ini tentu dipengaruhi oleh banyak faktor yang peneliti bagi menjadi 2 (dua) yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat :

- a) Faktor pendukung : ketersediaan sumberdaya yang menunjang program pembangunan ini, dukungan dari masyarakat (90%), partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam bentuk ikut langsung memantau dalam pengukuran jalan dan ikut menyediakan

tanah untuk pembangunan, lokasi Kampung Muncang yang mudah di jangkau,

- b) Faktor penghambat : kurangnya sosialisasi yang mendalam terhadap program pembangunan jalan lingkungan, penolakan yang muncul dari segelintir masyarakat yang akan berpengaruh terhadap penerapan program pembangunan (10%), kurangnya sinergi antar pihak stakeholder, sikap pihak implementator yang kurang tegas dalam mengatasi konflik yang muncul akibat program ini berupa penolakan terhadap program ini.

## **B. Implikasi**

Penting dikehauai bahwa suatu kebijakan akan mudah diterapkan apabila dapat mengakomodir kepentingan target sasaran, namun ada yang lebih penting lagi dalam upaya pengimplementasian suatu program dalam kebijakan publik yaitu melakukan sosialisasi. Sosialisasi kebijakan publik merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena hal tersebut akan menentukan suksesnya suatu proses edukasi dalam mendukung implementasi kebijakan, edukasi yang dilakukan lewat sosialisasi akan berpengaruh bagi pengetahuan masyarakat sehingga dapat meminimalisir penolakan terhadap suatu program.

## **C. Saran**

Berdasarkan simpulan penelitian di atas, maka saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:



- a. Dalam upaya pengimplementasian program pembangunan jalan lingkungan seharusnya pemerintah dapat memberikan sosialisasi serta penyuluhan secara jelas dan detail agar masyarakat mempunyai pemahaman yang baik terhadap program ini. Sehingga masyarakat bisa dengan sukarela menyediakan tanahnya untuk proses pembangunan.
- b. Pemerintah seharusnya bisa bertindak sebagai mediator dalam setiap permasalahan yang dipicu dan muncul dari program pembangunan ini bukan malah menyerah dan membiarkan semuanya. Selain bisa menjadi mediator implementator pun harus dapat memberikan solusi untuk permasalahan yang ada pada masyarakat, solusi yang diberikan juga harus dapat merangkul dan menguntungkan semua belah pihak tanpa terkecuali. Dan selalu bersikap tegas untuk setiap keputusan yang diambil.
- c. Masyarakat setempat harus memiliki visi dan misi yang sejalan untuk kemajuan desanya (kompak). Masyarakat yang solid dan mengerti bagaimana cara bersikap untuk memajukan desanya akan memudahkan setiap program pemerintah untuk bekerja dan dilaksanakan dengan baik di lingkungan desa tempat tinggalnya.
- d. Kontrol sosial dari masyarakat sangat diharapkan, kontrol sosial tersebut berupa pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada dengan menjaga dan merawatnya hal tersebut dilakukan guna terciptanya sikap tanggungjawab bagi setiap masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Adisasmita, Rahardjo. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Adisasmita, Rahadjo. *Pembanguna Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Graфика Persada. 2016.
- Agusta, Ivanovich, dan Fujiartanto. *Indeks Kemandirian Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2014.
- Agustino, Leo. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta. 2008.
- Ahmadi, Rulam. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.
- Anggara, Sahaya. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2014.
- Basrowi & Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. 2007.
- Ghony, M. Djunaidi, dan Fauzan Almanshur. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Hasil Seminar Nasional. *Buku 3 Pembelajaran dan Dampak Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Yogyakarta: 2008.
- Kardiman, yuyus, dan Martini, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Hartomo Media Pustaka. 2013.
- Kunarjo. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2002.
- Mirza, Bachtiar Hassan, dan Wahyu Ario Pratomo, dkk. *Pembangunan Pedesaan: Teori dan Praktek*. Medan: USU Press. 2010.
- Sajogyo, dan Pudjiwati Sajogyo. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 2011.

- Salman, Darmawan. *Sosiologi Desa*. Makasar: Innawa. 2012.
- Soekanto, Soerjono, dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2015.
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Wibawa, Samodra, dan Diah Asitadani, et, all. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Fakultas ISIPOL UGM. 2000.
- Widjaja, HAW. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003.
- Zaki, Reza. *Membangun Desa, Membangun Indonesia*. Surabaya: Pustaka Saga. 2016.

### **Jurnal**

- Hartini, Sri, dan Satiyajeng Kadarsih. *Jurnal Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Jalan di Kabupaten Banyumas*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto. 2011.
- Kandenafa, Agustina Ifana. *Jurnal Ekologi Birokrasi Volume 2 Nomor 1*. Jayapura Papua: Universitas Cendrawasih. 2016.

### **Sumber Internet**

Any.web.id  
Diakses pada Selasa 07 Maret 2017 pukul 13.06

### **Undang-Undang**

- Pembukaan Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan

## LAMPIRAN 01

## KISI-KISI INSTRUMEN

**“IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN  
DI KAMPUNG MUNCANG RT002 RW 002 KECAMATAN SINDANG  
MULYA KABUPATEN BEKASI”**

NO.	Aspek	Indikator	Sub Indikator	Daftar Pertanyaan
1	Implementasi	1. Isi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terakomodasi nya kepentingan kelompok sasaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah program pembangunan jalan lingkungan desa sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi harapan masyarakat di kampung muncang sebagai kelompok sasaran?</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis manfaat yang diperoleh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apa saja manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap program pembangunan jalan lingkungan khususnya dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya?</li> <li>• Apakah benar terdapat manfaat bagi masyarakat dari pembangunan jalan lingkungan?</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan yang diinginkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah perubahan yang terjadi sesuai dengan yang diinginkan?</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kedudukan pengambil keputusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siapa sajakah yang terlibat dalam pembangunan jalan lingkungan?</li> <li>• Apakah masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan seberapa penting kedudukan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan jalan lingkungan?</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksana program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimanakah sikap kelompok sasaran (masyarakat) terhadap program pembangunan?</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber daya yang dilibatkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah sumberdaya yang disediakan dalam mendukung implemetasi program pembangunan jalan lingkungan sudah memadai? Baik dari segi dana, tenaga kerja, sarana, dan lain-lain?</li> </ul>
		2. Lingkungan Implementasi	1. Kekuasaan dan strategi implementor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Bapak/Ibu selaku pemerintah desa untuk mewujudkan atau mengimplementasikan program tersebut sedangkan program tersebut banyak di tolak oleh kelompok sasaran?</li> </ul>
			2. Karakteristik lembaga dan penguasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimanakah menurut pendapat Bapak/Ibu mengenai sikap pemerintah desa dalam mengimplementasikan program pembangunan jalan lingkungan?</li> </ul>
		3. Faktor penghambat dan pendukung implementasi program	1. Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah masyarakat ikut aktif / berpartisipasi dalam pembangunan jalan lingkungan?</li> </ul>
			2. Karakteristik masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimanakanah karakteristik masyarakat kampung muncang?</li> </ul>
			3. Letak geografis dan topologis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimanakan letak geografis dan topologis kampung muncang dalam mendukung pembangunan jalan lingkungan?</li> </ul>

**LAMPIRAN 02****PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN**

Nama Informan :

Umur :

Jenis Kelamin :

Agama :

Pekerjaan :

Tanggal :

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang program pembangunan jalan lingkungan?
2. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu mengenai program pembangunan jalan lingkungan?
3. Apakah program pembangunan jalan lingkungan sudah memenuhi harapan masyarakat sebagai kelompok sasaran?
4. Apa benar terdapat manfaat bagi masyarakat dengan adanya program pembangunan jalan?
5. Manfaat apa saja manfaat yang Bapak/Ibu terima dengan di laksanakannya program pembangunan jalan ini?
6. Apakah perubahan yang terjadi setelah pembangunan jalan dilaksanakan sesuai yang Bapak/Ibu inginkan?
7. Apakah Bapak/Ibu merupakan salah satu pihak yang mendukung terhadap program pembangunan jalan lingkungan? jika iya mengapa?
8. Apakah Bapak/Ibu merupakan salah satu pihak yang kontra terhadap program pembangunan jalan lingkungan? jika iya mengapa?
9. Dalam pembangunan jalan lingkungan, pemerintah desa membutuhkan tanah untuk melaksanakan pembangunanan, apakah Ibu/Bapak ikut membantu pemerintah dalam menyediakan tanah bagi pembangunan dengan memberikan tanahnya?
10. Apa sajakah upaya yang pemerintah desa lakukan dalam implementasi program pembangunan jalan lingkungan?
11. Bagaimanakah menurut pendapat Bapak/Ibu mengenai sikap pemerintah desa dalam mengimplementasikan program pembangunan jalan lingkungan?
12. Apakah Bapak/Ibu ikut berpartisipasi dalam pembangunan jalan lingkungan?
13. Bagaimanakah bentuk partisipasi yang Bapak/Ibu berikan?
14. Apakah masyarakat setempat dilibatkan dalam pembuatan keputusan dalam kebijakan atau kegiatan pembangunan jalan lingkungan? jika iya, bagaimanakah cara pelibatannya?

15. Apakah kondisi jalan di kampung Muncang sesuai kriteria secara geografis dan topologis dalam pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan? akses menuju kesana, struktur tanah dsb?
16. Faktor penghambat implementasi program pembangunan jalan lingkungan?
17. Faktor pendorong implementasi program pembangunan jalan lingkungan?



**LAMPIRAN 03****PEDOMAN WAWANCARA KEY INFORMAN**

Nama Informan :

Umur :

Jenis Kelamin :

Agama :

Pekerjaan :

Tanggal :

1. Apa yang dimaksud program jalan lingkungan?
2. Sejak kapan program jalan lingkungan tersebut mulai dilaksanaka?
3. Sudah berapa persenkah dari total jumlah jalan yang sudah tersentuh program pengecoran?
4. Bagaimanakah proses tahapan pelaksanaan dari program tersebut?
5. Bagaimanakah cara yang dilakukan dalam mensosialisasikan program tersebut?
6. Apakah program pembangunan jalan lingkungan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kampung muncang?
7. Apakah benar terdapat manfaat bagi masyarakat terhadap program pembangunan jalan lingkungan khususnya di kampung muncang?
8. Setelah terlaksananya program ini bagaimanakah perubahan yang terjadi pada kampung muncang? Baik secara ekonomi, sosial, dan budaya.
9. Siapakah saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan jalan lingkungan?
10. Apakah dalam pengambilan keputusan pembangunan jalan lingkungan masyarakat ikut dilibatkan? Mengapa mereka dilibatkan dan bagaimana kedudukan mereka dalam implementasi pembangunan jalan lingkungan?
11. Apakah sumberdaya yang disediakan dalam mendukung implemetasi program pembangunan jalan lingkungan sudah memadai? Baik dari segi dana, tenaga kerja, sarana, dan lain-lain?
12. Darimanakah sumber dana program pembangunan jalan lingkungan?
13. Bagaimanakah sikap kelompok sasaran terhadap program pembangunan tersebut?
14. Apakah program pembangunan ini didukung oleh masyarakat kampung muncang?
15. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Bapak/Ibu selaku pemerintah desa untuk mewujudkan atau mengimplementasikan program tersebut sedangkan program tersebut banyak di tolak oleh kelompok sasaran?
16. Apakah masyarakat setempat ikut berpartisipasi dalam pembangunan jalan lingkungan di kampung muncang?

17. Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan lingkungan?
18. Bagaimanakah karakteristik masyarakat kampung muncang? Termasuk kedalam golongan masyarakat menengah ke atas atau menengah kebawah?
19. Apakah letak kampung muncang memenuhi kriteria secara geografis dan topologis dalam pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan?
20. Apa sajakah faktor-faktor yang menghambat program pembangunan jalan lingkungan?
21. Apa sajakah faktor-faktor yang mendorong program pembangunan jalan lingkungan?

**LAMPIRAN 04****PEDOMAN WAWANCARA EXPERT****Profil Expert**

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

1. Menurut Bapak/Ibu, apa indikator suatu kebijakan publik itu dikategorikan berhasil dilaksanakan?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah tahapan implementasi suatu kebijakan yang baik untuk dilaksanakan?
3. Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting sosialisasi dalam proses implementasi suatu program pembangunan?
4. Dari hasil temuan di lapangan diketahui bahwa sosialisasi program pembangunan ini dilakukan sepenuhnya oleh ketua RT setempat yang sebelumnya sudah diberi pengetahuan oleh pihak pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada pihak masyarakat sebagai bentuk pelimpahan wewenang oleh pemerintah desa, menurut Bapak/Ibu seharusnya sosialisasi yang baik itu seperti apa dan harus dilakukan oleh siapa?
5. Dari hasil temuan penelitian, diketahui bahwa ada beberapa penolakan yang datang dari masyarakat terhadap program tersebut hal itu disebabkan karena program pembangunan jalan lingkungan membutuhkan tanah masyarakat untuk pembangunannya, menurut Ibu/Bapak pemerintah desa harus bersikap seperti apa dan upaya apa saja yang harus dilakukan agar program tersebut dapat tetap dijalankan dengan baik?
6. Dari data yang didapat di lapangan, dapat diketahui bahwa terdapat berbagai masalah atau hambatan (penolakan dari masyarakat dan kurangnya sumberdaya yang disediakan yaitu berupa dana) dalam implemetasi program pembangunan jalan lingkungan ini atau bisa dikatakan implementasi program ini masih jauh dari harapan. Lalu menurut Bapak/Ibu bagaimana seharusnya implementasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam usaha merealisasikan program ini?

**LAMPIRAN 05****HASILWAWANCARA INFORMAN****Nama Informan : Bpk. Dao Sukayat****Umur : 60 Tahun****Jenis Kelamin : Laki - laki****Agama : Islam****Pekerjaan : Wiraswasta****Tanggal : Selasa, 11 April 2017****1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang program pembangunan jalan lingkungan?**

Iya tahu, program pembangunan jalan lingkungan adalah program pemerintah yang sudah di terapkan sejak tahun 2013 sampai saat ini. Seharusnya udah diterapkan dimasyarakat, cuman pada umumnya masyarakat keberatan karena terpakainnya tanah yang bersangkutan karena itu menyangkut tanah individu, sekarang jadi agak terhambat karena ketidakmengertian masyarakat tentang kegunaan masalah jalan tersebut.

**2. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu mengenai program pembangunan jalan lingkungan?**

Baik, karena dengan adanya jalan itu mobilitas dan fasilitas yang lain lebih mudah, cuman seharusnya ada penyuluhan dari pemerintah kepada masyarakat yang tanahnya terpakai untuk jalan. Belum ada penyuluhan atau sosialisasi terhadap pembangunan jalan lingkungan secara khusus baru secara global saja.

**3. Apakah program pembangunan jalan lingkungan sudah memenuhi harapan masyarakat sebagai kelompok sasaran?**

Belum, harapan saya terhadap pemerintah tetap dilakukan pengecoran jalan terhadap tempat-tempat yang belum terjamah dengan coran, saya berharap adanya pemerataan pembangunan dan mempermudah masyarakat di lingkungan sekitarnya. Harapan saya di lanjut dan sosialisasi informasinya harus sampai ke masyarakat dari pemerintah ke tempat aparatur desa maupun pemerintah kabupaten harus juga memberikan penyuluhan terhadap pengguna jalan di lingkungan masyarakat dan sekitarnya.

**4. Apa benar terdapat manfaat bagi masyarakat dengan adanya program pembangunan jalan?**

Benar, banyak sekali manfaatnya

**5. Manfaat apa saja manfaat yang Bapak/Ibu terima dengan di laksanakan program pembangunan jalan ini?**

Pertama, memudahkan untuk kita pemakai jalan (motor) kalau hujan biasanya becek jika adanya pengecoran maka pengguna jalan tidak akan terkena becek. Kedua, harga tanah pun bisa meningkat karena memudahkan mobilitasnya. Ketiga, mempermudah masalah transportasi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Dan dari segi aspek ekonomi akan lebih baik karena jalan yang baik akan memudahkan transportasi sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Sebetulnya dengan adanya jalan memudahkan untuk transportasinya, kesulitan yang akan dialami dengan belum dibangunnya jalan akan menambah biaya pengeluaran yang lebih dan waktu di banding apabila pembangunan jalan sudah terrealisasi. Intinya ekonomi akan kurang baik apabila jalan belum dibangun.

**6. Apakah perubahan yang terjadi setelah pembangunan jalan dilaksanakan sesuai yang Bapak/Ibu inginkan?**

Karena program belum terealisasi jadi dampaknya belum bisa dirasakan

**7. Apakah Bapak/Ibu merupakan salah satu pihak yang mendukung terhadap program pembangunan jalan lingkungan? jika iya mengapa?**

Medukung sekali, karena jalan sangat penting bagi saya secara pribadi untuk transportasi dan umumnya bagi orang banyak. Sangat setuju.

**8. Apakah Bapak/Ibu merupakan salah satu pihak yang kontra terhadap program pembangunan jalan lingkungan? jika iya mengapa?**

Tidak.

**9. Dalam pembangunan jalan lingkungan, pemerintah desa membutuhkan tanah untuk melaksanakan pembangunanan, apakah Ibu/Bapak ikut membantu pemerintah dalam menyediakan tanah bagi pembangunan dengan memberikan tanahnya?**

Sebenarnya kalau buat saya itukan sifatnya relatif makannya disini perlu penyuluhan daripada pemerintah setempat, tanah di tempat kita ini udah termasuknya sertifikat, kalau memang dipakai jalan, apakah sertifikatnya berubah, dikala adanya perubahan sertifikat siapa yang akan menanggung sertifikat tersebut, kalau memang tidak tolong di sosialisasikan kepada masyarakat dari pemerintah biar ada pertanggungjawabannya. Sangat positif terhadap hal tersebut.

**10. Apa sajakah upaya yang pemerintah desa lakukan dalam implementasi program pembangunan jalan lingkungan?**

Sebenarnya hanya sebatas dia menyediakan akan dibangun, dan ada komunikasi antar RT cuman sosialisasi yang betul-betul pertanggungjawaban dari pemerintah masih belum ada. Contoh tanah ini memang sudah sertifikat apakah memang sertifikatnya akan berubah nantinya setelah dipakai jalan terus siapa yang akan menanggung sertikat tersebut untuk perubahannya, atau memang jalan itu termasuk milik masyaraat sendiri dan hitungannya tetap. Nah itu dia kebingungan masyarakat sehingga sampai saat ini masih meragukan masalah jalan. Dan belum adanya sosialisasi, harapan saya juga tolong dibantu daripada pemerintah tersebut bisa memberikan penyuluhan terhadap warganya.

**11. Bagaimanakah menurut pendapat Bapak/Ibu mengenai sikap pemerintah desa dalam mengimplementasikan program pembangunan jalan lingkungan?**

Sebenarnya hanya sebatas pemerintahnya itu kurang tanggap terhadap masalah perubahan nantinya berdampak bagi masyarakat, karena pemerintah hanya sebatas menyediakan fasilitas. Nah masyarakat yang sangat memerlukan seperti yang sudah punya mobil dan sebagainya itu sangat respon sekali, tetapi tetangga yang sebelahnya kadang-kadang tidak, kenapa karena dia merasa dirugikan. Nah kalau memang sudah ada aturan secara tertulis dengan penyuluhan yang baik, mungkin nantinya tidak seperti itu, pasti semua juga kalau memang ada kepastian dan ada aturannya pasti mereka akan mengerti.

**12. Apakah Bapak/Ibu ikut berpartisipasi dalam pembangunan jalan lingkungan?**

Saya sangat positif mendukung, bahkan pohon yang akan dilintasi oleh jalan dan bangunan yang akan dilintasi jalan saya sudah sediakan dengan menebang dan membongkar, karena saya sangat memerlukan jalan meskipun saya belum mempunyai kendaraan roda empat, karena fungsinya jalan itu sangat positif untuk kehidupan dan sosial.

**13. Bagaimanakah bentuk partisipasi yang Bapak/Ibu berikan?**

Dengan menyediakan tanah dan tenaga saya berikan dan sumbangkan untuk pembangunan jalan ini.

**14. Apakah masyarakat setempat dilibatkan dalam pembuatan keputusan dalam kebijakan atau kegiatan pembangunan jalan lingkungan? jika iya, bagaimanakah cara pelibatannya?**

Sebenarnya antara dilibatkan dan tidak dilibatkan, pembangunan ini masyarakat hanya dijadikan target sasaran, jadi sosialisasinya yang belum ada gitu aja, jadi setengah-setengah dalam pelibatannya yang mengerti mungkin memberikan respon dan dianggap sudah terlibat, tapi kalo yang belum mengertikan tidak dilibatkan sehingga mempertahankan prinsipnya, pelibatannya hanya dalam bentuk fisik tanah yang akan di pakai jalan dan keputusannya dari masyarakat setempat yang terkena jalan tersebut, seperti pengukuran jalan. Dan belum ada bentuk musyawarah mufakat antar masyarakat dan pemerintah, saya hanya sebatas tahu informasi bahwa jalan dari sini kesini. Respon positif pemerintah hanya sebatas memberikan informasi dan penyuluhannya kurang, sangat sangat kurang.

**15. Apakah kondisi jalan di kampung Muncang sesuai kriteria secara geografis dan topologis dalam pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan? akses menuju kesana, struktur tanah dsb?**

Sebenarnya untuk kampung muncang ini merupakan suatu tempat transit antara 3 kabupaten bekasi, kerawang, dan bogor. Ini sangat-sangat strategis banget, cuman ketidakmengertian masyarakat begitu karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

**16. Faktor pengahambat implementasi pembangunan jalan ?**

Faktor pengahambatnya yaitu individu masyarakat itu sendiri, karena menyangkut tanah yang akan dilalui oleh jalan, disini pemerintah juga

harus bisa menegaskan bahwa itu bahu untuk selamanya jalan, karena rata-rata tanah di kampung saya sudah di sertifikat, nah apabila adanya pembangunan, apakah nantinya akan mengurangi di sertifikat tersebut apa memang tidak itulah yang perlu di sosialisasikan kepada masyarakat. Terlebih tidak adanya ganti rugi atas penggunaan jalan untuk pengecoran.

**17. Faktor pendorong implementasi pembangunan jalan ?**

Satu-satunya cara agar program tersebut akan berjalan dengan lancar, adalah dengan dilakukan penyuluhan dari pemerintah atau aparat desa maaupun kecamatan atau kabupaten yang terkait dengan adanya pembangunan ini. Karena mungkin adanya ketidakmengertian masyarakat awam di sekitarnya makannya jalan ini terhambat pembangunannya.

### HASIL WAWANCARA INFORMAN

**Nama Informan** : Bpk. Dading  
**Umur** : 54 Tahun  
**Jenis Kelamin** : Laki - laki  
**Agama** : Islam  
**Pekerjaan** : Buruh  
**Tanggal** : Rabu, 12 April 2017

- 1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang program pembangunan jalan lingkungan?**  
 Jalan lingkungan itu, jalan yang masuk ke dalam gang-gang, kalau jalan di gang-gang itu bagus dampaknya ke masyarakat baik.
- 2. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu mengenai program pembangunan jalan lingkungan?**  
 Kalau menurut saya jalan itu gak merugikan malah menguntungkan soalnya segala bidang kalo jalan bagus itu kita gampang, kemana-mana kita enak gak ribet dan gak ganggu dan gak susah. Kalau jalan di cor itu kita kalau kemana-mana walupun hujan kita gak becek dan gak kotor, gak takut jatuh. Kalau gak di cor ga rapih ngeri jatuh, becek, kotor. Terus kalau jalan bagus naik motornya enak kita bawa barang juga enak gak bingung.
- 3. Apakah program pembangunan jalan lingkungan sudah memenuhi harapan masyarakat sebagai kelompok sasaran?**  
 Menurut saya kalau jalan rapih itu sudah memenuhi harapan saya. Itupun kalau sudah rapih semua, kalau seperti ini kan belum semua dan baru sebagian yang baru di cor. Itu sih masih kurang soalnya belum semua, kalau udah semua baru sudah memenuhi harapan kalau masyarakat tuh yang diinginkan seperti itu.
- 4. Apa benar terdapat manfaat bagi masyarakat dengan adanya program pembangunan jalan?**  
 Enak aja.
- 5. Manfaat apa saja manfaat yang Bapak/Ibu terima dengan di laksanakan program pembangunan jalan ini?**  
 Lebih gampang lebih memudahkan. Musim hujan gak takut jatuh kalau jalan bagus apalagi musim kering.
- 6. Apakah perubahan yang terjadi setelah pembangunan jalan dilaksanakan sesuai yang Bapak/Ibu inginkan?**  
 Ada, Kita kemana-mana jam berapa aja bangun walaupun hujan walaupun angin gak takut, di kita ini hampir 99% orang punya kendaraan khususnya motor, kalau jalan becek dan licin kan bisa jatuh yang bawa motor hal tersebut sangat memudahkan.



**7. Apakah Bapak/Ibu merupakan salah satu pihak yang mendukung terhadap program pembangunan jalan lingkungan? jika iya mengapa?**

Pro saya, karena kan kalau jalan bagus kita enak, kemana-mana juga enak bukan hanya menguntungkan diri sendiri tapi menguntungkan semua masyarakat dan saya tidak merasa dirugikan meski tanah saya di ambil. Kalau kita ingin menginjak tanah orang tanah kita juga harus mau di injek sama orang, dan orang itu selama kita hidup pasti nginjak tanah orang lain karena manusia saling membutuhkan. Meskipun beberapa orang kontra menurut saya mereka adalah orang awam, yang kedua mungkin dia punya sayap gak mau nginjak tanah orang, kalau orang hidup itu selama kita bernafas pasti nginjak tanah orang kalau kita mau nginjak tanah orang tanah kita harus mau di injek sama orang.

**8. Apakah Bapak/Ibu merupakan salah satu pihak yang kontra terhadap program pembangunan jalan lingkungan? jika iya mengapa?**

Tidak.

**9. Dalam pembangunan jalan lingkungan, pemerintah desa membutuhkan tanah untuk melaksanakan pembangunanan, apakah Ibu/Bapak ikut membantu pemerintah dalam menyediakan tanah bagi pembangunan dengan memberikan tanahnya?**

Ya bersedia selama untuk jalan, karena untuk kepentingan umum. Karena saya ini masih butuh nginjak tanah orang, sama-sama butuh.

**10. Apa sajakah upaya yang pemerintah desa lakukan dalam implementasi program pembangunan jalan lingkungan?**

Ini kan ada rencana lagi 2 sampe 3 bulan kedepan itu mau di cor lagi, ini kan jalan di samping rumah saya baru sebagian di cor dan belum semua itu kan udah di ukur, bahkan saya bantu ngukur.

**11. Bagaimanakah menurut pendapat Bapak/Ibu mengenai sikap pemerintah desa dalam mengimplementasikan program pembangunan jalan lingkungan?**

Sikapnya bagus, apalagi RT negur dulu sebelum di ukur. Kalo ada apa-apa nanya dulu, ngobrol dulu gak semaunya mentang-mentang punya kekuasaan. Berunding dulu sama masyarakat yang tanahnya akan digunakan untuk coran aspal meskipun belum mengadakan musyawarah yang bener-bener masyarakat kumpul semua cuman kalau ada rencana apa-apa dia pasti ngomong ke masyarakat diomongkan secara dor to dor.

**12. Apakah Bapak/Ibu ikut berpartisipasi dalam pembangunan jalan lingkungan?**

Iya ikut.

**13. Bagaimanakah bentuk partisipasi yang Bapak/Ibu berikan?**

Ikut mendukung dan mensupport program pemerintah tersebut.

**14. Apakah masyarakat setempat dilibatkan dalam pembuatan keputusan dalam kebijakan atau kegiatan pembangunan jalan lingkungan? jika iya, bagaimanakah cara pelibatannya?**

Memang belum ada pelibatan untuk pengambilan keputusan, paling izin tanah setau saya masyarakat disini pasti ngedukung, gak usah musyawarah asal ngomong dor to dor aja tiap rumah pasti di izinkan aja. RT datang ke rumah warga dor to dor udah masyarakat pasti ngasih. Kalau yang saya rasakan warga disini enak setiap pemerintah yang datang ke suatu tempat atau ke warga pasti si masyarakat ngikutin yang terpenting untuk pembangunan jalan.

**15. Apakah kondisi jalan di kampung Muncang sesuai kriteria secara geografis dan topologis dalam pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan? akses menuju kesana, struktur tanah dsb?**

Enak deket, soalnya dari jalan utama deket gak jauh. Kampung muncang termasuk desa semi, gak kampung-kampung banget gak kota juga.

**16. Faktor penghambat implementasi program pembangunan jalan lingkungan?**

Selama ini enggak ada hambatan lancar. Bahkan masyarakatnya mendukung dan membantu, ikut serta, ikut mengamankan, ikut menjaga. Kalau ada yang rese-rese di samperin, kadang-kadang ada aja kan.

**17. Faktor pendorong implementasi program pembangunan jalan lingkungan?**

Masyarakatnya solid, satu suara malahan usulan/pengajuan datang dari masyarakat.

### HASIL WAWANCARA INFORMAN

**Nama Informan** : Bpk. Rosyid  
**Umur** : 42 Tahun  
**Jenis Kelamin** : Laki - laki  
**Agama** : Islam  
**Pekerjaan** : Buruh  
**Tanggal** : Rabu, 12 April 2017

1. **Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang program pembangunan jalan lingkungan?**  
Tahu dikit sih, yaitu pengecoran jalan di lingkungan masyarakat.
2. **Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu mengenai program pembangunan jalan lingkungan?**  
Jalan lingkungan kalau di sekitar rumah saya sih sudah bagus, tinggal sedikit lagi yang belum di cor.
3. **Apakah program pembangunan jalan lingkungan sudah memenuhi harapan masyarakat sebagai kelompok sasaran?**  
Belum, belum memenuhi harapan soalnya belum selesai sepenuhnya. Jika sudah selesai baru bisa dikatakan memenuhi harapan.
4. **Apakah benar terdapat manfaat bagi masyarakat dengan adanya program pembangunan jalan?**  
Iya benar terdapat manfaat.
5. **Manfaat apa saja manfaat yang Bapak/Ibu terima dengan di laksanakannya program pembangunan jalan ini?**  
Jalan menjadi bagus tidak becek alhamdulillah, mudah masuk mobil. Segi ekonomipun terbantu karena jalan bagus sehingga mobil masuk ke depan rumah terus rame.
6. **Apakah perubahan yang terjadi setelah pembangunan jalan dilaksanakan sesuai yang Bapak/Ibu inginkan?**  
Masih belum, masalahnya jalan belum di bangun sampai ujung atau belum selesai sepenuhnya.
7. **Apakah Bapak/Ibu merupakan salah satu pihak yang mendukung terhadap program pembangunan jalan lingkungan? jika iya mengapa?**  
Mendukung, ya soalnya pengen jalan mulus aja disana.
8. **Apakah Bapak/Ibu merupakan salah satu pihak yang kontra terhadap program pembangunan jalan lingkungan? jika iya mengapa?**  
Tidak.
9. **Dalam pembangunan jalan lingkungan, pemerintah desa membutuhkan tanah untuk melaksanakan pembangunan, apakah**

**Ibu/Bapak ikut membantu pemerintah dalam menyediakan tanah bagi pembangunan dengan memberikan tanahnya?**

Bersedia untuk pembangunan jalan, biar kita gak becek dan saya tidak merasa dirugikan sama sekali, justru sangat bermanfaat.

**10. Apa sajakah upaya yang pemerintah desa lakukan dalam implementasi program pembangunan jalan lingkungan?**

Masyarakat yang mencari tahu sendiri dan kebetulan di blok saya tidak ada masalah sama sekali terkait masalah pengecoran jalan, yang penting coran nya jalan udah setuju masyarakat.

**11. Bagaimanakah menurut pendapat Bapak/Ibu mengenai sikap pemerintah desa dalam mengimplementasikan program pembangunan jalan lingkungan?**

Baik, karena dapat merespon pengajuan pengecoran dari masyarakat dengan baik.

**12. Apakah Bapak/Ibu ikut berpartisipasi dalam pembangunan jalan lingkungan?**

Ikut serta.

**13. Bagaimanakah bentuk partisipasi yang Bapak/Ibu berikan?**

Dalam bentuk beres-beres dan mengawasi serta ikut menyediakan tanah bagi pembangunan jalan.

**14. Apakah masyarakat setempat dilibatkan dalam pembuatan keputusan dalam kebijakan atau kegiatan pembangunan jalan lingkungan? jika iya, bagaimanakah cara pelibatannya?**

Iya tentunya, namun kalau di blok saya masyarakat yang aktif dalam bermusyawarah untuk pembangunan jalan, setelah bermusyawarah lalu kami mengajukan ke luruh bukan dari pemerintah.

**15. Apakah kondisi jalan di kampung Muncang sesuai kriteria secara geografis dan topologis dalam pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan? akses menuju kesana, struktur tanah dsb?**

Strategis sih, tapi untuk bentuk jalan yang luas sepertinya tidak memungkinkan.

**16. Faktor penghambat implementasi pembangunan jalan ?**

Faktor penghambatnya, kalo dari masyarakat gak ada, tapi masalah dari pemerintah karena dananya terbatas sehingga belum terlaksana keseluruhannya.

**17. Faktor pendorong implementasi pembangunan jalan ?**

Masyarakat yang mengajukan permohonan pembangunan jalan. Kesadaran masyarakat sendiri.

### HASIL WAWANCARA INFORMAN

**Nama Informan** : Bpk. Ajum  
**Umur** : 48 Tahun  
**Jenis Kelamin** : Laki - laki  
**Agama** : Islam  
**Pekerjaan** : Buruh Swasta  
**Tanggal** : Rabu, 12 April 2017

- 1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang program pembangunan jalan lingkungan?**  
 Dikit-dikit tahu secara garis besarnya saja, bahwa di desa itu ada dana desa untuk pengecoran jalan gang.
- 2. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu mengenai program pembangunan jalan lingkungan?**  
 Sangat baik sekali, sangat besar manfaatnya untuk kelancaran ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pedalaman atau yang jauh dari tempat keramaian.
- 3. Apakah program pembangunan jalan lingkungan sudah memenuhi harapan masyarakat sebagai kelompok sasaran?**  
 Secara 100% belum, karena terutam lingkungan di sini belum terakses dengan program itu. Penyebabnya ya karena ini menyangkut urusan tanah karean sebagian masyarakat ada yang tidak rela tanahnya dipake. Yang disebabkan oleh kurang pahamnya masyarakat terhadap program ini, saya kira pemerintah sudah proaktif ya sudah ada tindakan, kayanya dari perorangan. Sebelumnya juga sudah pada tahu tentang program ini. Tinggal masyarakatnya mau atau tidak.
- 4. Apa benar terdapat manfaat bagi masyarakat dengan adanya program pembangunan jalan?**  
 Manfaatnya sangat besar sekali
- 5. Manfaat apa saja manfaat yang Bapak/Ibu terima dengan di laksanakan program pembangunan jalan ini?**  
 untuk pengguna kendaraan bermotor ketika melintasi jalan tidak becek dimana mana gak kotor salah satunya itulah, misalnya perlu apa apa juga mudah kalau jalan sudah baik, dan akan sangat berdampak bagi urusan ekonomi, misalkan orang yang punya warung yang mau blanja juga bisa cepet, yang orang mau pergi kemana juga kalau jalan bagus waktu yang di tempuh jadi lebih cepat mungkin itu.
- 6. Apakah perubahan yang terjadi setelah pembangunan jalan dilaksanakan sesuai yang Bapak/Ibu inginkan?**  
 Belum ada perubahan, karena jalan dilingkungan saya belum tersentuh oleh program tersebut.

7. **Apakah Bapak/Ibu merupakan salah satu pihak yang mendukung terhadap program pembangunan jalan lingkungan? jika iya mengapa?**  
Saya sangat mendukung sekali program ini.
8. **Apakah Bapak/Ibu merupakan salah satu pihak yang kontra terhadap program pembangunan jalan lingkungan? jika iya mengapa?**  
Saya termasuk pihak yang pro/setuju tentang program ini
9. **Dalam pembangunan jalan lingkungan, pemerintah desa membutuhkan tanah untuk melaksanakan pembangunan, apakah Ibu/Bapak ikut membantu pemerintah dalam menyediakan tanah bagi pembangunan dengan memberikan tanahnya?**  
Sangat bersedia sekali, sangat mendukung sekali karena saya membutuhkan jalan itu.
10. **Apa sajakah upaya yang pemerintah desa lakukan dalam implementasi program pembangunan jalan lingkungan?**  
Sebenarnya udah ada mungkin belum 100% inilah, dalam bentuk pertemuan katanya setuju tapi dalam pelaksanaan jadi enggak, jadi tarik ulur tarik ulurlah faktor utamanya ya individu itu sendiri
11. **Bagaimanakah menurut pendapat Bapak/Ibu mengenai sikap pemerintah desa dalam mengimplementasikan program pembangunan jalan lingkungan?**  
Saya kira sudah cukup, tapi harus lebih giat lagi dan sosialisasinya di gencarkan soalnya ini kebutuhan karena kalau melihat di daerah daerah lain sudah lebih maju dan sudah bagus jalannya
12. **Apakah Bapak/Ibu ikut berpartisipasi dalam pembangunan jalan lingkungan?**  
Ikut berpartisipasi
13. **Bagaimanakah bentuk partisipasi yang Bapak/Ibu berikan?**  
Baik tenaga, pikiran atau ikut mengawasi atau dengan cara lain terutama dengan menyiapkan lahannya.
14. **Apakah masyarakat setempat dilibatkan dalam pembuatan keputusan dalam kebijakan atau kegiatan pembangunan jalan lingkungan? jika iya, bagaimanakah cara pelibatannya?**  
Sebenarnya ada, sudah beberapa kali pertemuan tapi belum terealisasi
15. **Apakah kondisi jalan di kampung Muncang sesuai kriteria secara geografis dan topologis dalam pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan? akses menuju kesana, struktur tanah dsb?**  
Saya kira gampang sebenarnya. Sangat gampang sekali, karena kampung muncang dekat dengan jalan utama, aksesnyapun mudah.
16. **Faktor penghambat implementasi pembangunan jalan ?**  
Penghambatnya ya itu pengadaan lahannya ini, tanahnya ini yang lebih dominan.
17. **Faktor pendorong implementasi pembangunan jalan ?**  
Masyarakat disini harus bersatu harus kompak kita ingin punya jalan



### HASIL WAWANCARA INFORMAN

**Nama Informan** : Bpk. H. Munir

**Umur** : 69 Tahun

**Jenis Kelamin** : Laki - laki

**Agama** : Islam

**Pekerjaan** : Wiraswasta

**Tanggal** : Jumat, 14 April 2017

**1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang program pembangunan jalan lingkungan?**

Masalah jalan disamping memang banyak yang menguntungkan tapi di kampungkan banyak kendala karena kurangnya pemahaman tentang jalan. Lihat di kampung kita padahal pemerintah sudah cukup baik menyediakan bahan dan lain-lain untuk memfasilitasi. Tapi tidak semua masyarakat seperti itu tidak mengizinkan banyak juga yang setuju, mungkin masyarakat yang tidak mengizinkan masyarakat yang pikirannya terbatas/tidak paham. Padahal jika kita gali dan kita kaji masalah jalan sangat bermanfaat sekali. Kenapa sampai kampung kita tertinggal itu karena manusia seperti itu daya pikirnya sempit tidak jauh ke depan maka terjadilah seperti itu dari keadaan yang memang bisa dibuktikan kemudian kendalanya seperti itu.

**2. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu mengenai program pembangunan jalan lingkungan?**

Jalan itu wajib adanya tidak boleh diganggu gugat.

**3. Apakah program pembangunan jalan lingkungan sudah memenuhi harapan masyarakat sebagai kelompok sasaran?**

Belum, karena belum terimplementasi di kampung ini karena daya pikir masyarakat yang sempit.

**4. Apa benar terdapat manfaat bagi masyarakat dengan adanya program pembangunan jalan?**

Iya benar.

**5. Manfaat apa saja manfaat yang Bapak/Ibu terima dengan di laksanakannya program pembangunan jalan ini?**

nah kemanfaatannya kalau memang terjadi pembangunan jalan. Karena hal tersebut kebutuhan bersama itu akan lebih bermanfaat. Tidak hanya satu dua individu tapi semua mahluk hidup pun akan merasa manfaatnya dengan adanya pembangunan jalan ini. Jika memang manusia sudah sampai sana daya pikirnya didalam hatinya itu dia tidak akan merasa rugi dan tidak akan merasa susah tetap merasa beruntung karena sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang memberikan kemanfaatan, rasa enak, dan memberikan rasa senang hati.



6. **Apakah perubahan yang terjadi setelah pembangunan jalan dilaksanakan sesuai yang Bapak/Ibu inginkan?**  
Belum terealisasinya pembangunan jalan lingkungan.
7. **Apakah Bapak/Ibu merupakan salah satu pihak yang mendukung terhadap program pembangunan jalan lingkungan? jika iya mengapa?**  
Justru itu, apa artinya dikatakan orang tua. Saya sangat mendukung.
8. **Apakah Bapak/Ibu merupakan salah satu pihak yang kontra terhadap program pembangunan jalan lingkungan? jika iya mengapa?**  
Tidak.
9. **Dalam pembangunan jalan lingkungan, pemerintah desa membutuhkan tanah untuk melaksanakan pembangunanan, apakah Ibu/Bapak ikut membantu pemerintah dalam menyediakan tanah bagi pembangunan dengan memberikan tanahnya?**  
Kalau ada programnya tentu saja. Karena pembangunan jalan dibangun diatas tanah kalo tidak ada tanahnya ya tidak akan terlaksana.
10. **Apa sajakah upaya yang pemerintah desa lakukan dalam implementasi program pembangunan jalan lingkungan?**  
Upaya sudah ada tapi tapi belum tegas.
11. **Bagaimanakah menurut pendapat Bapak/Ibu mengenai sikap pemerintah desa dalam mengimplementasikan program pembangunan jalan lingkungan?**  
Harusnya pemerintah lebih tegas itukan program sudah ada jangan sampai kalah dengan hambatan-hambatan yang ada khususnya dari pihak masyarakat. Udah mah rakyat nya seperti itu pemerintahannya juga cuek. Itulah salah satu rintangan untuk pemimpin ketika pemimpin tersebut bisa mengatasi masalah seperti itu berarti pemeimpin tersebut memiliki tangan besi, karena bisa memberikan jalan keluar bagi rakyatnya. Pemerintah itu harus keras tapi lunak intinya harus melihat manfaat yang ada/manfaat yang ditimbulkan.
12. **Apakah Bapak/Ibu ikut berpartisipasi dalam pembangunan jalan lingkungan?**  
Ya pasti ikut.
13. **Bagaimanakah bentuk partisipasi yang Bapak/Ibu berikan?**  
Kalau memang ada uangnya bisa memberi bantuan material, kalo tidak ada yang tenaga, kalo tidak ada juga palingan saya memberi doa.
14. **Apakah masyarakat setempat dilibatkan dalam pembuatan keputusan dalam kebijakan atau kegiatan pembangunan jalan lingkungan? jika iya, bagaimanakah cara pelibatannya?**  
Pemerintah sudah barang tentu, dan mungkin tokoh masyarakat juga dilibatkan. Masyarakat itu hanya dilibatkan dalam proses penyediaan tanah saja seperti ikut serta dalam proses pengukuran tanah untuk jalan. Caranya pelibatannya juga harus diberi tahu/beri penegtahuan terhadap pembangunan jalan tersebut jangan secara terpaksa. Dengan

menyampaikan perkataan dengan lemah lembut maka masyarakat harus dilibatkan dengan kemampuan masing-masing.

**15. Apakah kondisi jalan di kampung Muncang sesuai kriteria secara geografis dan topologis dalam pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan? akses menuju kesana, struktur tanah dsb?**

Tidak sulit. Namun dimasyarakatnya saja yang sulit, meskipun sulit pastikan ada upaya dengan jalan mana terobosan yang mana sehingga terlaksana dengan baik.

**16. Faktor penghambat implementasi program pembangunan jalan lingkungan?**

Pemerintah yang kurang tegas dan daya pikir masyarakat setempat yang tidak maju kedepan (terbatas).

**17. Faktor pendorong implementasi program pembangunan jalan lingkungan?**

Dana dari pemerintah sendiri.

## HASIL WAWANCARA INFORMAN

**Nama Informan** : Bpk Eman  
**Umur** : 41 Tahun  
**Jenis Kelamin** : Laki - laki  
**Agama** : Islam  
**Pekerjaan** : Wiraswasta  
**Tanggal** : Senin, 17 April 2017

**1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang program pembangunan jalan lingkungan?**

Iya pasti mengetahui, kan dasarnya itu semua dari musrembang (musyawarah rencana pembangunan desa), terus meningkat ke musyawarah rencana pemangunan di kecamatan baru kemudian ke musyawarah rencana pembangunan daerah mmemang awalnya dari musrembang desa usulan-usulan itu.

**2. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu mengenai program pembangunan jalan lingkungan?**

Ya semua memang bagus, makannya kan masyarakat yang belum tersentuh pembangunan untuk jalan di usulkan lewat musrembang dulu, yang belum terlaksana ya di usulkan. Di musrembang ini bukan hanya jalan saja tapi termasuk saluran air. Sistem pelaksanaannya dari RT diusulkan ke desa, dari desa ke kecamatan dari kecamatan diusulkan ke DPRD. Sehingga masyarakat harus aktif untuk mengusulkan.

**3. Apakah program pembangunan jalan lingkungan sudah memenuhi harapan masyarakat sebagai kelompok sasaran?**

Kalau harapan sih masih belum, karena masih belum terlaksana seluruhnya.

**4. Apa benar terdapat manfaat bagi masyarakat dengan adanya program pembangunan jalan?**

Ya pasti kalo masalah manfaat ya banyak.

**5. Manfaat apa saja manfaat yang Bapak/Ibu terima dengan di laksanakan program pembangunan jalan ini?**

Jalan tidak becek, meningkatkan harga tanah, aktivitas masyarakat yang menyangkut jalan menjadi enak, aspek ekonomipun terbantu karena mempercepat mobilitas dari rumah ke tempat tujuan. Mungkin kalo untuk aspek ekonomi manfaat jalan raya lebih banyak dibanding jalan lingkungan ini.

**6. Apakah perubahan yang terjadi setelah pembangunan jalan dilaksanakan sesuai yang Bapak/Ibu inginkan?**

Ya pasti ada sedikit-sedikit, contoh utama tadinya terhambat jalan yang tadinya becek sekarang jadi lancar, intinya lebih cepatlh.

7. **Apakah Bapak/Ibu merupakan salah satu pihak yang mendukung terhadap program pembangunan jalan lingkungan? jika iya mengapa?**  
Sudah pasti mendukung, tidak ada istilah menolak karena ini program pemerintah dibiayai oleh pemerintah kalo tidak didukung tidak akan maju.
8. **Apakah Bapak/Ibu merupakan salah satu pihak yang kontra terhadap program pembangunan jalan lingkungan? jika iya mengapa?**  
Saya pihak yang setuju.
9. **Dalam pembangunan jalan lingkungan, pemerintah desa membutuhkan tanah untuk melaksanakan pembangunanan, apakah Ibu/Bapak ikut membantu pemerintah dalam menyediakan tanah bagi pembangunan dengan memberikan tanahnya?**  
Kalo saya pribadi bersedia. Karena untuk kepentingan kita juga kepentingan masyarakat, supaya akses jalan kan jadi enak.
10. **Apa sajakah upaya yang pemerintah desa lakukan dalam implementasi program pembangunan jalan lingkungan?**  
Harusnya dari pemerintah tingkat dasarnya RT dengan desa ada upaya untuk mendesak masyarakat agar mensukseskan program ini terutama bagi masyarakat yang tidak setuju. Sampai sekarang saya belum melihat upaya pemerintah desa untuk menjembatani masalah antara masyarakat itu sendiri.
11. **Bagaimanakah menurut pendapat Bapak/Ibu mengenai sikap pemerintah desa dalam mengimplementasikan program pembangunan jalan lingkungan?**  
Harusnya sih di jembantani, namun gimana lagi kalo masyarakat sudah tidak mau ya susah.
12. **Apakah Bapak/Ibu ikut berpartisipasi dalam pembangunan jalan lingkungan?**  
Tidak, saya hanya melakukan kontrol sosial saja, bagaiman implementasi program tersebut berjalan dengan baik.
13. **Bagaimanakah bentuk partisipasi yang Bapak/Ibu berikan?**  
Kontrol sosial saja
14. **Apakah masyarakat setempat dilibatkan dalam pembuatan keputusan dalam kebijakan atau kegiatan pembangunan jalan lingkungan? jika iya, bagaimanakah cara pelibatannya?**  
Masyarakat hanya dilibatkan dalam penyediaan tanah dan mengusulkan pengajuan pembangunan jalan.
15. **Apakah kondisi jalan di kampung Muncang sesuai kriteria secara geografis dan topologis dalam pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan? akses menuju kesana, struktur tanah dsb?**  
Sebenarnya tidak sulit, cuman dari kemarin kemarin masyarakat yang menolak.
16. **Faktor penghambat implementasi program pembangunan jalan lingkungan?**

Biasanya penghambatan dari musrembang juga, entah dari dananya atau apalah padahal kita sudah mengajukan jadi hambatannya dari pemerintah-pemerintah juga sih sebenarnya.

**17. Faktor pendorong implementasi program pembangunan jalan lingkungan?**

Kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

**LAMPIRAN 06****HASIL WAWANCARA KEY INFORMAN**

**Nama Informan** : Bpk. Sarno  
**Umur** : 49 Tahun  
**Jenis Kelamin** : Laki - Laki  
**Agama** : Islam  
**Pekerjaan** : Wiraswasta  
**Tanggal** : Kamis, 20 April 2017

**1. Apa yang dimaksud program jalan lingkungan?**

Jalan lingkungan adalah jalan yang dibangun untuk pemerataan pembangunan dan agar lebih maju kampung kita ini, jika ada pemerataankan jadi lebih adil.

**2. Sejak kapan program jalan lingkungan tersebut mulai dilaksanakan?**

Baru berjalan 2016, karena saya baru menjabat pada tahun 2016.

**3. Sudah berapa persenkah dari total jumlah jalan yang sudah tersentuh program pengecoran?**

Baru 40% yang terlaksana, soalnya masih banyak tugas dan PR karena perlu banyak yang diperbaiki seperti jalan yang masuk ke gang-gang yang disinikan baru jalan raya padahal pemerataankan perlu, kalau kita lihat sendiri kampung kita itu tertinggal, entah karena orang terlalu egois atau bagaimana pokonya kampung kita tuh tertinggal gitu, saya suka melihat di daerah orang yang seperti dikampung kita tuh udah gak ada kaya jalan yang becek kucinya yang penting warga ngasih lahan untuk dibangun jalan tuh pasti sudah di cor semua.

**4. Bagaimanakah proses tahapan pelaksanaan dari program tersebut?**

Kalau pengajuan, biasanya kita ada musrembang dulu baru kita ditanya mana nih tempat-tempat yang mau di cor atau mau diperbaiki seperti gorong-gorong atau apa, mungkin pengajuannya seperti itu awal-awalnya. Yang diikut sertakan dalam musrembang sendiri tergantung tahapnya kalau tahapan di desa paling RT, RW, tokoh masyarakat, ulama. Tapi untuk tahap kecamatan saya kurang tau ya, soalnya untuk tingkat kecamatan saya tidak pernah ikut, karena belum pernah di undang paling yang di undang tuh RW, Sekdes, lurah sama pihak terkaitlah biasanya begitu.

**5. Bagaimanakah cara yang dilakukan dalam mensosialisasikan program tersebut?**

Biasanya kalau saya untuk mensosialisasikan program itu biasa lewat speker, kedua secara langsung lewat lisan datang ke masyarakat. Tapi belum ada dari pihak pemerintah desa sosialisasi langsung ke masyarakat.

**6. Apakah program pembangunan jalan lingkungan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kampung muncang?**

Kalau disebut sesuai mah, karna belum semua ya. Kalau yang sudah berjalan mah sesuai ya.

**7. Apakah benar terdapat manfaat bagi masyarakat terhadap program pembangunan jalan lingkungan khususnya di kampung muncang?**

Banyak sih manfaatnya, pertamanya kita awalnya gak bisa dilewat sama motor sekarang jadi bisa terus biasanyakan anak-anak jalan muter sekarang sudah bisa. Pokonya kalau jalan di cor pokoknya beres dampak pembangunan itu, apalagi kalau sudah di cor sampai ke dalam itu lebih enak.

**8. Setelah terlaksananya program ini bagaimanakah perubahan yang terjadi pada kampung muncang? Baik secara ekonomi, sosial, dan budaya.**

Banyak, yang itu tadi lebih gampang lebih memudahkan untuk pejalan kaki terus jalan motor akses lebih cepet gitu. Kalau dilihat dari segi ekonomi nantinya akan lebih mudah karena kalau misalnya jalan sudah di cor kita sudah enak jadi lebih cepet, harga tanah pun kalau jalan di cor akan ada kenaikan karena gampang di jangkau.

**9. Siapakah saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan jalan lingkungan?**

Biasanya kalau dari tingkat desa yang terlibat itu RT, RW, samalah pokoknya kaya di rapat musrembang. Kalau misalnya hanya ditingkat RT biasanya sosialisasinya sama yang punya lahan boleh tidak di cor, kalau misalkan ga boleh terus gimana harusnya supaya bisa di cor kalau seumpamanya keberatan. Ya kita pasti ada tim nya yang bisa mencairkan masalah gitu diambil dari tokoh masyarakat, kalau misalnya tidak di cairkan gitu kadang-kadang sulit makanya harus ada tim spesial yang mencairkan masalah gitu yang bisa. Karena kan kalau sudah di cor jadi enak bukan hanya bagi dia tapi bagi kepentingan semua karena dia juga kan suka lewat jalan orang kalau sudah rata kan enak jalan jadi rapih kerasalah.

**10. Apakah dalam pengambilan keputusan pembangunan jalan lingkungan masyarakat ikut dilibatkan? Mengapa mereka dilibatkan dan bagaimana kedudukan mereka dalam implementasi pembangunan jalan lingkungan?**

Paling juga dalam hal pemeliharaan, terus mantau-mantau yang membuat jalan gitu. Dilibatkan ya dalam pengambilan keputusan penyedia lahan. Terus kalau sudah di cor tanah tersebut sifatnya jadi jalan umum milik warga dan saya sudah mensosialisasikan.

**11. Apakah sumberdaya yang disediakan dalam mendukung implemetasi program pembangunan jalan lingkungan sudah memadai? Baik dari segi dana, tenaga kerja, sarana, dan lain-lain?**

Dari masyarakat dan pemerintah sudah maksimal.

**12. Darimanakah sumber dana program pembangunan jalan lingkungan?**

Sumber dana pembangunan ini berasal dari pemda.

**13. Bagaimanakah sikap kelompok sasaran terhadap program pembangunan tersebut?**

Bagus sih sekarang mah, banyak yang mendukung.

**14. Apakah program pembangunan ini didukung oleh masyarakat kampung muncang?**

Ada yang mendukung ada yang tidak, tapi dominan sih banyak yang mendukung.

**15. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Bapak/Ibu selaku pemerintah desa untuk mewujudkan atau mengimplementasikan program tersebut sedangkan program tersebut banyak di tolak oleh kelompok sasaran?**

Perlu orang yang bisa meluruskan pemahaman warga, biasanya sih tokoh masyarakat yang bisa mencairkan masalah. Tapi kan suka ada yang bandel ya gimana ya saya mah angkat tangan dan saya hanya bisa menyampaikan. Selain itu perlu pendekatan pertamakan kita ke orangnya langsung, kalau gak bisa baru ke atas gitu ke RW atau pak lurah minta solusi dan saran. Kalau misalnya gak terselesaikan sama pak RT minta tolong ke pak RW kalau enggak juga minta tolong ke kepala desa, mungkin aja ya kalau sama kepala desa mah berhasil. Tapi selama ini pak lurah belum turun langsung ya ke masyarakat untuk membantu meredakan konflik ini. Harapan saya sih pihak pemerintah desa harus lebih melihat lebih menilai dan lebih memantau pembangunan, saya sih pengenya pemerintah lebih turun ke bawah lah jangan mentang-mentang ada RT ibaratnya seperti itu, tapi sih saya selagi bisa sendiri saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk kepentingan bersama.

**16. Apakah masyarakat setempat ikut berpartisipasi dalam pembangunan jalan lingkungan di kampung muncang?**

Setengah-setengah sih, kadang-kadang ada yang mendukung ada yang tidak, ada yang membantu pake tenaga ada yang hanya mendukung tidak bisa disamakan sih. Tapi kebanyakan membantu terutama dalam pembangunan.

**17. Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan lingkungan?**

Membantu pembangunan hanya sekedar memantau, membantu mengukur tanah.

**18. Bagaimanakah karakteristik masyarakat kampung muncang? Termasuk kedalam golongan masyarakat menengah ke atas atau menengah kebawah?**

Dari pendidikan sendiri di RT ini kalau di itung persen tingkat pendidikan 50% berpendidikan.

**19. Apakah letak kampung muncang memenuhi kriteria secara geografis dan topologis dalam pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan?**

Strategis, karena kampung muncang ada di bunderan dekat ke tiga wilayah karawang, bekasi, bogor. Justru masyarakatnya susah diajak maju tergantung kita sih komunikasinya seperti apa.



**20. Apa sajakah faktor-faktor yang menghambat program pembangunan jalan lingkungan?**

Masyarakat yang tidak memberikan izin tanahnya untuk dibangun jalan.

**21. Apa sajakah faktor-faktor yang mendorong program pembangunan jalan lingkungan?**

Lokasi kampung muncang sendiri yang strategis untuk dibangun jalan.

## HASIL WAWANCARA KEY INFORMAN

**Nama Informan** : Bpk. Dasuki  
**Umur** : 50 Tahun  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Agama** : Islam  
**Pekerjaan** : Sekertaris Desa  
**Tanggal** : Jumat, 21 April 2017

**1. Apa yang dimaksud program jalan lingkungan?**

Jalan lingkungan adalah jalan atau gang yang sifatnya memang ada di kampung atau di lingkungan dengan luas jalan tidak terlalu besar  $\pm$  3 Meter samapai 2 meter lebarnya untuk pejalan kaki, untuk kendaraan roda empat jalan desalah di sebutnya gitu diantaranya.

**2. Sejak kapan program jalan lingkungan tersebut mulai dilaksanakan?**

Udah lama atuh jalan lingkungan mah dari tahun 2000 juga sudah ada kurang lebih. Sejak ada desa jalan lingkungan sudah ada cuman dulu kan hanya jalan biasa tidak diperbaiki enggak di cor enggak di kasih pasir dan batu karena dulu kan gak ada pengurusnya hanya masyarakat biasa sekarang kan udah ada bantuan dari pemerintah. Kalau sekarang kan ada bantuan sejak tahun 2000 sudah ada bantuan cuman sifatnya gak cor dan gak aspal sifatnya paling di kasih pasir dengan batu, kalau sekarang kan di cor. Jalan coran sudah ada sejak tahun 2004.

**3. Sudah berapa persenkah dari total jumlah jalan yang sudah tersentuh program pengecoran?**

Kurang lebih 70%

**4. Bagaimanakah proses tahapan pelaksanaan dari program tersebut?**

Pertama masyarakat mengajukan proposal jadi sifatnya gini, kalau soal pembangunankan ada musrembang (musyawarah pembangunan desa) melalui musrembang desa itu proposal diajukan oleh warga melalui RT/RW ke desa dari desa ke kecamatan dari kecamatan ke kabupaten gitu bertahap, setelah di acc baru di implementasikan. Kadang-kadang di acc kalau emang pembangunannya istilahnya kalau keuangannya kurang mungkin hanya beberapa lokasi saja gak semua, gak semua pembangunan di langsung waktu itu deal enggak seperti itu bertahap sifatnya.

**5. Bagaimanakah cara yang dilakukan dalam mensosialisasikan program tersebut?**

Ya ada, namanya kan kita jalan kadang-kadang kan ada jalan yang sifatnya masih milik orang lain tentunya orang tersebut harus dipanggil harus ada kesepakatan antar warga, kalau boleh berarti kan ada sosialisasi dulu bahwa jalan ini akan di cor. Sosialisasinya biasanya dilakukan oleh RT setempat melalui RT setelah itu RT laporan ke desa.

6. **Apakah program pembangunan jalan lingkungan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kampung muncang?**  
Belum semua, karena ada sebagian yang belum.
7. **Apakah benar terdapat manfaat bagi masyarakat terhadap program pembangunan jalan lingkungan khususnya di kampung muncang?**  
Pasti ada, yang tadinya jalan jelek jadi bagus, yang tadinya motor di jalan rumahnya becek jadi enak pasti manfaatnya untuk masyarakat masyarakat juga bahkan masyarakat luar juga bisa merasakan kalau dia lewat jalan sini.
8. **Setelah terlaksananya program ini bagaimanakah perubahan yang terjadi pada kampung muncang? Baik secara ekonomi, sosial, dan budaya.**  
Jadi merasa enak, merasa nyaman gitu aja. Tadinya jalan rusak jadi bagus manfaatnya untuk semua kalangan baik anak kecil maupun untuk orang dewasa.
9. **Siapakah saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan jalan lingkungan?**  
Masyarakat dan pemerintah desa. untuk musrembang sendiri dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW, DPD, dan semua unsurlah ikut ambil wakil-wakilnya misalnya dari kampung muncang siapa RTnya RWnya, nanti RT setempat mengusulkan bahwa di kampung muncang ini yang mau dibangun apa, prioritas utama apa, nah andaikan dia mengusulkan tujuh mungkin yang di acc satu ya itulah karena keterbatasan biaya.
10. **Apakah dalam pengambilan keputusan pembangunan jalan lingkungan masyarakat ikut dilibatkan? Mengapa mereka dilibatkan dan bagaimana kedudukan mereka dalam implementasi pembangunan jalan lingkungan?**  
Sangat penting, kalau tidak ada persetujuan masyarakat susah. Masyarakat juga bertindak sebagai pengawas pelaksanaan program ini, kalau pembangunan tidak sesuai ketentuan bisa dilporokan ke pemerintah desa.
11. **Apakah sumberdaya yang disediakan dalam mendukung implemetasi program pembangunan jalan lingkungan sudah memadai? Baik dari segi dana, tenaga kerja, sarana, dan lain-lain?**  
Sudah memadai, tapikan itu mah dari pihak pemerintah pusat. Intinya pembangunan ini dilaksanakan secara bertahap.
12. **Darimanakah sumber dana program pembangunan jalan lingkungan?**  
Sumber dana pembangunan ini berasal APBD kabupaten, APBD provinsi, baik dari APBN dari pusat. Jadi sumber dananya ada dari tiga itu.
13. **Bagaimanakah sikap kelompok sasaran terhadap program pembangunan tersebut?**  
Sangat mendukung sekali, dia merasa bangga karena kampungnya diperbaiki jalannya jadi enak otomatis ya pasti mendukung.
14. **Apakah program pembangunan ini didukung oleh masyarakat kampung muncang?**

Ya didukung.

- 15. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Bapak/Ibu selaku pemerintah desa untuk mewujudkan atau mengimplementasikan program tersebut sedangkan program tersebut banyak di tolak oleh kelompok sasaran?**

Ya jangan dipaksa kalau emang tanah dia kenapa harus di paksa berarti nanti yang rugi dia sendiri, kalau emang tanah umum siapa yang mau nolak kan itu. Saya sudah pernah membujuk juga cuman gak mempan kenapa harus dipaksa bodo amat, kerasa sendirikan susah karena saya tidak bisa memaksa. Ini juga akan berdampak bagi masyarakat sekitarnya yang setuju terhadap program ini, jadi kerugian bagi kita semua. Makanya kekompakan itu sangat diharapkan kalau masih ada yang menolak gak bisa dipaksa karena ini mah kan sifatnya kerelaan.

- 16. Apakah masyarakat setempat ikut berpartisipasi dalam pembangunan jalan lingkungan di kampung muncang?**

Ikut, ya ikut memantau.

- 17. Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan lingkungan?**

Ikut memantau.

- 18. Bagaimanakah karakteristik masyarakat kampung muncang? Termasuk kedalam golongan masyarakat menengah ke atas atau menengah kebawah?**

Macam-macam masyarakat itu, diantaranya ada 3 kategori yaitu masyarakat yang benar mendukung masyarakat yang memang membutuhkan kan, terus masyarakat yang hanya diem saja dibangun ya silahkan ya enggak juga silahkan, masyarakat yang menolak. Kalau dominan sih masyarakat yang mendukung, kalau yang menolak mah kan hanya segelintir orang saja.

- 19. Apakah letak kampung muncang memenuhi kriteria secara geografis dan topologis dalam pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan?**

Ya strategis jauh enggak dekat enggak, gak terlalu pedaleman banget.

- 20. Apa sajakah faktor-faktor yang menghambat program pembangunan jalan lingkungan?**

Orang yang tidak setuju.

- 21. Apa sajakah faktor-faktor yang mendorong program pembangunan jalan lingkungan?**

Orang yang setuju.

## LAMPIRAN 07

### HASIL WAWANCARA EXPERT

#### Profil Expert

Nama : Raharjo, S.Pd., M.Si.  
 Pekerjaan : Dosen  
 Alamat : UNJ, Jln. Rawamangun Muka, Rawamangun,  
 Jakarta Timur

**1. Menurut Bapak/Ibu, apa indikator suatu kebijakan publik itu dikategorikan berhasil dilaksanakan?**

Suatu kebijakan publik dikategorikan berhasil dilaksanakan dengan baik , antara lain:

- 1) Tujuan yang ingin dicapai atau diharapkan dari suatu kebijakan publik sesuai dengan visi dan misinya tersebut tercapai, yaitu kepentingan publik terpenuhi dengan baik.
- 2) Adanya Kebijakan publik tersebut dapat dirasakan manfaat atau faedahnya oleh masyarakat yang lebih besar dan luas, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 3) Adanya kebijakan publik tersebut tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru, atau menghilangkan atau dapat meminimalisir persoalan-persoalan dalam masyarakat.
- 4) Ada dukungan, partisipasi, dan kepercayaan publik terhadap kebijakan publik tersebut, sehingga implementasi dari suatu kebijakan publik dapat terwujud dengan baik.

**2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah tahapan implementasi suatu kebijakan yang baik untuk dilaksanakan?**

Tahapan implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan yang paling berat, karena seringkali masalah-masalah muncul pada tahapan implementasi di lapangan dan kadang tidak dijumpai dan diperkirakan dalam konsep atau perumusan kebijakan. Sehingga tahapan yang paling awal sebelum tahapan implementasi adalah bagaimana suatu kebijakan dirumuskan dengan baik dengan mempertimbangan persoalan-persoalan yang mungkin muncul di lapangan.

Mengutip pendapat Daniel Mazmanian (1983), tahapan dalam proses implementasi kebijakan ada beberapa tahapan:

- 1) Perlu adanya pemahaman yang baik dari lembaga/ badan pelaksana terhadap kebijakan publik yang telah ditetapkan, yaitu dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana yang baik.
- 2) Kepatuhan atau ketaatan target dari semua pihak atau unsur pelaksana untuk mematuhi output kebijakan yang sudah ditetapkan tersebut.
- 3) Diperolehnya hasil nyata output kebijakan yang dihasilkan dari dilaksanakannya suatu kebijakan publik

- 4) Diterimanya hasil nyata output kebijakan tersebut oleh semua pihak, khususnya masyarakat sebagai penerima langsung maupun tidak langsung dari suatu kebijakan publik tersebut.
- 5) Tahapan yang terakhir adalah revisi atau evaluasi atas kebijakan yang sudah dibuat dan dilaksanakan tersebut.

**3. Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting sosialisasi dalam proses implementasi suatu program pembangunan?**

Sosialisasi kebijakan publik kepada semua stakeholder merupakan satu hal yang sangat penting bagi tercapainya tujuan dari kebijakan publik tersebut, sosialisasi idealnya dilaksanakan mulai dari perumusan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, sampai pada saat evaluasi dari kebijakan publik tersebut. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan diperoleh satu pemahaman yang baik, utuh dan menyeluruh dari semua stakeholder baik sebagai pelaksana maupun masyarakat terhadap satu kebijakan publik tersebut, sehingga pada akhirnya kebijakan publik tersebut dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya kendala-kendala yang berarti. Dan juga dengan sosialisasi terhadap implementasi kebijakan tersebut, diharapkan masyarakat juga akan ikut berpartisipasi aktif terhadap adanya kebijakan tersebut, masyarakat juga akan ikut merasakan dampak positif dari adanya kebijakan publik tersebut. Dan sebaliknya sosialisasi yang kurang baik seringkali menimbulkan banyak persoalan-persoalan, dalam tataran implementasi misalnya kurangnya sosialisasi dapat juga menimbulkan minimnya dukungan dan partisipasi dari masyarakat untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan publik tersebut, bahkan bisa jadi justru menimbulkan suatu penolakan atau penentangan terhadap kebijakan publik yang sudah dirumuskan dan diimplementasikan tersebut.

**4. Dari hasil temuan di lapangan diketahui bahwa sosialisasi program pembangunan ini dilakukan sepenuhnya oleh ketua RT setempat yang sebelumnya sudah diberi pengetahuan oleh pihak pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada pihak masyarakat sebagai bentuk pelimpahan wewenang oleh pemerintah desa, menurut Bapak/Ibu seharusnya sosialisasi yang baik itu seperti apa dan harus dilakukan oleh siapa?**

Sosialisasi secara umum dapat dilakukan melalui dua cara baik secara formal maupun informal, dan tentunya semakin baik jika program-program pembangunan atau suatu kebijakan publik dapat disosialisasikan oleh banyak pihak yang tentunya memiliki pengetahuan atau kompeten terhadap hal tersebut. Dalam skala yang lebih kecil sosialisasi terhadap program pembangunan atau satu kebijakan publik dapat dilakukan oleh agen-agen sosialisasi seperti oleh aparat desa atau RT/RW. Namun demikian alangkah baiknya jika sosialisasi terhadap suatu program atau kebijakan tidak hanya dilakukan oleh aparat desa (RT/RW) saja, sosialisasi dapat dilakukan oleh kepala desa atau aparat kecamatan, kabupaten/kota atau propinsi bahkan oleh pemerintah pusat yang terkait dengan program atau kebijakan publik tersebut. Sosialisasi juga dapat

dilakukan melalui sekolah, kampus, media massa, atau LSM misalnya, sepanjang sosialisasi yang dilakukan tidak saling bertentangan maka diharapkan sosialisasi terhadap suatu program atau kebijakan publik akan berjalan lebih efektif dan efisien.

- 5. Dari hasil temuan penelitian, diketahui bahwa ada beberapa penolakan yang datang dari masyarakat terhadap program tersebut hal itu disebabkan karena program pembangunan jalan lingkungan membutuhkan tanah masyarakat untuk pembangunannya, menurut Ibu/Bapak pemerintah desa harus bersikap seperti apa dan upaya apa saja yang harus dilakukan agar program tersebut dapat tetap dijalankan dengan baik?**

Penolakan terhadap suatu kebijakan publik atau suatu program pembangunan yang dibuat, biasanya karena sosialisasi terhadap masyarakat khususnya yang menerima dampak langsung dari suatu program atau kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik, dan juga karena kebijakan atau program tersebut dianggap justru tidak menimbulkan atau memberikan dampak positif bagi masyarakat yang secara langsung terdampak dari adanya program atau kebijakan tersebut (dalam hal ini misalnya pemilik tanah merasa tidak memperoleh nilai manfaat atau keuntungan, tetapi justru merasa dirugikan oleh adanya program tersebut). Oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluar yang baik sehingga dapat diminimalisir adanya penolakan terhadap kebijakan tersebut, misalnya disamping perlu disosialisasikan terkait dampak/manfaat positif bagi masyarakat secara luas, maka misalnya perlu juga diberikan semacam ganti untung atau kompensasi terhadap tanah warga yang terdampak kebijakan tersebut, sehingga diharapkan masyarakat yang tanahnya terdampak program tersebut dapat menerimanya dengan baik.

- 6. Dari data yang didapat dilapangan, dapat diketahui bahwa terdapat berbagai masalah atau hambatan (penolakan dari masyarakat dan kurangnya sumberdaya yang disediakan yaitu berupa dana) dalam implemetasi program pembangunan jalan lingkungan ini atau bisa dikatakan implementasi program ini masih jauh dari harapan. Lalu menurut Bapak/Ibu bagaimana seharusnya implementasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam usaha merealisasikan program ini?**

Implementasi suatu kebijakan publik tidak dapat berjalan dengan baik tanpa suatu rumusan atau perencanaan kebijakan yang baik. Perumusan yang baik tentu harus sudah dapat mempertimbangkan berbagai hal yang mungkin timbul dari adanya suatu kebijakan yang akan diimplementasikan, antara lain misalnya persoalan pendanaan, seharusnya dimulai dari proses perumusan atau perencanaan sudah dibahas dengan baik tentang bagaimana sumber daya berupa pendanaan dari kebijakan tersebut untuk diimplementasikan. Berapa dana yang dibutuhkan, dan dari

mana dana tersebut diperoleh apakah bersumber dari Anggaran Desa/APBD/APBN/Hibah/Hutang atau iuran warga idealnya sudah direncanakan, didiskusikan dan disosialisasikan kepada semua stakeholder dengan baik, sehingga persoalan pendanaan tidak menjadi kendala yang cukup berarti. Dan ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang terkait terhadap kebijakan yang sudah diimplementasikan tersebut, untuk selanjutnya dirumuskan kembali kebijakan seperti apa yang diterima/disepakati oleh semua stakeholder, apakah misalnya perlu dicarikan sumber pendanaan lain seperti meminta bantuan ke kabupaten/kota/propinsi atau pemerintah pusat, atau meminta kontribusi atau partisipasi warga masyarakat, ataukah misalnya program tersebut dilanjutkan kembali untuk masa periode yang selanjutnya, atau dihentikan sementara program tersebut, hal tersebut tentu perlu dirumuskan dan sosialisasikan kembali kepada semua stakeholder.



**LAMPIRAN 08****CATATAN LAPANGAN****CATATAN LAPANGAN PERTAMA**

Senin, 6 Maret 2017

Mencari Informasi kepada Sekretaris Desa Sindangmulya di kediaman beliau, di Jalan Raya Cibarusah, Kampung Muncang RT 002 RW 002, Desa Sindangmulya Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Pada pukul 16.00 WIB, peneliti datang ke kediaman Sekretaris desa untuk melakukan observasi dengan menanyakan beberapa informasi terkait Program Pembangunan Jalan di Kampung Muncang diantar oleh salah satu kerabat dari peneliti. Sesampainya disana kebetulan Bapak Dasuki selaku Sekretaris desa Sindangmulya sedang ada di tempat langsung pada saat itu peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Setelah menjelaskan maksud penelitian peneliti langsung menanyakan beberapa pertanyaan terkait program pembangunan jalan di desa Sindangmulya. Setelah selesai melakukan mengajukan beberapa pertanyaan akhirnya peneliti meminta izin untuk pamit untuk pulang, dengan demikian observasi pertama pada hari senin, 6 Maret 2017 selesai pada pukul 17.25 WIB.

**CATATAN LAPANGAN KEDUA**

Senin, 21 Maret 2017

Memberikan surat izin penelitian ke Kantor desa Sindangmulya.

Sekitar pukul 10.00 WIB peneliti sampai di Kantor Desa Sindangmulya. Datangnya peneliti ke kantor desa bermaksud untuk memiminta izin melaksanakan penelitian di desa tersebut tepatnya di Kampung Muncang RT 002 RW 002 serta untuk memberikan surat izin yang sudah dibuat oleh peneliti di kampus. Kedatangan peneliti ke kantor desa disambut kembali oleh Sekretaris desa Sindangmulya Bapak Dasuki. Respon yang cukup baik ditunjukkan oleh beliau dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk segera melaksanakan penelitian, setelah beberapa menit berbincang pada pukul 10.45 peneliti memutuskan untuk meminta izin pulang.

**CATATAN LAPANGAN KETIGA**

Senin, 10 April 2017

Mencari informasi dan mengumpulkan data penelitian dengan meminta profil desa Sindangmulya ke Kantor desa.

Pada hari Senin, 10 April 2017 peneliti mendatangi kantor desa kembali untuk meminta data profil desa kepada Bapak Ujun selaku Kaur Keuangan di desa Sindangmulya. Peneliti sampai di kantor desa pukul 12.30 WIB, sesampainya disana ternyata kantor desa sedang sepi karena sedang jam makan siang dan peneliti hanya bertemu dengan Bapak Dasuki, akhirnya Bapak Dasuki menyarankan untuk menunggu beberapa menit kepada peneliti. Setelah menunggu beberapa menit akhirnya pada pukul 13.20 peneliti bertemu dengan Bapak Ujun untuk meminta data profil desa kepada beliau.

#### **CATATAN LAPANGAN KEEMPAT**

Selasa, 11 April 2017

Mencari informasi dan mengumpulkan data penelitian dengan melakukan wawancara terhadap *Informan* pada masyarakat Kampung Muncang RT 002 RW 002.

Wawancara pertama yang dilakukan peneliti pada *informan* dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB dengan sumber informasi yaitu salah satu warga Kampung Muncang RT 002 RW 002 yaitu Bapak Dao Sukayat bertempat di kediaman beliau. Wawancara berlangsung sekitar 20 menit, dan selesai pada pukul 10.30

#### **CATATAN LAPANGAN KELIMA**

Rabu, 12 April 2017

Mencari informasi dan mengumpulkan data penelitian dengan melakukan wawancara terhadap *Informan* pada masyarakat Kampung Muncang RT 002 RW 002.

Untuk mencari data yang lebih mendalam, peneliti merencanakan untuk kembali mewawancarai beberapa *informan*. Pada hari Rabu, 12 April 2017 peneliti berhasil mewawancarai 3 *informan* yaitu, Bapak Dading, Bapak Rosyid, dan Bapak Ajum. Wawancara pertama dilakukan dengan Bapak Dading selaku warga RT 002 yang jalan lingkungan di daerahnya sudah hampir tersentuh program pembangunan jalan, wawancara kedua dilakukan dengan Bapak Rosyid dengan latar belakang yang sama dengan Bapak Dading. Hasil wawancara yang dilakukan dengan kedua *informan* ini sebagian memiliki kesamaan. Wawancara ketiga dilakukan dengan Bapak Ajum, berbeda dengan kedua *informan* sebelumnya Bapak Ajum merupakan salah satu warga yang jalan lingkungannya belum tersentuh program pembangunan jalan lingkungan sama halnya dengan Bapak dao.

Dari ketiga *informan* yang dapat diwawancarai pada hari itu, peneliti mendapat banyak data dan informasi yang cukup banyak. Karena peneliti melakukan wawancara secara mendalam data yang didapatpun cukup mendalam dan mulai mengalami kejenuhan.

## **CATATAN LAPANGAN KEENAM**

Jumat, 14 April 2017

Mencari informasi dan mengumpulkan data penelitian dengan melakukan wawancara terhadap *Informan* pada masyarakat Kampung Muncang RT 002 RW 002.

Untuk mencari data yang lebih mendalam, peneliti merencanakan untuk kembali mewawancarai beberapa *informan*. Pada pukul 06.00 WIB peneliti sampai di kediaman Bapak H. Munir selaku sumber *informan* yang peneliti pilih untuk diwawancarai. H. Munir sendiri berprofesi sebagai wiraswasta sehingga jarang ada di rumah ketika siang maupun sore hari, sehingga peneliti memutuskan untuk datang pagi hari untuk bertemu beliau. Wawancara dengan Bapak H. Munir dilakukan selama 30 menit tidak berbeda dengan wawancara sebelumnya hampir semua jawaban yang diberikan oleh Bapak H. Munir memiliki kesamaan dengan wawancara yang dilakukan sebelumnya dengan beberapa *informan* yang jalan lingkungan di sekitar wilayahnya belum terimplementasi. Wawancara dengan Bapak H. Munir berakhir Pukul 07.00 WIB.

## **CATATAN LAPANGAN KETUJUH**

Senin, 17 April 2017

Mencari informasi dan mengumpulkan data penelitian dengan melakukan wawancara terhadap *Informan* pada masyarakat Kampung Muncang RT 002 RW 002.

Agar responden genap menjadi 6, peneliti memutuskan untuk mencari kembali *informan* yang bersedia untuk diwawancarai pada hari Senin, 17 April 2017. Pada akhirnya peneliti menemukan responden yaitu Bapak Eman. Wawancara dengan Bapak Eman dilakukan pukul 16.00 WIB, wawancara berlangsung selama selama 20 menit.

## **CATATAN LAPANGAN KEDELAPAN**

Rabu, 19 April 2017

Pendalaman materi kepada *Key Informan*, di kediaman *Key Informan* yang beralamat di Kampung Muncang RT 002 RW 002 Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi.

Pada pukul 10.00 WIB peneliti sampai di kediaman Bapak Sarno selaku ketua RT 002, ketua RT 002 sendiri memiliki profesi sebagai wirausaha di Kampung Muncang. Sesampainya disana eneliti di sambut oleh isteri dari ketua RT, pada saat itu kebetulan sekali ketua RT baru saja keluar untuk berbelanja beberapa barang dagangannya. Sehingga peneliti berinisiatif meminta izin pada isterinya untuk menunggu, setelah beberapa menit berlalu ternyata Bapak RT

belum kunjung pulang dari pasar, akhirnya peneliti memutuskan untuk berpamitan kepada isteri ketua RT dan menitip pesan akan kembali esok harinya.

### **CATATAN LAPANGAN KESEMBILAN**

Kamis, 20 April 2017

Pendalaman materi kepada *Key Informan*, di kediaman *Key Informan* yang beralamat di Kampung Muncang RT 002 RW 002 Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi.

Pada hari Kamis, 20 April 2017 peneliti kembali datang ke kediaman Bapak RT untuk melakukan wawancara. Namun ternyata Bapak RT tidak sedang di tempat melainkan sedang berada di mesjid samping rumahnya yang sedang di renovasi, sehingga peneliti beranjak menuju mesjid yang ada di samping rumah ketua RT dan bertemu ketua RT disana. Peneliti melakukan wawancara di salah satu rumah warga sekitar pukul 10.15. peneliti mulai mewawancarai Bapak Sarno untuk mengkonfirmasi data dan informasi yang diperoleh dari *informan*. Hingga pukul 10.45 peneliti telah cukup mendapatkan data dan informasi dari Bapak Sarno.

Sore harinya pukul 16.00 WIB peneliti datang ke rumah Bapak Dasuki untuk melakukan wawancara kedua dengan *key informan*, namun pada saat peneliti sampai disana Bapak Dasuki belum pulang dari bekerja, menurut penuturan isterinya, Bapak sedang ada agenda untuk donor darah sehingga kepulangannya tidak bisa dipastikan, hal tersebut membuat peneliti mengurungkan diri untuk melakukan wawancara dengan Bapak dasuki hari ini dan kembali keesokan harinya. Penelitian pada hari Kamis, 20 April 2017 pun selesai.

### **CATATAN LAPANGAN KESEPULUH**

Jumat, 21 April 2017

Pendalaman materi kepada *Key Informan*, di kediaman *Key Informan* yang beralamat di Kampung Muncang RT 002 RW 002 Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi.

Pada pukul 16.30 WIB peneliti sampai di kediaman sekretaris desa Bapak Dasuki untuk bertemu dan melakukan wawancara dengan beliau selaku *key informan* pada penelitian ini. Wawancara dengan Bapak Dasuki dimulai pukul 16.40 WIB, peneliti mulai mewawancarai Bapak Dasuki untuk mengkonfirmasi data dan informasi yang diperoleh dari *informan*. Wawancara berlangsung selama kurang lebih 21 menit, setelah dirasa sudah cukup mendapat data dan informasi dari Bapak Dasuki. Penelitian pada Jumat sore, 21 April 2017 pun selesai.

### **CATATAN LAPANGAN KESEBELAS**

Sabtu, 22 April 2017

Pendalaman materi kepada *Key Informan*, di kediaman *Key Informan* yang beralamat di Kampung Muncang RT 002 RW 002 Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi.

*Key informan* dalam penelitian berjumlah 3 orang yaitu, Bapak Acong Deding (Kepala desa), Bapak Dasuki (Sekretaris Desa), dan Bapak Sarno (Ketua RT 002). Pada hari Sabtu, 22 April 2017 pukul 10.00 WIB peneliti berniat untuk melakukan wawancara kembali dengan *Key Informan* terakhir yaitu Bapak Acong. Namun saat peneliti sampai di kediaman Kepala Desa, beliau tidak ada di tempat sehingga peneliti memutuskan untuk kembali lain hari untuk menemui Bapak Acong.

### **CATATAN LAPANGAN KEDUABELAS**

Senin, 24 April 2017

Pendalaman materi kepada *Key Informan*, di kediaman *Key Informan* yang beralamat di Kampung Muncang RT 002 RW 002 Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi.

Setelah dua hari sebelumnya peneliti datang langsung ke kediaman beliau, pada hari Senin, 24 April 2017 peneliti datang kembali ke rumah beliau dengan harapan dapat bertemu dengan Bapak Acong. Namun untuk yang kedua kalinya peneliti tidak berhasil menemui Bapak Acong. Sehingga peneliti mengurungkan niat untuk bertemu Bapak Acong pada hari itu. Sulitnya bertemu dengan Kepala Desa membuat peneliti berniat menjadikan *key informan* menjadi 2 (dua) orang, hal itu di dorong selain karena sulitnya bertemu Kepala Desa juga didorong data yang diras sudah mendalam. Keputusan peniliti hanya menggunakan dua responden pun di izinkan oleh kedua dosen pembimbing.

## LAMPIRAN 09

## TRIANGULASI DATA

No	Temuan Lapangan	Pendapat <i>Expert Opinion</i>	Keterangan
1	Program pembanguna jalan lingkungan ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena belum terselenggara di setiap bagian jalan yang ada di daerah RT 002 RW 002	<p>Suatu kebijakan public dikategorikan berhasil dilaksanakan dengan baik , antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tujuan yang ingin dicapai atau diharapkan dari suatu kebijakan publik sesuai dengan visi dan misinya tersebut tercapai, yaitu kepentingan publik terpenuhi dengan baik.</li> <li>2) Adanya Kebijakan publik tersebut dapat dirasakan manfaat atau faedahnya oleh masyarakat yang lebih besar dan luas, baik secara langsung maupun tidak langsung.</li> <li>3) Adanya kebijakan public tersebut tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru, atau menghilangkan atau dapat meminimalisir persoalan-persoalan dalam masyarakat.</li> </ol> <p>Ada dukungan, partisipasi, dan kepercayaan public terhadap kebijakan public tersebut, sehingga implementasi dari suatu kebijakan public dapat terwujud dengan baik.</p>	
2	Belum maksimalnya pemerintah dalam urusan sosialisasi program tersebut	<p>Sosialisasi kebijakan publik kepada semua stakeholder merupakan satu hal yang sangat penting bagi tercapainya tujuan dari kebijakan publik tersebut, sosialisasi idealnya dilaksanakan mulai dari perumusan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, sampai pada saat evaluasi dari kebijakan publik tersebut. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan diperoleh satu pemahaman yang baik, utuh dan menyeluruh dari semua stakeholder baik sebagai pelaksana maupun masyarakat terhadap satu kebijakan publik tersebut, sehingga pada akhirnya kebijakan publik tersebut dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya kendala-kendala yang berarti. Dan juga dengan sosialisasi terhadap implementasi kebijakan tersebut, diharapkan masyarakat juga akan ikut berpartisipasi aktif terhadap adanya kebijakan tersebut, masyarakat juga akan ikut merasakan dampak positif dari adanya kebijakan</p>	

		publik tersebut. Dan sebaliknya sosialisasi yang kurang baik seringkali menimbulkan banyak persoalan-persoalan, dalam tataran implementasi misalnya kurangnya sosialisasi dapat juga menimbulkan minimnya dukungan dan partisipasi dari masyarakat untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan publik tersebut, bahkan bisa jadi justru menimbulkan suatu penolakan atau penentangan terhadap kebijakan publik yang sudah dirumuskan dan diimplementasikan tersebut.	
3	Sosialisasi yang hanya dilakukan oleh pihak aparat desa (RT,RW)	Sosialisasi secara umum dapat dilakukan melalui dua cara baik secara formal maupun informal, dan tentunya semakin baik jika program-program pembangunan atau suatu kebijakan publik dapat disosialisasikan oleh banyak pihak yang tentunya memiliki pengetahuan atau kompeten terhadap hal tersebut. Dalam skala yang lebih kecil sosialisasi terhadap program pembangunan atau satu kebijakan publik dapat dilakukan oleh agen-agen sosialisasi seperti oleh aparat desa atau RT/RW. Namun demikian alangkah baiknya jika sosialisasi terhadap suatu program atau kebijakan tidak hanya dilakukan oleh aparat desa (RT/RW) saja, sosialisasi dapat dilakukan oleh kepala desa atau aparat kecamatan, kabupaten/kota atau propinsi bahkan oleh pemerintah pusat yang terkait dengan program atau kebijakan publik tersebut. Sosialisasi juga dapat dilakukan melalui sekolah, kampus, media massa, atau LSM misalnya, sepanjang sosialisasi yang dilakukan tidak saling bertentangan maka diharapkan sosialisasi terhadap suatu program atau kebijakan publik akan berjalan lebih efektif dan efisien.	
4	Munculnya penolakan yang dilakukan oleh segelintir orang terhadap program pembangunan ini.	Penolakan terhadap suatu kebijakan publik atau suatu program pembangunan yang dibuat, biasanya karena sosialisasi terhadap masyarakat khususnya yang menerima dampak langsung dari suatu program atau kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik, dan juga karena kebijakan atau program tersebut dianggap justru tidak menimbulkan atau memberikan dampak positif bagi masyarakat yang secara langsung terdampak dari adanya program atau kebijakan	

	<p>tersebut (dalam hal ini misalnya pemilik tanah merasa tidak memperoleh nilai manfaat atau keuntungan, tetapi justru merasa dirugikan oleh adanya program tersebut). Oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluar yang baik sehingga dapat diminimalisir adanya penolakan terhadap kebijakan tersebut, misalnya disamping perlu disosialisasikan terkait dampak/manfaat positif bagi masyarakat secara luas, maka misalnya perlu juga diberikan semacam ganti untung atau kompensasi terhadap tanah warga yang terdampak kebijakan tersebut, sehingga diharapkan masyarakat yang tanahnya terdampak program tersebut dapat menerimanya dengan baik.</p>	
--	---	--



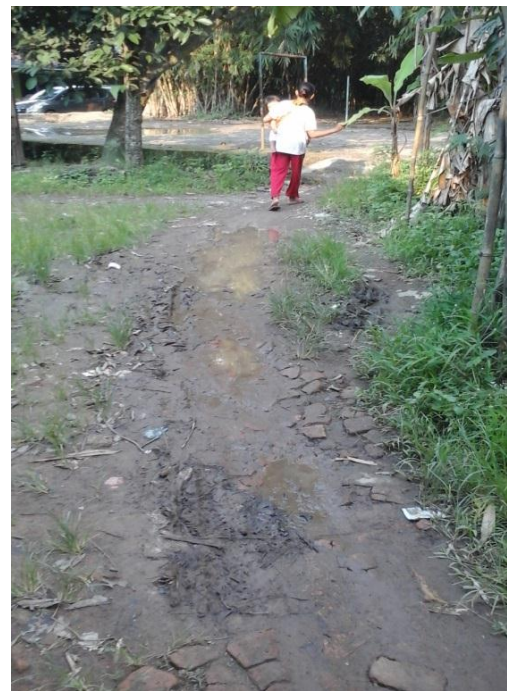
**LAMPIRAN 09****FORMAT OBSERVASI**

Tanggal Observasi :

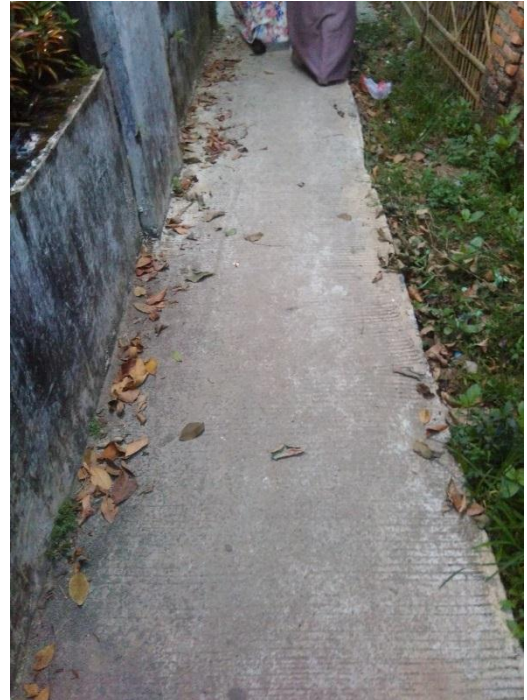
Dalam pengamatan (Observasi) yang dilakukan adalah mengamati aktivitas masyarakat dan pemerintah dalam upaya mensukseskan pembangunan jalan Lingkungan.

No.	Aspek yang diamati	Ya	Tidak	Keterangan
1	Stakeholder melakukan sosialisasi tentang program pembangunan jalan lingkungan			
2	Masyarakat ikut serta dalam pengukuran jalan			
3	Masyarakat menyediakan tanah untuk menyukseskan pembangunan			
4	Masyarakat ikut merawat fasilitas jalan lingkungan			

**DOKUMENTASI**



**Kondisi Jalan yang belum tersentuh Program Pembangunan**



**Kondisi Jalan yang sudah tersentuh Program Pembangunan Jalan**



**Peneliti pada saat datang ke kantor desa untuk Observasi awal**



**Peneliti pada saat datang ke kantor desa untuk memberikan surat izin penelitian**



**Wawancara bersama Informan  
Bpk. Dao**



**Wawancara bersama Informan  
Bpk. Dading**



**Wawancara bersama Informan  
Bpk. Rosyid**



**Wawancara bersama Informan  
Bpk. Ajum**



**Wawancara bersama Informan  
Bpk. Eman**



**Wawancara bersama Informan  
Bpk. H. Munir**



**Wawancara bersama Key  
Informan Bpk. Sarno**



**Wawancara bersama Key  
Informan Bpk. Dasuki**



*Building  
Future  
Leaders*

# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PRI : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982  
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180  
Bagian UHT : Telepon, 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian Humas : 4898486  
Laman : www.unj.ac.id

Nomor : 0720/UN39.12/KM/2017  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan Izin Mengadakan Penelitian  
untuk Penulisan Skripsi**

2 Maret 2017

Yth. Kepala Desa Sindang Mulya  
Jl. Raya Cibarusah Kota, Cibarusah,  
Jawa Barat 17340

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : **Yulyani**  
Nomor Registrasi : 4115131082  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas : Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta  
No. Telp/HP : 089505928708

Dengan ini kami mohon diberikan ijin mahasiswa tersebut, untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

**"Implementasi Pembangunan Jalan Desa di Kampung Muncang RT 002/RW 002"**

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,  
dan Hubungan Masyarakat



Tembusan :  
1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
2. Kaprog Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Woro Sasmoyo, SH  
NIP. 19630403 198510 2 001



Building  
Future  
Leaders

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telp. (62-21) 29266139, 29266138, 4890046 Ext. 203, 47882930, 4890108, 4753655,  
Fax. (62-21) 47882930, 4753655

**FORMAT KELULUSAN  
SEMINAR HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan Seminar Hasil Penelitian yang telah dilakukan dan setelah dilakukan perbaikan atau masukan dalam Seminar Hasil Penelitian tersebut, maka mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Yulyani  
No. Registrasi : 4115131082  
Program Studi : PPKN  
Fakultas : Ilmu Sosial

Dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS\*)** Seminar Hasil Penelitian dan selanjutnya yang bersangkutan dianggap **LAYAK/TIDAK LAYAK\*)** untuk mengikuti UJIAN/SIDANG SKRIPSI.

Dosen Pembimbing I

Irawaty, Ph.D.  
NIP.19770604.200501.2.001

Dosen Pembimbing II

Mohammad Maiwan, Ph.D.  
NIP.19680318.199903.1.001

Mengetahui,  
Dosen Mata Kuliah  
Seminar Hasil Penelitian

Yasnita Yasin, S.Pd., M.Si  
NIP. 19750303.200501.2.001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Yulyani, anak ketiga dari enam bersaudara yang terlahir dari pasangan Dao sukayat dan Badriah. Lahir di Bekasi pada tanggal 13 Juni 1995. Memulai pendidikan di SD Sindangmulya 03 pada tahun 2001 s.d 2007. Kemudian melanjutkan ke bangku Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2007 hingga tahun 2010 di SMPN 1 Cibarusah. Setelah lulus SMP pada tahun 2010, peneliti meneruskan pendidikan di SMAN 1 Cibarusah hingga lulus pada tahun 2013 dan melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Jakarta pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selama berkuliah peneliti pernah mengikuti beberapa organisasi baik Organisasi Pemerintah Mahasiswa (OPMAWA) maupun Organisasi Mahasiswa (ORMAWA). Organisasi pertama peneliti di dalam dunia perkuliahan adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik (HMJ ISP), dan bergabung sebagai staf Biro Kewirausahaan. Tahun berikutnya di Tahun 2014 peneliti ikut bergabung di Koprasi Mahasiswa (KOPMA) sebagai anggota dan pengurus, saat menjabat sebagai pengurus, peneliti berada di divisi Handicraft sebagai staf operasional. Hingga di tahun ketiga peneliti menjadi staf biro Manajemen Keuangan (MENKEU) di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta periode 2015 s.d. 2016.